

**LAPORAN INDIVIDU**  
**PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING**  
**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 YOGYAKARTA**  
**Jalan A.M Sangaji 50 Cokrodiningratan, Jetis, Daerah Istimewa Yogyakarta**

Laporan ini disusun sebagai Pertanggungjawaban  
Praktik Lapangan Terbimbing Semester Ganjil  
Tahun Ajaran 2017/2018



**Disusun Oleh:**

**Rahayu Setyaningsih**

---

**NIM : 14401241003**

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pembimbing kegiatan PLT di SMA Negeri 11 Yogyakarta Jalan A.M Sangaji 50 Cokrodingratan, Jetis, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

**Nama** : Rahayu Setyaningsih  
**NIM** : 14401241003  
**Jurusan** : Pendidikan Kewarganegaraan Hukum  
**Prodi** : Pendidikan Kewarganegaraan  
**Fakultas** : Fakultas Ilmu Sosial

Telah melaksanakan kegiatan PLT di SMA Negeri 11 Yogyakarta dari tanggal 18 September sampai dengan tanggal 15 November 2017. Hasil kegiatan mencakup dalam naskah laporan ini.

Yogyakarta, 15 November 2017

Dosen Pembimbing Lapangan

Guru Pembimbing



Sri Hartini, M.Hum

Sulastri, S.Pd


NIP. 195801161985032001

NIP.197209262006042006

Mengetahui,

Kepala Sekolah SMA N 11  
Yogyakarta

Koordinator PLT  
SMA N 11 Yogyakarta

  
Rudy Rumanto, S.Pd  
NIP. 196503121994121003  
Dwi Raharjo, S.Pd  
NIP.197003011992011001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) yang tercantum dalam laporan kegiatan PLT di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta, Jl. AM Sangaji No. 50 Yogyakarta ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam laporan ini berisi deskripsi secara menyeluruh mengenai kegiatan PLT Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di lokasi PLT.

Dalam menyusun laporan ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang saya alami, namun berkat dukungan, dorongan dan semangat dari orang terdekat, sehingga saya mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., selaku rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan melaksanakan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT).
2. Ibu Sri Hartini, M.Hum, selaku dosen pembimbing Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran, serta dengan kesabarannya dalam membimbing penyusunan laporan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT).
3. Bapak Rudy Rumanto, S.Pd., selaku kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta yang telah memberikan izin, sarana dan prasarana serta kesempatan kepada Peserta Didik untuk melaksanakan program Praktik Lapangan Terbimbing (PLT)
4. Bapak Dwi Raharjo, S.Pd., selaku koordinator Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Praktikan untuk belajar. Atas kesabaran, dukungan, bimbingan, motivasi, nasehat dan pengertiannya sehingga Praktikann dapat menjalankan kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) dengan baik dan lancar.
5. Ibu Sulastri, S.Pd selaku guru pembimbing yang telah memberikan saran, nasihat, dan pengarahan serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi praktikan dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar ketika Praktik Lapangan Terbimbing (PLT).
6. Bapak/Ibu guru dan seluruh staf dan karyawan yang telah membantu selama pelaksanaan program Praktik Lapangan Terbimbing (PLT).

- 
7. Seluruh Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta yang telah mendukung dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti program Praktik Lapangan Terbimbing (PLT).
  8. Teman-teman seperjuangan PLT-UNY, PLT-UST, dan PLT-USD yang telah bekerja sama melaksanakan program dengan penuh kekompakan dan kebersamaan.
  9. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Saya ucapkan terimakasih atas bantuan, bimbingan, pengarahan, serta dukungan yang telah diberikan. Semoga menjadi amal yang baik dan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Tak lupa saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama pihak di lokasi PLT, apabila saya melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama pelaksanaan PLT. Akhir kata saya berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Aamin.

Yogyakarta, 15 November 2017

Mahasiswa PLT



Rahayu Setyaningsih

14401241003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Analisis Situasi.....	1
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT .....	8
BAB II PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL.....	11
A. Persiapan .....	11
B. Pelaksanaan Program PLT .....	14
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi .....	20
BAB III PENUTUP .....	23
A. Kesimpulan .....	23
B. Saran.....	23
DAFTAR PUSTAKA .....	25
LAMPIRAN.....	26

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik PLT
2. Kalender Akademik Tahun Pelajaran 2017-2018
3. Perhitungan Minggu dan Jam Efektif Semester 1
4. Kartu Bimbingan PLT
5. Laporan Pelaksanaan Harian PLT
6. Program Tahunan
7. Program Semester
8. RPP Kelas X
9. Silabus Kelas X
10. Kisi-Kisi Soal Ulangan Harian
11. Soal Ulangan Harian
12. Keterlaksanaan Perbaikan Dan Pengayaan
13. Daftar Presensi Siswa
14. Daftar Nilai Siswa
15. Analisis Butir Soal
16. Dokumentasi

**LAPORAN INDIVIDU  
PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 YOGYAKARTA**

**Oleh:  
Rahayu Setyaningsih (NIM 14401241003)**

**ABSTRAK**

*Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan bentuk perkuliahan yang dilaksanakan dengan langsung terjun ke lembaga atau sekolah untuk mendapatkan pengalaman sebagai seorang guru serta mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa sekaligus menjadi motivasi untuk terus mengaktualisasi diri dan mengabdikan di dunia pendidikan agar mampu mewujudkan dunia pendidikan yang berkualitas dimasa depan. Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta (SMA Negeri 11 Yogyakarta) JL. AM Sangaji No. 50 Jetis, Yogyakarta merupakan salah satu sekolah yang menjadi tempat Praktik Lapangan Terbimbing (PLT). SMA Negeri 11 Yogyakarta merupakan sekolah dengan nuansa kebangsaan, sekolah hijau dan memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang banyak untuk Peserta Didik. Peserta Didik aktif dalam kegiatan pembelajaran dan non pembelajaran. Banyak Peserta Didik yang mengoptimalkan fasilitas-fasilitas dan komunitas yang ada di sekolah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Selain itu, kegiatan kerohanian juga dilangsungkan dengan baik oleh pihak sekolah, yaitu dengan kegiatan afeksi setiap hari Jum'at.*

*PLT di SMAN 11 Yogyakarta ini berlangsung mulai tanggal 18 September 2017 – 15 November 2017 dalam pembelajaran mata pelajaran PPKn untuk kelas X IPA 1 dan X IPS 1. Kegiatan PLT dilaksanakan mulai dari Observasi, menyusun administrasi berupa pengitungan hari/jam efektif, program tahunan, program semester, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pelaksanaan pembelajaran dan analisis hasil belajar siswa. Di samping itu kegiatan nonpembelajaran juga dilaksanakan antara lain piket 3S (Senyum, Salam, Sapa), Piket perpustakaan, dan piket Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), serta kegiatan administrasi.*

*Secara umum, pelaksanaan program Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di SMA Negeri 11 Yogyakarta berjalan dengan lancar sesuai dengan program yang telah disusun. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara praktikan dengan pihak - pihak diantaranya adalah dosen pembimbing, guru pembimbing, Peserta Didik, dan teman-teman mahasiswa PLT walaupun terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh praktikan, seperti kesulitan menghafal nama peserta didik, peserta didik yang ramai sendiri. Solusi dalam mengatasi kesulitan menghafal nama peserta didik, praktikan selalu melakukan presensi sebelum pembelajaran dimulai. Ketika peserta didik ramai sendiri, praktikan memberikan aktivitas berupa penugasan kepada peserta didik agar fokus ke pembelajaran.*

**Kata kunci : Praktik Lapangan Terbimbing, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

## BAB I

### PENDAHULUAN

Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dalam meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan lulusan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional untuk menghasilkan tenaga kependidikan. Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah, untuk diterapkan dalam kehidupan nyata khususnya di lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan nonformal serta masyarakat. Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa sebagai wahana untuk membentuk tenaga kependidikan yang profesional serta siap untuk memasuki dunia pendidikan, serta mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kependidikan atau calon guru yang memiliki kompetensi pedagogik, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang profesional sebagai seorang tenaga kependidikan.

PLT juga merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa UNY yang mengambil jurusan kependidikan. Kegiatan PLT Ini mahasiswa berkesempatan untuk mempraktikkan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah, agar para mahasiswa tidak sekedar mengetahui suatu teori, tetapi lebih jauh lagi mereka juga memiliki kemampuan untuk menerapkan teori tersebut, tidak hanya dalam situasi simulasi tetapi dalam situasi sesungguhnya (*real teaching*). Sebelum pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing, seluruh mahasiswa Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) Universitas Negeri Yogyakarta harus memahami terlebih dahulu situasi, kondisi, dan keadaan sekolah. Pengenalan situasi ini baik berupa kondisi geografis sekolah maupun kondisi fisik sekolah yang melingkupi fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.

Peran mahasiswa dalam kegiatan ini adalah mampu memberikan kontribusi positif bagi sekolah dalam rangka peningkatan maupun pengembangan program-program sekolah. Oleh karena itu mahasiswa peserta PLT berusaha untuk merancang dan melaksanakan program-program PLT yang sejalan dengan program sekolah sebagai upaya untuk lebih memajukan sekolah diberbagai bidang. Melalui kegiatan ini mahasiswa dapat mengukur kesiapan dan kemampuan untuk menjadi *innovator mediator problem solver* dalam menghadapi berbagai permasalahan di sekolah dan di dunia pendidikan pada umumnya. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama PLT diharapkan dapat digunakan sebagai bekal untuk membentuk calon guru tenaga kependidikan yang profesional. Melihat latar belakang yang ada, praktik melaksanakan PLT di tempat yang dipilih sebelumnya dari beberapa tempat yang telah ditentukan oleh pihak LPPMP. SMA ini berlokasi di Jl.AM. Sangaji 50,

Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta. Sebelum kegiatan PLT dilaksanakan, dilakukan kegiatan observasi terlebih dahulu secara garis besar yang berhubungan dengan permasalahan dan potensi pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Hal-hal yang diamati antara lain:

- a. Perangkat pembelajaran seperti Silabus, dan RPP yang digunakan sekolah.
- b. Proses pembelajaran, meliputi membuka pelajaran, penyampaian materi, metode pembelajaran, penggunaan bahasa, penggunaan waktu, gerak, cara memotivasi siswa, teknik bertanya, teknik penguasaan kelas, penggunaan media, bentuk dan cara evaluasi, serta menutup pelajaran.
- c. Perilaku siswa meliputi perilaku siswa didalam kelas dan diluar kelas.

## **A. Analisis Situasi**

### **1. Profil SMAN11 Yogyakarta**

#### **a. Identitas Sekolah**

Nama Sekolah	: SMAN 11 Yogyakarta
NISN/ NSS	: 301046004059
Status	: Negeri
Status Akreditasi	: Terakreditasi A (96,63)
Pelaksanaan Program SMA	: SK. Dit. Pembinaan, Kemendiknas No: Model SKM – PBKL – PSB 961/C.C4/LK/2010, Penetapan 132 SMA Model SKM – PBKL – PSB
Alamat Sekolah	: Jl. AM. Sangaji no. 50 Yogyakarta
Propinsi	: Daerah Istimewa Yogyakarta
Kab/ Kota	: Yogyakarta
Kecamatan	: Jetis
Kode Pos	: 55233
Telepon	: 0274565898
Fax	: 0274565898
Website	: <a href="http://www.sma11jogja.sch.id">www.sma11jogja.sch.id</a>
Email	: <a href="mailto:smanegeri11_yogyakarta@yahoo.com">smanegeri11_yogyakarta@yahoo.com</a>

#### **b. Sejarah Singkat Sekolah**

Gedung dibangun pada tahun 1897 dan digunakan sebagai gedung Kweekschool (Sekolah Guru Zaman Belanda). Pada tanggal 3 – 5 Oktober dijadikan sebagai ajang Kongres Boedi Utomo yang pertama dan menempati ruang makan Kweekschool (Aula Budi Utomo). Tahun 1927 kompleks gedung ini digunakan sebagai sekolah guru untuk masa studi 4 tahun dan 6 tahun (HIK). Selama penjajahan Jepang digunakan untuk SGL dan ditutup pada masa Revolusi Kemerdekaan RI.

Tahun 1946 sekolah dibuka kembali dengan nama SGB dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru yang berpendidikan 6 tahun pada bulan November 1947, pemerintah membuka Sekolah Guru A (SGA) sehingga kompleks gedung menjadi SGA/ SGB dipimpin oleh bapak Sikun Pribadi. Perkembangan SMAN 11

Yogyakarta

1) 1989 – 1990	: Jumlah kelas 12
2) 1991 – 1994	: Jumlah kelas 14
3) 1994 – 2008	: Jumlah kelas 16
4) 2009 – 2010	: Jumlah kelas 18
5) 2010 – 2011	: Jumlah kelas 20
6) 2011 – 2012	: Jumlah kelas 23
7) 2012 – 2013	: Jumlah kelas 26
8) 2013 – 2014	: Jumlah kelas 27
9) 2014 – sekarang	: Jumlah kelas 27

## 2. Visi dan Misi SMAN 11 Yogyakarta

*Trend* perkembangan dunia ditunjukkan dengan adanya perubahan yang sangat cepat pada berbagai aspek kehidupan. Hal itu menuntut adanya paradigma baru dunia pendidikan, yaitu perlunya cara pandang secara holistik. Artinya dunia pendidikan akan menekankan pada penekanan yang menyeluruh dan bersifat global. Paradigma baru di dunia pendidikan ini sekaligus menuntut pengembangan kemampuan peserta didik untuk:

- a. Mendekati permasalahan secara global dengan pendekatan multidisipliner
- b. Menyeleksi arus informasi yang sedemikian deras untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari
- c. Menghubungkan peristiwa satu dengan yang lain secara kreatif
- d. Meningkatkan kemandirian dalam kehidupan yang semakin kompleks
- e. Menekankan pembelajaran lebih pada *learning how to learn*, dari pada *learning something*.

Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan untuk bersaing di era global sangat diperlukan. Mutu pendidikan hanya akan terwujud jika proses pendidikan di sekolah benar-benar menjadikan peserta didik mampu belajar dan belajar sebanyak mungkin. Mutu pendidikan harus dilihat dari meningkatnya kemampuan belajar peserta didik secara mandiri, bukan dari informasi pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Pengetahuan apa pun yang mereka kuasai adalah hasil belajar yang mereka lakukan sendiri. Selain itu, perbaikan mutu pendidikan itu sesungguhnya terjadi di dalam kelas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang tidak dapat dihindarkan dari perkembangan dunia secara global, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi harus dipahami dan dikuasai oleh peserta didik sekolah menengah. Dengan demikian upaya penataan dan pengembangan program pendidikan perlu diperhatikan dengan seksama agar tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan. Penataan dan pengembangan SMA perlu diarahkan pada program-program yang dapat meningkatkan akses, peningkatan mutu dan relevansi serta efiseinsi manajemen pendidikan.

SMAN 11 Yogyakarta memandang perlu mempersiapkan lulusannya untuk memiliki kemampuan tersebut agar lebih dapat bersaing dan mendapat kesempatan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau memperoleh posisi penting di dunia usaha atau di dunia industri di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, SMN11 Yogyakarta perlu melakukan proses perubahan dan pengembangan guru, karyawan dan peserta didik sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja pada era globalisasi ini, dengan me-reposisi-kan menjadi SMA Kebangsaan yang memiliki program Pendidikan Berbasis Budaya, yang harapannya dapat meningkatkan kualitas akses, mutu dan relevansi serta efisiensi pengelolaan pendidikan.

Sejak beberapa tahun terakhir ini orientasi pengembangan SMAN 11 Yogyakarta sudah mengarah ke sekolah modern yang unggul dalam kemampuan pelestarian budaya tata boga dan karawitan, unggul dalam penguasaan bahasa Inggris serta teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mendukung arah pengembangan sekolah tersebut maka dicanangkan Visi dan Misi SMAN11 Yogyakarta, adapun Visi SMAN 11 Yogyakarta yaitu : “Terwujudnya Sekolah Yang Unggul Intelektual, Integritas Santun Berwawasan Kebangsaan dan Bercakrawala Global”.

Visi ini merupakan kristalisasi dan upaya keras SMAN 11 Yogyakarta dalam mencetak dan menghasilakn lulusan berkualitas dari sisi intelektual maupun integritas moral, serta memiliki semangat untuk kebangsaan, sehingga dapat berkembang dan bermanfaat untuk bangsa dan negara Indonesia. Adapun maknanya adalah sebagai berikut:

- 1) Sekolah unggul intelektual: sekolah yang insannya tajam pikirannya, cerdas, pandai, tanggap, berpengetahuan luas, terampil, berpikir ilmiah, kreatif, inovatif dan logis
- 2) Sekolah unggul integritas santun: sekolah yang insannya mengerti siapa dirinya, masa depannya, berpikiran ke depan, punya rasa percaya diri, berpandangan terbuka, berbudi luhur, taat menjalankan agamanya, sopan santun, memiliki perasaan hati yang bersih, murni dan mendalam.
- 3) Insan berwawasan kebangsaan bercakrawala global: insan yang menyadari cinta bangsa dan tanah air bertekad mempertahankan dan memajukannya sehingga

setara dengan bangsa-bangsa lain dan menyadari merupakan bagian dari kehidupan di dunia ini.

Sejalan dengan visi dan indikator visi yang telah dicanangkan dan dengan semangat untuk mengedepankan keunggulan di era global, maka SMAN 11 Yogyakarta memiliki misi sebagai berikut ini:

- a. Menerapkan sistem layanan pendidikan yang bermutu berpedoman pada 8 Standar Nasional Pendidikan
- b. Mengembangkan kemampuan akademik bercakrawala global dengan penerapan dan pengembangan kurikulum lokal, nasional maupun internasional
- c. Mengembangkan potensi dan kreatifitas peserta didik secara optimal yang berakar pada nilai-nilai agama dan budaya nasional Indonesia sesuai dengan tuntutan globalisasi
- d. Menciptakan budaya sekolah yang sportif, kreatif, menyenangkan dan santun dengan penuh rasa kekeluargaan
- e. Membangun kerjasama dengan pihak luar sekolah sesuai dengan tuntutan globalisasi

### **3. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai oleh SMAN 11 Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk peserta didik yang memiliki keimanan dan ketaqwaan, akhlak mulia, budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa
- b. Mengoptimalkan potensi dan kreatifitas peserta didik untuk mencapai berbagai keunggulan dan mampu bersaing ditingkat lokal, nasional dan internasional dalam waktu sewindu
- c. Membekali peserta didik agar memiliki kemampuan akademik dan non akademik berwawasan global, berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- d. Mewujudkan profesionalisme dan etos kerja penyelenggaraan pendidikan
- e. Menjadikan warga sekolah bersikap jujur, kreatif, inovatif dan mandiri serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

### **4. Kondisi Fisik Sekolah**

Kegiatan PLT di SMAN 11 Yogyakarta dimulai dengan melakukan observasi ke sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan sekolah, mencari data dan informasi mengenai kondisi fisik SMAN 11 Yogyakarta. Berikut adalah data hasil observasi yang dilakukan oleh PLT UNY:

a. Ruang Kelas

Ruang kelas di SMAN 11 Yogyakarta terdiri dari 27 ruangan. Dimana masing-masing kelas X, XI, XII memiliki 7 rombel kelas program IPA dan 2 program IPS untuk kelas X dan XI, kemudian 6 rombel kelas program IPA dan 3 Rombel kelas IPS. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Kelas

No	Kelas	Jumlah	Keterangan
1	X	9	X IPA 1, X IPA 2, X IPA 3, X IPA 4, X IPA 5, X IPA 6, X IPA 7, X IPS 1, dan X IPS 2.
2	XI	9	XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, XI IPA 4, XI IPA 5, XI IPA 6, XI IPA 7, XI IPS 1, dan XI IPS 2.
3	XII	9	XII IPA 1, XII IPA 2, XII IPA 3, XII IPA 4, XII IPA 5, XII IPA 6, XII IPS 1, XII IPS 2 dan XII IPS 3.

b. Ruang Laboratorium

SMAN 11 Yogyakarta memiliki laboratorium Biologi, Fisika, Kimia dan Komputer.

c. Ruang Aula

SMAN 11 Yogyakarta memiliki aula yang bernama Aula Budi Utomo.

d. Ruang Pertemuan

SMAN 11 Yogyakarta memiliki dua ruang pertemuan, yaitu ruang AVA, ruang Garuda dan ruang Commite.

e. Ruang Karawitan

SMAN 11 Yogyakarta memiliki satu ruang untuk karawitan.

f. Ruang Tata Usaha

SMAN 11 Yogyakarta memiliki ruang Tata Usaha yang terletak di bagian depan gedung sekolah.

g. Ruang Kepala Sekolah

Terletak di bagian depan sekolah dan disamping ruang tata usaha, didalamnya terdapat meja dan kursi untuk menerima tamu, dan terdapat tv untuk memantau ruang kelas dengan alat bantu cctv.

h. Ruang Wakil Kepala Sekola

Ruang Wakil Kepala Sekolah berada di sebelah timur Aula Budi Utomo.

i. Ruang Guru

Ruang Guru berada di sebelah selatan ruang Wakil Kepala Sekolah

j. Ruang Bimbingan Konseling

Ruang Bimbingan Konseling berada di sebelah utara ruang Wakil Kepala Sekolah

k. Ruang Perpustakaan

Perpustakaan SMAN 11 Yogyakarta bernama Perpustakaan Ki Hajar Dewantara. Perpustakaan ini dikelola dengan sangat baik. Kondisi dari perpustakaan tersebut adalah rapi, bagus dan bersih. Ruangnya sangat luas dan nyaman. Disana terdapat kursi, meja baca, dan tempat lesehan untuk membaca.. Perpustakaan ini pernah menjadi juara perpustakaan terbaik se-DIY tahun 1993. Selain sebagai tempat untuk membaca dan mencari buku, perpustakaan juga berfungsi sebagai kelas non Islam. Perpustakaan tersebut sudah mengelompokkan buku sesuai dengan jenisnya. Berikut adalah pengelompokkan buku di perpustakaan :

- 1) Laporan KKN PLT mahasiswa
- 2) Karya Umum
- 3) Ilmu sosial, politik, ekonomi, hukum dan pendidikan
- 4) Ilmu agama
- 5) Bahasa
- 6) Ilmu murni
- 7) Ilmu terapan
- 8) Kesenian dan olahraga
- 9) Kesusastraan
- 10) Biografi dan sejarah
- 11) Fiksi
- 12) Buku laporan Ilmu pengetahuan praktis
- 13) Ilmu pasti dan IPA
- 14) Ilmu pengetahuan dan masyarakat
- 15) Sastra
- 16) Seni hiburan dan olah raga
- 17) Sejarah, Biografi dan Ilmu bumi
- 18) Ilmu pengetahuan bahasa

- 19) Karya ilmiah
- 20) Majalah
- 21) Komputer

Komputer yang terdapat di perpustakaan sebanyak 10 unit. Komputer-komputer tersebut berfungsi dengan baik dan dimanfaatkan oleh siswa-siswa untuk mencari informasi. Selain itu juga terdapat LCD dan proyektor untuk memfasilisi kegiatan belajar mengajar di perpustakaan.

1. Koperasi Peserta didik

Koperasi peserta didik terletak diantara kelas XII program IPA

m. Ruang Ekstrakurikuler

Ruang Ekstrakurikuler berada di sebelah utara aula Budi Utomo

n. Ruang OSIS

Ruang Ekstrakurikuler berada di sebelah utara aula Budi Utomo

o. Ruang UKS

UKS berada di sebelah barat ruang BK

p. Kantin

Kantin berada di belakang kelas X IPS, yang terdiri dari 6 kios kantin

q. Ruang Hijau

Ruang Hijau berada di sebelah selatan aula Budi Utomo yang berisi tanamantanaman yang dirawat

## **B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT**

Program PLT ini merupakan bagian dari mata kuliah dengan bobot 3 SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa kependidikan. Materi yang ada meliputi program mengajar teori dan praktik di kelas dengan bimbingan guru masing-masing mata pelajaran. Selain itu juga berupa kegiatan-kegiatan non-mengajar lainnya yang terdapat di lingkungan sekolah.

Observasi lingkungan sekolah bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang aspek-aspek karakteristik komponen pendidikan, iklim, dan norma yang berlaku di sekolah tempat PLT. Aspek yang diobservasi meliputi lingkungan fisik sekolah, perilaku atau keadaan peserta didik, administrasi persekolahan, fasilitas pembelajaran dan pemanfaatannya. Observasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan mahasiswa PLT yang telah diatur oleh pihak sekolah.

Informasi mengenai SMAN 11 Yogyakarta dan unit-unitnya disampaikan secara singkat oleh pihak sekolah pada saat observasi dan juga pada saat penerjunan. Pelaksanaan program Praktik Lapangan Terbimbing dimulai dari tanggal 18 September – 15 November 2017. Kegiatan PLT dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan praktik kependidikan dan persekolahan yang sudah terjadwal.

Rancangan kegiatan PLT adalah suatu bentuk hasil perencanaan yang dibuat dengan berdasarkan waktu dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu mahasiswa melaksanakan PLT. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu maka kegiatan PLT direncanakan sebagai berikut:

## **1. Persiapan di kampus**

### **a. Pengajaran Mikro**

Pengajaran mikro dilaksanakan pada semester sebelumnya/semester 6 untuk memberi bekal awal pelaksanaan PLT. Dalam pengajaran mikro mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 12 sampai 14 orang dengan satu orang dosen pembimbing mikro. Setiap mahasiswa mendapat empat kali kesempatan untuk praktik mengajar di laboratorium sementara mahasiswa lainnya berperan sebagai peserta didik dan dosen melihat, mengarahkan dan memberikan bimbingan untuk tampilan yang lebih baik.

Pada saat praktik mengajar di laboratorium, mahasiswa harus mempersiapkan RPP, materi, media dan metode pembelajaran. Hal tersebut dituangkan dalam skenario pembelajaran dengan kurun waktu 20 menit pertampilan mengajar. Mahasiswa dapat meminta soft file rekaman video selama tampil mengajar, untuk evaluasi diri.

### **b. Observasi Sekolah**

Observasi sekolah dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang kondisi fisik, sosial, dan sistem pembelajaran yang dilaksanakan di SMAN11 Yogyakarta sebagai gambaran untuk proses pembelajaran nanti ketika diterjunkan di lapangan. Aspek yang di observasi meliputi perilaku atau keadaan peserta didik, administrasi sekolah, fasilitas sekolah dan pemanfaatannya.

### **c. Pembekalan PLT**

Pembekalan PLT dilaksanakan per fakultas yang terdapat di Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk Fakultas Ilmu Sosial dilaksanakan di Ruang Ki Hajar yang dibagi menjadi dua shift pembekalan. Pemateri berasal LPPMP yang memberikan bekal-bekal tentang PLT dan pada kesempatan ini mahasiswa dapat

menanyakan berbagai kesulitan dan kendala yang dihadapi mahasiswa dalam PLT.

## **2. Persiapan sebelum PLT**

Sebelum melaksanakan kegiatan PLT, mahasiswa diharuskan membuat administrasi mengajar. Administrasi mengajar tersebut berupa perangkat pembelajaran, yaitu Prota, Prosem, Silabus, RPP, bahan ajar, media dan metode pembelajaran. Disamping itu juga, mahasiswa mencari referensi buku pelajaran terkait mata pelajaran yang diampu.

## **3. Kegiatan PLT**

### **a. Praktik mengajar terbimbing**

Praktik mengajar terbimbing adalah praktik mengajar yang dilaksanakan dengan bimbingan guru pengampu mata pelajaran yang bersangkutan.

### **b. Praktik mengajar mandiri**

Praktik mengajar mandiri adalah praktik mengajar secara mandiri, mahasiswa harus bisa mengelola kelas, mulai dari membuka pelajaran, menyampaikan materi, memberikan evaluasi, dan menyimpulkan materi.

### **c. Umpan Balik Guru Pembimbing**

Kegiatan ini merupakan bentuk pengarahan dari guru pembimbing pada saat sebelum praktik mengajar dan bentuk evaluasi pada saat setelah selesai mengajar.

### **d. Penyusunan Laporan**

Laporan kegiatan PLT disusun setiap hari dalam bentuk catatan harian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program PLT.

### **e. Evaluasi**

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan merencanakan strategi agar lebih baik lagi.

## **BAB II**

### **PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL**

#### **A. Persiapan PLT**

Persiapan bertujuan untuk membekali mahasiswa terkait cara mengajar dan administrasi mengajar agar mahasiswa siap pada saat diterjunkan ke lapangan. Halhal yang dipersiapkan antara lain mengamati kondisi sekolah, kondisi sosial dan fasilitas yang terdapat di sekolah. Disamping itu, kegiatan praktik mengajar mikro juga dilaksanakan di kampus untuk melatih mahasiswa agar lancar dalam melaksanakan pembelajaran. Berikut persiapan-persipan yang dilaksanakan oleh mahasiswa:

##### **1. Pengajaran Mikro**

Pengajaran mikro merupakan pengajaran yang dilaksanakan dengan membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok yang beranggotakan 12 sampai 14 orang. Pengajaran ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran sebelum terjun ke lapangan secara langsung di sekolah. Pelaksanaan pengajaran mikro dilakukan dalam kelompok yang beranggotakan 12 orang yang diampu oleh dosen pembimbing mikro, yaitu Sri Hartini, M.Hum dan Drs.Suyato,M.Pd.

Setiap mahasiswa bereksempatan empat-enam kali tampil dalam praktik mengajar, sementara mahasiswa lainnya berperan sebagai peserta didik. Pada saat mengajar mahasiswa diberikan alokasi waktu selama 20 menit dimana harus menampilkan metode dan media pembelajaran. Dan dosen pembimbing memberikan pengarahan beserta evaluasinya kepada mahasiswa. Pengajaran mikro juga merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh dan wajib lulus bagi mahasiswa kependidikan agar dapat mengikuti program PLT di sekolah-sekolah.

##### **2. Pembekalan**

Pembekalan PLT dilaksanakan per fakultas yang terdapat di Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk Fakultas Ilmu Sosial dilaksanakan di Ruang Ki Hajar yang dibagi menjadi dua shift pembekalan. Pemateri berasal LPPMP, yaitu Bapak Anik Ghufro yang memberikan bekal-bekal tentang PLT dan pada kesempatan ini mahasiswa dapat menanyakan berbagai kesulitan dan kendala yang dihadapi mahasiswa dalam PLT.

##### **3. Observasi**

Sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan PLT, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan pengamatan atau observasi. Observasi tersebut dimaksudkan

agar mahasiswa dapat merancang program PLT sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah. Observasi dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Observasi Lingkungan Sekolah

Observasi lingkungan sekolah bertujuan untuk mengetahui kondisi sekolah secara detail. Hal-hal yang menjadi aspek observasi lingkungan sekolah adalah lingkungan fisik sekolah, sarana prasarana sekolah, dan kegiatan belajar mengajar secara umum.

b. Observasi Pembelajaran di Kelas

Observasi pembelajaran di kelas bertujuan untuk mengetahui secara langsung kondisi pembelajaran di kelas. Berdasarkan observasi yang dilakukan, mahasiswa dapat mengetahui gambaran untuk memberikan metode pembelajaran pada saat diterjunkan nanti. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengetahui materi yang akan diberikan, mempelajari situasi kelas, mengetahui tingkat kompleksitas materi bagi peserta didik, mempelajari kondisi peserta didik dan memiliki rencana konkret untuk bahan mengajar. Adapun hasil observasi adalah sebagai berikut:

1) Perangkat Pembelajaran

- a) Kurikulum untuk kelas X IPA di SMA 11 Yogyakarta menggunakan K13.
- b) RPP yang digunakan dan yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan di kampus.

2) Proses Pembelajaran

a) Membuka Pelajaran

Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa peserta didik kemudian melakukan presensi peserta didik. b) Penyajian Materi

Penyajian materi sesuai dengan silabus dan RPP yang telah dibuat guru.

Guru menyampaikan materi dengan jelas. c) Metode Pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, permainan dan diskusi kelompok.

d) Penggunaan Bahasa

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

e) Penggunaan Waktu

Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 jam pelajaran (2 x 45 menit). Pengalokasian waktu cukup efektif sehingga tidak mengganggu jam pelajaran berikutnya.

f) Cara memotivasi peserta didik

Guru mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari serta sesekali menyemangati peserta didik dengan lisan. Guru juga memberikan poin plus bagi peserta didik yang aktif selama kegiatan pembelajaran.

g) Menutup Pelajaran

Guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan menyampaikan materi untuk tatap muka berikutnya. Guru menutup pembelajaran dengan salam.

3) Perilaku peserta didik

a) Perilaku peserta didik di dalam kelas

Peserta didik merespon pelajaran dengan aktif, namun ada beberapa peserta didik yang tidak memperhatikan pelajaran. b) Perilaku peserta didik di luar kelas

Siwa menerapkan 5 S dalam pergaulan di lingkungan sekolah.

#### **4. Bimbingan DPL Jurusan**

Bimbingan DPL Jurusan dapat dijadikan sarana bagi mahasiswa untuk menyampaikan kendala dan permasalahan selama praktik mengajar di sekolah. DPL melaksanakan kunjungan ke sekolah sebanyak tiga kali di SMAN 11 Yogyakarta. Selain bertemu mahasiswa, DPL juga menemui guru pembimbing untuk menanyakan kemajuan dan evaluasi mahasiswa praktikan.

#### **5. Persiapan Mengajar**

a. Konsultasi dengan guru pembimbing

Konsultasi dengan guru pembimbing dilakukan sebagai bentuk koordinasi antara mahasiswa PLT dan guru pembimbing. Hal-hal yang dibahas berkaitan dengan sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan beserta perangkat pembelajarannya. Koordinasi ini juga berkaitan dengan evaluasi dari guru pembimbing yang kontinyu dan berkelanjutan selama PLT. b. Penguasaan materi

Materi yang disampaikan dalam pembelajaran hendaknya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Oleh karena itu, mahasiswa harus menguasai materi yang akan diajarkan. Salah satu kegiatan untuk memperoleh penguasaan materi pembelajaran adalah dengan membaca LKS peserta didik dan buku teks agar materi yang disampaikan sinkron dengan pegangan peserta didik, yaitu LKS. c. Penyusunan RPP

Penyusunan RPP dilakukan sebelum pertemuan sebelum pembelajaran dilaksanakan. RPP dibuat sebagai rencana pembelajaran yang akan

dilaksanakan. Di dalam RPP terdapat materi, metode serta media pembelajaran yang akan diterapkan.

#### d. Pembuatan media pembelajaran

Media pembelajaran merupakan sarana pembelajaran untuk menyampaikan materi. Media pembelajaran dibuat berdasarkan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran. Media yang telah dibuat berupa Lembar Kerja Peserta didik dan Slide Show menggunakan Power Point.

e. Pembuatan alat evaluasi  
Alat evaluasi merupakan sarana yang digunakan untuk mengukur kemampuan belajar peserta didik. Alat evaluasi dapat berupa latihan soal, penugasan bagi peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, pada setiap akhir bab diadakan evaluasi ulangan harian terkoordinasi.

## **B. Pelaksanaan Program PLT**

Kegiatan PLT dilaksanakan mulai tanggal 18 September – 15 November 2017. Selama melaksanakan program PLT, praktikan melakukan bimbingan dengan guru pembimbing mata pelajaran dan dosen pembimbing lapangan jurusan yang berkaitan dengan program pembelajaran yang direncanakan sebelumnya. Berikut rincian pelaksanaan program PLT di SMAN 11 Yogyakarta:

### **1. Pembuatan Perangkat Pembelajaran**

Persiapan yang dilakukan dalam menyusun perangkat pembelajaran, yaitu berkonsultasi dengan guru pembimbing yang berkaitan materi yang akan disampaikan. Perangkat pembelajaran disusun berdasarkan matriks perencanaan yang dialokasikan sebanyak 15 pertemuan dengan 8 RPP. 15 pertemuan yang direncanakan akan menyampaikan dua bab pada semester ganjil mata pelajaran PPKn untuk kelas X IPA. Sebelum disampaikan pada pembelajaran, RPP beserta perangkat di dalamnya dikonsultasikan dengan guru pembimbing, setiap akan memasuki pertemuan di kelas.

### **2. Pelaksanaan Pembelajaran**

Pelaksanaan Pembelajaran dilakukan mulai tanggal 5 Oktober 2017 – 9 November 2017. Alokasi waktu sebanyak 2 x 45 menit pada setiap hari Kamis. Berikut adalah deskripsi praktik mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa:

#### a. Pertemuan Ke-1

Hari/Tanggal	: Kamis, 5 Oktober 2017
Kelas	: X IPS 1
Waktu	: 07.15- 08.45 WIB
Materi	: Suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia
Metode	: Ceramah dan diskusi

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, dan power point suprastruktur dan infrastruktur politik

Hambatan :Muncul perasaan gugup dan cemas karena ini merupakan pertama kalinya dalam mempraktikan cara mengajar yang sesungguhnya di dalam kelas

Solusi : Konsultasi dengan guru pembimbing dan meminta saran dari teman

b. Pertemuan Ke-2

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Oktober 2017

Kelas : X IPA 1

Waktu : 12.30-14.00 WIB

Materi : Suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia

Metode : Ceramah dan diskusi

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, dan power point Suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia.

Hambatan : Siswa kurang memperhatikan sehingga kelas menjadi ramai

Solusi : Memutar video yang berkaitan dengan materi untuk menarik perhatian siswa

c. Pertemuan Ke-3

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Oktober 2017

Kelas : X IPS 1

Waktu : 07.15-08.45 WIB

Materi : Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Metode : Ceramah, diskusi, dan *Matching Game*

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, power point tentang lembaga-lembaga negara, dan kertas (karton dan lipat) untuk *games*.

Hambatan : materi terkait kewenangan lembaga-lembaga negara terlalu banyak

Solusi : menggunakan bagan yang dilengkapi dengan pasal-pasal kemudian peserta didik belajar menggunakan *Matching Game*.

d. Pertemuan Ke-4

Hari/Tanggal	: Kamis, 12 Oktober 2017
Kelas	: X IPA 1
Waktu	: 12.30-14.00 WIB
Materi	: Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945
Metode	: Ceramah, diskusi, dan <i>Matching Game</i> .
Media	: Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, <i>White Board</i> , spidol, kertas (karton dan lipat), dan power point tentang lembaga-lembaga negara.
Hambatan	: materi terkait kewenangan lembaga-lembaga negara terlalu banyak
Solusi	: menggunakan bagan yang dilengkapi dengan pasal-pasal kemudian peserta didik belajar melalui <i>Matching Game</i> .

e. Pertemuan Ke-5

Hari/Tanggal	: Kamis, 19 Oktober 2017
Kelas	: X IPS 1
Waktu	: 07.15-08.45 WIB
Materi	: <i>Good Governance</i> dan partisipasi politik
Metode	: Ceramah, diskusi, dan video
Media	: Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, <i>White Board</i> , spidol, power point tentang lembaga-lembaga negara, dan video tentang <i>good governance</i> dan partisipasi politik.
Hambatan	: -
Solusi	: -

f. Pertemuan Ke-6

Hari/Tanggal	: Kamis, 19 Oktober 2017
Kelas	: X IPA 1
Waktu	: 12.30-14.00 WIB
Materi	: <i>Good Governance</i> dan partisipasi politik
Metode	: Ceramah dan diskusi
Media	: Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, <i>White Board</i> , spidol, power point tentang lembaga-lembaga negara, dan video tentang <i>good governance</i> dan partisipasi politik.

- Hambatan : -  
Solusi : -
- g. Pertemuan Ke-7  
 Hari/Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2017  
 Kelas : X IPS 1  
 Waktu : 07.15-08.45 WIB  
 Materi : Penilaian dan evaluasi (UH BAB 3)  
 Metode : Ceramah dan diskusi  
 Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, dan power point tentang lembaga-lembaga negara.  
 Hambatan : banyak siswa yang minta di *review* materi BAB 3  
 Solusi : *Me-review* kembali materi BAB 3, sebelum ulangan dilaksanakan.
- h. Pertemuan Ke-8  
 Hari/Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2017  
 Kelas : X IPA 1  
 Waktu : 12.30-14.00 WIB  
 Materi : Penilaian dan evaluasi (UH BAB 3)  
 Metode : Ceramah dan diskusi  
 Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, dan power point tentang lembaga-lembaga negara.  
 Hambatan : -  
 Solusi : -
- i. Pertemuan Ke-9  
 Hari/Tanggal : Kamis, 2 November 2017  
 Kelas : X IPS 1  
 Waktu : 07.15- 08.45 WIB  
 Materi : Otonomi daerah dan desentralisasi  
 Metode : Ceramah dan tugas kelompok menggunakan model pembelajaran *jigsaw*.  
 Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, kertas manila, dan power point tentang otonomi daerah dan desentralisasi  
 Hambatan : -  
 Solusi : -
- j. Pertemuan ke-10  
 Hari/Tanggal : Kamis, 2 November 2017

Kelas : X IPA 1  
Waktu : 12.30-14.00 WIB  
Materi : Otonomi daerah dan desentralisasi  
Metode : Ceramah dan tugas kelompok menggunakan model pembelajaran *jigsaw*.  
Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, kertas manila, dan power point tentang otonomi daerah dan desentralisasi  
Hambatan : -  
Solusi : -

k. Pertemuan ke-11

Hari/Tanggal : Kamis, 9 November 2017  
Kelas : X IPS 1  
Waktu : 07.15-08.45 WIB  
Materi : kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah  
Metode : Ceramah, diskusi, games lempar dadu *educative*  
Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, balok dadu, dan power point tentang kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah.  
Hambatan : -  
Solusi : -

l. Pertemuan ke-12

Hari/Tanggal : Kamis, 9 November 2017  
Kelas : X IPA 1  
Waktu : 12.30-14.00 WIB  
Materi : kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah  
Metode : Ceramah, diskusi, games lempar dadu *educativ*.  
Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, balok dadu, dan power point tentang kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah.  
Hambatan : -  
Solusi : -

Adapun praktik mengajar yang dilaksanakan secara insidental dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Praktik Pembelajaran Insidental

No	Hari, Tanggal	Narasi Proses Pembelajaran	Kelas
1.	Senin, 9 Oktober 2017	Menyampaikan materi tentang Kode etik jurnalistik	XII IPA 2, XII IPA 5
2.	Kamis, 12 Oktober 2017	Presentasi kelompok materi tentang kebebasan pers	XII IPA 4
3.	Kamis, 19 Oktober 2017	Presentasi kelompok materi tentang kebebasan pers	XII IPA 4
4.	Jumat, 20 Oktober 2017	Siswa presentasi mengenai kode etik jurnalistik, guru mendampingi dan menjelaskan setelah selesai presentasi	XII IPA 3
5.	Sabtu, 21 Oktober 2017	Menyampaikan materi tentang dampak kode etik jurnalistik	XII IPA 6, XII IPS 1
6.	Selasa, 31 Oktober 2017	Menyampaikan materi tentang penyalahgunaan dan dampak pers	XII IPS 3, XII IPA 1
7.	Sabtu, 11 November 2017	Mengerjakan ulangan harian 2 lembar kerja siswa (LKS)	XII IPA 6, XII IPS 1

### 3. Umpan Balik Pembimbing

Guru pembimbing senantiasa memberikan masukan, kritik dan saran agar penampilan mahasiswa yang sedang praktik dapat semakin baik. Misalnya, mengarahkan mahasiswa untuk menggunakan media Power Point untuk mempermudah penyampaian materi. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk tidak terburu-buru dalam menyampaikan materi. Yang diutamakan adalah bagaimana membuat peserta didik paham betul terkait materi yang disampaikan.

### 4. Kegiatan Non Pembelajaran

Kegiatan non pembelajaran yang diikuti mahasiswa selama PLT adalah sebagai berikut:

#### a. Senyum, Salam, Sapa Pagi (3S)

Senyum, salam, sapa pagi merupakan bentuk kegiatan di pagi hari untuk menyambut peserta didik-siswi yang datang ke sekolah dengan salaman.

#### b. Piket Harian KBM

Piket harian merupakan rutinitas yang terjadwal untuk menjalankan pelayanan administrasi harian, berupa keliling untuk presensi guru mengajar ke seluruh kelas, melayani tamu dari luar, dan memberikan izin bagi peserta didik yang meninggalkan pelajaran.

#### c. Upacara

Upacara dilaksanakan setiap minggu pertama dan ketiga pada setiap bulannya. dan upacara yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari kesaktian pancasila, hari sumpah pemuda, dan hari pahlawan.

#### d. Afeksi setiap Jum'at

Kegiatan afeksi pada hari Jum'at dilaksanakan dengan tadarus bagi yang beragam Islam dan pembacaan doa bagi yang non-Islam. Kegiatan dimulai pada pukul 07.00 pagi sampai jam 07.15.

#### e. Piket perpustakaan

Kegiatan piket perpustakaan dilaksanakan oleh mahasiswa PLT UNY secara terjadwal untuk menjaga/ ikut serta dalam membantu jaga perpustakaan.

### **5. Penyusunan Laporan**

Tindak lanjut dari program PLT adalah penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan PLT yang telah dilaksanakan. Laporan berisi rincian kegiatan yang dilaksanakan selama PLT. Laporan ini disusun secara individu dengan persetujuan guru pembimbing, koordinator PLT sekolah, kepala sekolah dan dosen pembimbing lapangan jurusan.

### **6. Penarikan**

Penarikan mahasiswa PLT dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017 oleh pihak UNY yang diwakilkan kepada dosen pembimbing lapangan. Penarikan dihadiri oleh kepala sekolah, koordinator PLT sekolah, guru pembimbing mata pelajaran dan mahasiswa PLT. Penarikan ditandai dengan penyerahan kenang-kenangan sebagai tanda terimakasih kepada sekolah.

### **C. Analisis Hasil Pelaksanaan Pembelajaran dan Refleksi**

Pelaksanaan program PLT dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Perencanaan program dapat terlaksana dengan cukup baik. Praktikan dapat melaksanakan 15 (lima belas) tatap muka dengan tujuh RPP yang dilaksanakan dikelas X IPA 2 sebanyak 8 kali tatap muka dan di kelas X IPA 3 sebanyak 7 kali tatap muka. Selain itu ada 11 (sebelas) pembelajaran yang bersifat insidental. Partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PPKn juga tergolong aktif yang ditunjukkan dengan keaktifan dalam

bertanya, diskusi kelompok dan dalam mengerjakan tugas. Kemudian untuk hasil belajar peserta didik juga tergolong tuntas secara klasiknya. Namun secara individualnya terdapat beberapa peserta didik yang harus mengikuti program remedi.

Berdasarkan kesan pesan dan kritik saran yang disampaikan peserta didik kepada mahasiswa praktikan, pembelajaran yang diberikan mahasiswa praktikan sudah baik, asyik, dan menyenangkan karena dapat memberikan metode pembelajaran yang bervariasi dan tidak monoton. Program yang dilaksanakan tentunya masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, praktikan berupaya untuk melakukan analisis hasil dan refleksi sebagai bahan untuk perbaikan dimasa mendatang. Analisis yang dilaksanakan antara lain:

### **1. Analisis Hasil Pelaksanaan**

Program yang telah disusun dalam pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Partisipasi dari peserta didik pun aktif dan responsif. Begitupun juga dengan dosen pembimbing lapangan serta guru pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan dan evaluasi yang membangun untuk dapat mengajar dengan optimal.

#### **a. Faktor Pendukung**

##### **1) Dosen Pembimbing Lapangan**

Dosen pembimbing memberikan bimbingan, pengarahan beserta evaluasi kepada mahasiswa demi terlaksananya program PLT.

##### **2) Guru Pembimbing**

Guru pembimbing memberikan kontribusi terhadap keberhasilan praktikan dalam memberikan pembelajaran di kelas. Guru pembimbing senantiasa memberikan arahan dan evaluasi terhadap praktikan dalam mengajar.

##### **3) Peserta didik**

Peserta didik-siswi SMAN 11 Yogyakarta merupakan aspek penting dalam melaksanakan program PLT. Kerjasama yang baik antara peserta didik dengan praktikan dapat mendukung suksesnya pembelajaran.

##### **4) Sekolah**

Sekolah merupakan pihak yang paling penting dalam melaksanakan program PLT. Fasilitas yang terdapat di sekolah dapat digunakan peserta didik untuk berkreasi terhadap materi yang disampaikan

#### **b. Faktor penghambat**

Pelaksanaan program PLT tidak dipungkiri terdapat berbagai macam hambatan yang mengganggu jalannya proses pembelajaran. Dalam menghadapinya, praktikan senantiasa mencari solusi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada.

Berikut hambatan-hambatan yang dialami praktikan dalam proses pembelajaran :

- 1) Kesulitan menghafal nama peserta didik
  - a) Deskripsi : praktikan mengalami kesulitan dalam menghafal nama peserta didik yang cukup banyak dalam waktu dekat
  - b) Solusi : praktikan selalu melakukan presensi setiap kelas akan dimulai
- 2) Peserta didik yang ramai sendiri
  - a) Deskripsi : pada jam-jam tertentu, misalnya jam terakhir peserta didik sudah tidak antusias mengikuti pembelajaran dan ramai sendiri.
  - b) Solusi : praktikan memberika aktivitas berupa penugasan untuk peserta didik agar fokus ke pembelajaran.
- 3) Kabel Proyektor Rusak
  - a) Deskripsi : pada kelas X IPA 3 beberapa kali proyektor tidak dapat digunakan dengan baik
  - b) Solusi : menyampaikan materi dengan ceramah dengan memanfaatkan papan tulis, kemudian memberikan penugasan kepada peserta didik untuk membaca buku paket dan literasi lain yang berkaitan dengan materi Otonomi daerah dan desentralisasi.

## **2. Refleksi**

Kegiatan PLT mengajarkan kepada mahasiswa bahwa menjadi seorang guru tidak hanya bisa menguasai materi tetapi juga harus bisa menguasai dan mengkondisikan kelas dengan baik. Seorang guru juga harus cepat, tanggap, dan cekatan dalam menangani kelas. Guru harus memahami kondisi peserta didik yang beragam dan tidak bisa disamakan. Perlakuan-perlakuan seorang guru juga harus adil dan objektif. Selain itu, yang paling utama adalah seorang guru harus mampu menanamkan nilai-nilai moral untuk bekal generasi muda Indonesia sebagai penerus bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara.

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Pelaksanaan kegiatan PLT Universitas Negeri Yogyakarta 2017 dilaksanakan di SMAN 11 Yogyakarta dimulai sejak tanggal 18 September 2017 – 15 November 2017 yang berlokasi di SMAN 11 Yogyakarta. Kegiatan PLT yang dilaksanakan oleh praktikan meliputi observasi lingkungan sekolah, observasi suasana pembelajaran dan pelaksanaan praktik mengajar di kelas, menyusun administrasi dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah.

Observasi pembelajaran bertujuan untuk mengamati guru pembimbing dan peserta didik di dalam kelas terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Observasi kondisi sekolah bertujuan untuk mengamati sarana dan prasarana sekolah sebagai faktor penunjang kegiatan pembelajaran. Praktik mengajar yang dilakukan praktikan sebanyak 12 x tatap muka selama 8 minggu. Selama PLT, Praktikan mengajar kelas X IPA 1 dan X IPS 1. Penyusunan administrasi yang dilakukan oleh Praktikan berupa penghitungan hari/jam efektif, program tahunan, program semester, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan analisis hasil belajar siswa. Selama PLT kegiatan yang diikuti oleh Praktikan antara lain, Upacara dalam memperingati hari kesaktian pancasila, hari sumpah pemuda, dan hari pahlawan, Piket Senyum, Salam, Sapa (3S), Piket Perpustakaan dan Piket KBM.

Dalam pelaksanaannya kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, namun terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh praktikan, seperti kesulitan menghafal nama peserta didik, peserta didik yang ramai sendiri. Solusi dalam mengatasi kesulitan menghafal nama peserta didik, praktikan selalu melakukan presensi sebelum pembelajaran dimulai. Ketika peserta didik ramai sendiri, praktikan memberikan aktivitas berupa penugasan kepada peserta didik agar fokus ke pembelajaran.

#### B. Saran

Berdasarkan pengalaman selama kegiatan PLT, maka praktikan membrikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Sekolah
  - a. Meningkatkan kontrol peserta didik secara keseluruhan, khususnya terkait dengan kedisiplinan dan ketertiban peserta didik.
  - b. Lebih menggali potensi peserta didik, baik *hard skill* maupun *soft skill*

- c. Perlunya menertibkan administrasi terkhusus administrasi piket harian
2. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta
- a. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan baik dengan sekolah tempat mahasiswa Praktik Lapangan Terbimbing (PLT)
  - b. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak Universitas dengan Sekolah mengenai berbagai mekanisme yang berhubungan dengan kegiatan PLT, sehingga dapat saling memahami kepentingan masing-masing antara kedua belah pihak.
3. Bagi Mahasiswa
- a. Membina hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dengan mahasiswa
  - b. Mempersiapkan perencanaan pembelajaran dengan matang yang sesuai dengan kurikulum 2013
  - c. Lebih memperhatikan kondisi semangat peserta didik dalam pembelajaran di kelas.

## DAFTAR PUSTAKA

Kepegawaian SMA N 11 Yogyakarta.

TIM PLT/Magang III UNY. 2017. *Pedoman Pengajaran Mikro/Magang 11*.

Yogyakarta : UNY.

TIM Pembekalan PLT. 2017. *Materi Pembekalan PLT/Magang III Tahun 2017*.

Yogyakarta : UNY.

# LAMPIRAN



MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2017

NOMOR LOKASI : NAMA : RAHAYU SETIYANINGSIH  
NAMA LOKASI : SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA NIM : 14401241003  
ALAMAT LOKASI : JL. AM. SANGAJI NO. 50, YOGYAKARTA PRODI : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

No	Program/Kegiatan PPL	Jumlah Jam per Minggu											Jml Jam	
		081	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	Pembuatan Program PLT													
	a. observasi	7												7
	b. Menyusun matrik program PLT	8	2											10
2	Administrasi Pembelajaran/ Guru													
	a. Buku kerja/ Buku loges		2											2
	b. salinan prota, pemuas		2											2
3	Pembelajaran Kokurikuler (Kegiatan Mengajar Terbimbing)													
	a. persiapan													
	1) Konsultasi		3		2	1	2	1	2					11
	2) Mengumpulkan Materi		1		1	2	2	2	1					9
	3) Membuat RPP				1	3	6		6					24
	4) Menyiapkan/ membuat media		2	4	6	6	6	2	2	4				26
	5) Menyusun materi/ Lab sheet			1	4			2	2	2				11
	b. Mengajar Mandiri dan Terbimbing													
	1) Praktik mengajar di kelas				4	4	4		4	4				20
	2) Penilaian dan evaluasi							4						4
									2					2
4	Kegiatan Ekstrakurikuler (Kegiatan non mengajar)													
	a. Pendampingan Sabtu Berah				1									1
	b. Pendampingan belajar siswa							4	4	4				12
5	Kegiatan Sekolah													
	a. Pkkt 3S		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
	b. Pkkt KBM		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		63
	c. Pendampingan Afeksi		1	1	1	1	1	1	1	1	1			8
	d. Penyempulan Buku Perpus		3											3
	e. Pergerakan lembar jawab PTS		3											3
	f. Persecekan Ruang Kelas untuk PTS		2											2
	g. Pembagian Administrasi PTS		3											3
	h. Pengawasan PTS				7									7
	i. Upacara			3				3		3				9
	j. Inventaris buku Perpustakaan		2	5										
	k. pergecapan buku perpustakaan		4	7										
	l. Cap kalender akademik		2	2										4
6	Pembuatan Laporan PLT						5		20					25
	<b>Jumlah Jam</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		<b>296</b>

Dosen Pembimbing Lapangan

Sri Hartini, M.Hum  
NIP. 195801161985032001

Yogyakarta, 15 November 2017

Yang Membuat Kelompok/Individu\*

Rahayu Setyaningsih  
NIM.14401241003





# KALENDER PENDIDIKAN SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018



	JULI 2017	AGUSTUS 2017	SEPTEMBER 2017	OKTOBER 2017	NOVEMBER 2017
AHAD	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26
SENIN	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27
SELASA	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28
RABU	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29
KAMIS	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30
JUMAT	7 14 21 28	4 11 18 25	8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24
SABTU	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25
	DESEMBER 2017	JANUARI 2018	FEBRUARI 2018	MARET 2018	APRIL 2018
AHAD	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	4 11 18 25	1 8 15 22 29
SENIN	4 11 18 25	8 15 22 29	5 12 19 26	5 12 19 26	2 9 16 23 30
SELASA	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27	3 10 17 24
RABU	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	7 14 21 28	4 11 18 25
KAMIS	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22 29	5 12 19 26
JUMAT	8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23 30	6 13 20 27
SABTU	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24	3 10 17 24 31	7 14 21 28
	MEI 2018	JUNI 2018	JULI 2018		
AHAD	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29		
SENIN	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30		
SELASA	8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31		
RABU	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25		
KAMIS	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26		
JUMAT	4 11 18 25	8 15 22 29	6 13 20 27		
SABTU	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28		

PTS	Penerimaan LPPP	Hari Pendidikan Nasional	Ujian Nasional
Purna Siswa Kelas XII	HUT Sekolah	Hari Kebangkitan Nasional	Ujian Susulan
Hari Libur Nasional	Libur Semester	Karya Wisata Kelas XI	Ujian Sekolah
Hari Guru Nasional	Libur Idul Fitri	PAS/PAT	Outbound/Studi Lapangan Kelas X

Yogyakarta, 3 Juli 2017  
 Kepala Sekolah  
  
 Rudy Rumanto, S.Pd.  
 NIP.19.650312.199412.1.003

**PERHITUNGAN MINGGU DAN JUMLAH JAM EFEKTIF  
SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA  
TAHUN AJARAN 2017/2018**

Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas	: X (Sepuluh)
Semester	: 1 (Gasal)
Tahun Ajaran	: 2017-2018

No	Bulan	Jumlah Minggu Dalam Semester	Jumlah Minggu Tidak Efektif	Jumlah Minggu Efektif
1	Juli	4	2	2
2	Agustus	5	0	5
3	September	4	0	4
4	Oktober	4	0	4
5	November	5	0	5
6	Desember	4	2	2
	Jumlah	26	4	22

Rincian : Jumlah Pembelajaran yang efektif

= 22 minggu x 2 jam pelajaran = 44 jam pembelajaran

Dipergunakan untuk :

**KOMPETENSI INTI**

**1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) Untuk kompetensi inti sikap spiritual**

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

**2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) Untuk kompetensi inti sikap sosial**

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

**3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) Untuk kompetensi inti pengetahuan**

No	Kompetensi Dasar	Materi	Jml Jam	Ket.
1	<p>Siswa mampu:</p> <p>1.1.Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>2.1Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahanNegara</p> <p>3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara</p> <p>3.1.Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara</p>	<p>Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara .</p> <p>a. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia.</p> <p>b. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.</p> <p>c. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan.</p>	<p>4</p> <p>2</p> <p>2</p>	
2	<p>Siswa mampu :</p> <p>1.2.menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil.</p> <p>2.2.mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-sundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang</p>	<p>Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>b. Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia.</p>	<p>2</p> <p>2</p>	

	<p>mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan .</p> <p>3.2.menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>3.2.menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.</p>	<p>c. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia.</p>	2	
		<p>d. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia.</p>	2	
3	<p>Siswa mampu :</p> <p>1.3.menghargai nilai-nilai terkait fungsi lembaga lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil.</p> <p>2.3.menghargai perilaku peduli terhadap nilai-nilai terkait fungsi lembaga lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.3.menganalisis kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.3 menyajikan hasil kesimpulan tentang kewenangan lembaga lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>Kewenangan lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945.</p>		
		<p>a. Suprastruktur dan Infrastruktur politik Indonesia.</p>	2	
		<p>b. Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	4	
		<p>c. Tata kelola pemerintahan yang baik.</p>	2	
		<p>d. Partisipasi warga negara dalam sistem politik RI .</p>	2	

4	<p>Siswa mampu :</p> <p>1.4.Menghayati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil .</p> <p>2.4.Menghargai nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.4.Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .</p> <p>4.4.Menyaji hasil kesimpulan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	Hubungan pemerintahan pusat dan daerah.		
		a. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.	2	
		b. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan Daerah.	2	
		c. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.	2	
5	<p>Siswa mampu:</p> <p>1.5.Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>2.5.Menghargai nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>3.5.Menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>	Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional.		
		a. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia.	2	
		b. Konsep Integrasi Nasional.	2	
		c. Faktor-faktor Pembentuk Integrasi Nasional.	2	
		d. Tantangan dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	2	

	4.5.Menyaji faktor-faktor pembentuk integrasinasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	e. Peran serta warga negara dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2	
6	Siswa mampu: 1.6.Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2.6.Mengamalkan nilai-nilai ketahanan terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3.6.Memprediksi indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.6.Menyaji hasil prediksi tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanandalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	Indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. a. Ancaman terhadap integritas nasional b. Ancaman di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan c. Peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integritas nasional.	2 2 4 2	

<p>3.7 Menganalisis arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>4.7 Menyaji hasil keputusan bersama terkait arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>Wawasan Nusantara</p> <p>d. Peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan nusantara</p>	<p>2</p>
		<p>44</p>

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingih Tahapannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, keteguhan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) Untuk kompetensi inti keterampilan  
 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengesah

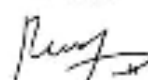
Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 1 006

Mahasiswa PLT



Rahayu Seliyaningih

NIM.14401241003



Universitas Negeri Yogyakarta

## KARTU BIMBINGAN PLT DI LOKASI

FO

untuk mahasiswa

NOMOR LOKASI  
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA  
NAMA DPL

SMA N 11 YOGYAKARTA  
Jl. A.M. Saugah No 50 Condongkidulreban  
Sri Hartini, M. Hum

No	Hari/Tgl. Kehadiran	Jml. Mhs.	Materi Bimbingan	Keterangan	Tanda tar
1	Jumat 6/10/2017	2	Kewenangan Lembaga - Lembaga Negara		
2	Jumat 9/10/2017	2	Otonomi daerah dan Pengkondisian kelas		
3	Jumat 20/10/2017	2	Evaluasi / Penilaian Siswa		
4	Jumat 10/10/2017	2	Konsultasi Laporan		

\*) Coret yang tidak perlu

Mengetahui

Kepala PP PPL&PKL

Kepala Sekolah / Pimpinan Lembaga

Ketua Kelompok PLT





**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**CATATAN HARIAN PLT**

**TAHUN:2017**

Nama Mahasiswa : Rahayu Setyaningsih  
No. Mahasiswa : 14401241003  
Fak/Jur/Pr.Studi : Fis/Pend. Kewarganegaraan

Nama Sekolah : SMA Negeri 11 Yogyakarta  
Alamat Sekolah : Alamat : Jl A.M Sangaji No  
50 Cokrodingratan, Jetis,  
Sleman

No.	Hari, tanggal	Pukul (WIB)	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
1.	Kamis (02-03-2017)	08.00-11.00	Observasi	<b><u>Hasil Kualitatif:</u></b> Kegiatan observasi yang dilakukan terdiri dari : mengamati kelengkapan sarana prasarana sekolah (perpustakaan, kelengkapan ruang belajar, tempat ibadah, UKS, lab), kondisi lingkungan sekolah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa (seperti ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan) sesuai dengan lembar observasi yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara PLT. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa PLT tanpa didampingi oleh pihak sekolah.	

				<p><b><u>Hasil Kuantitatif:</u></b> Observasi dihadiri oleh seluruh anggota PLT SMAN 11 Yogyakarta.</p>	
2.	Jum'at/03-09-2017	09.00-12.00	Observasi	<p><b><u>Hasil Kualitatif:</u></b> Kegiatan observasi yang kedua ini merupakan observasi kelas yang dilakukan dengan tujuan untuk mengamati kondisi kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Kegiatan observasi terdiri dari: mengamati model pembelajaran yang digunakan oleh guru, media pembelajaran, cara guru berinteraksi dengan siswa, bentuk penugasan yang diberikan guru dan lain-lain.</p> <p><b><u>Hasil Kuantitatif:</u></b> Observasi dihadiri oleh anggota PLT SMAN 11 Yogyakarta yang didampingi oleh guru pamong masing-masing prodi.</p>	
3.	Kamis 14-09-2017	09.00-12.00	Penyusunan Matriks Program PLT	<p><b><u>Hasil Kualitatif:</u></b> Rapat dilaksanakan di <i>Foodcourt</i> FMIPA UNY. Rapat tersebut membahas tentang program-program yang akan dilaksanakan pada saat PLT serta penyusunan matriks kelompok dan kerangka matriks individu. Selain menyusun matriks, rapat ini juga membahas perihal seragam yang akan digunakan selama pelaksanaan PLT.</p>	

				<p><b><u>Hasil Kuantitatif:</u></b> Dihadiri oleh seluruh anggota PLT SMAN 11 Yogyakarta yang terdiri dari oleh 19 mahasiswa dari beberapa prodi yang berbeda.</p>	
4.	Jum'at 15-09-2017	08.00-11.00	Penyusunan Matriks Program PLT	<p><b><u>Hasil Kualitatif:</u></b> Penyusunan matriks hari kedua ini dilakukan untuk mematangkan matriks yang telah disusun sebelumnya.</p> <p><b><u>Hasil Kuantitatif:</u></b> Dihadiri oleh seluruh anggota PLT SMAN 11 Yogyakarta yang terdiri dari oleh 19 mahasiswa dari beberapa prodi yang berbeda.</p>	
5.	Senin/18- 9- 2017	10.00 – 11.30	Penyerahan PLT	<p><b><u>Hasil Kualitatif :</u></b> Mahasiswa PLT dari UNY diterima dengan resmi oleh pihak sekolah SMA N 11 Yogyakarta. Kegiatan penyerahan mahasiswa PLT dilakukan oleh DPL pamong PLT yang dalam hal ini dilakukan oleh ibu Indah yang merupakan dosen fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan penyerahan mahasiswa PLT terdiri dari sambutan oleh kepala sekolah SMA N 11 Yogyakarta, kemudian penyerahan secara resmi mahasiswa PLT oleh DPL pamong kepada pihak sekolah dan ditutup dengan diskusi santai mengenai peraturan-</p>	

		11.00 – 14.00	Konsultasi	<p>perturan yang harus ditaati oleh mahasiswa PLT selama melakukan praktek di SMA N 11 Yogyakarta yang disampaikan oleh perwakilan dari waka kurikulum SMA N 11 Yogyakarta.</p> <p><b><u>Hasil Kuantitatif :</u></b> Dihadiri oleh 19 mahasiswa PLT, 1 DPL pamong dari UNY yang dalam hal ini dilakukan oleh ibu Indah, 3 guru perwakilan dari waka kurikulum SMA N 11 dan kepala sekolah SMA N 11 Yogyakarta.</p> <p><b><u>Hasil Kualitatif :</u></b> Konsultasi mengenai peraturan-peraturan sekolah seperti jadwal piket dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan selama piket serta pembagian jadwal piket KBM, piket 3s dan jadwal mengajar yang dibagikan oleh pihak sekolah. Selain konsultasi, mahasiswa PLT juga melakukan koordinasi mengenai pembagian jadwal piket KBM dan piket 3s yang dilakukan bersama dengan mahasiswa PLT dari universitas Sanata Dharma dan UST.</p> <p><b><u>Hasil Kuantitatif :</u></b> Dihadiri oleh staff bagian Kurikulum yang memberi tahu</p>	
--	--	---------------	------------	---	--

				kegiatan-kegiatan serta peraturan yang ada di SMA Negeri 11 Yogyakarta dan harus ditaati oleh mahasiswa PLT.	
6.	Selasa/19-9-2017	07.00 – 14.00	Piket KBM	<p><b><u>Hasil Kualitatif :</u></b> Melaksanakan piket KBM bersama dengan mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma dan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.</p> <p><b><u>Hasil Kuantitatif :</u></b> Piket diikuti oleh 9 orang mahasiswa yang terdiri dari 3 mahasiswa UNY, 3 mahasiswa Sanata Dharma dan 3 dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Kegiatan piket terdiri dari pengecekan setiap kelas ketika memulai pelajaran, pelayanan terhadap siswa yang terlambat dan mengurus surat izin bagi siswa yang akan keluar kelas.</p>	
7.	Rabu/20-09-2017	08.00-11.00	Penyampulan Buku dan Pemberian kode buku	<p><b><u>Hasil Kualitatif :</u></b> Buku-buku yang disampul merupakan buku koleksi terbaru perpustakaan Ki Hadjar Dewantara.</p> <p><b><u>Hasil Kuantitatif :</u></b> Total buku yang disampul kurang lebih 150 buah yang terdiri dari buku pelajaran seni budaya, penjaskes, agama, bahasa</p>	

				inggris dan lain-lain.	
		11.00-14.00	Pengecapan Buku Perpustakaan	<p><b><u>Hasil Kualitatif</u></b> :</p> <p>Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membantu pengadministrasian perpustakaan. Pengecapan buku dilakukan agar koleksi buku yang ada terdata dengan jelas.</p> <p><b><u>Hasil Kuantitatif</u></b> :</p> <p>Kegiatan pengecapan ini dilakukan oleh sekitar 12 mahasiswa yang dilakukan diruang perpustakaan.</p>	
8.	Jum'at/22-09-2017	07.15-08.15	Afeksi	<p><b><u>Hasil Kualitatif</u></b> :</p> <p>Afeksi adalah kegiatan mendalami agama masing-masing. Untuk agama islam afeksi dilakukan dengan cara mengaji Al-Quran bersama di kelas-kelas. Mahasiswa PLT mendampingi selama kegiatan ini berlangsung. Setelah itu menunggu untuk pengumpulan infaq dan ttd siswa.</p> <p><b><u>Hasil Kuantitatif</u></b> :</p> <p>Mahasiswa PLT memandu kelas XII IPA 4. Siswa yang hadir sejumlah 31 anak, infaq yang terkumpul adalah Rp.74.500,-</p>	
		08.30 – 09.30	Pengecapan buku	<b><u>Hasil Kualitatif</u></b> :	

			perpustakaan	<p>Pengecapan ini dilakukan untuk buku-buku koleksi baru perpustakaan. Kegiatan pengecapan ini merupakan bagian dari kegiatan pengadministrasian perpustakaan. Pengecapan ini dilakukan di perpustakaan. Kegiatan pengecapan buku ini adalah bagian dari kegiatan inventaris buku. Buku yang di cap adalah buku paket pelajaran. Setiap buku di cap bagian belakang, depan dan halaman 25.</p> <p><b><u>Hasil Kuantitatif :</u></b> Pengecapan buku perpustakaan ini dilakukan oleh 8 mahasiswa UNY dan UST. Total buku yang di cap adalah sebanyak 3 dus buku. Setiap dus berisi 75 buku.</p>	
		09.30-10.30	Pembagian Administrasi PTS (Menempelkan lembar ruangan pada Map)	<p><b><u>Hasil Kualitatif :</u></b> Kegiatan ini terdiri dari penyusunan daftar nama siswa yang akan mengikuti ujian tengah semester. Daftar nama siswa tersebut kemudian ditempelkan didepan ruang ujian.</p> <p><b><u>Hasil Kuantitatif :</u></b> Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa PLT sebanyak 15 orang.</p>	
9.	Sabtu/23-09-2017	6.30-7.30	Piket 3s	<p><b><u>Hasil Kualitatif :</u></b> Mahasiswa PPL bersama dengan guru dan karyawan bersalaman dengan para murid</p>	

				yang datang. <b><u>Hasil Kuantitatif :</u></b> Piket 3s dilakukan oleh 9 mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma, Universitas Negeri Yogyakarta dan UST.	
		08.00-12.00	Pengepakan lembar jawab PTS	<b><u>Hasil Kualitatif :</u></b> Menyusun dan membagi lembar jawaban sesuai dengan jumlah siswa yang akan mengikuti ujian. Jumlah lembar jawaban disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada dalam 1 ruangan.  <b><u>Hasil Kuantitatif :</u></b> 1 ruangan ujian terdiri dari sekitar 30 siswa. Pengepakan lembar jawaban PTS ini dikerjakan oleh 16 mahasiswa PLT.	
		12.00-14.00	Pengecekan Ruang kelas untuk PTS	<b><u>Hasil Kualitatif :</u></b> Mengecek ruang kelas yang akan digunakan untuk tempat ujian. Kelengkapan yang dicek terdiri dari : kelengkapan kursi, kebersihan dan nomor ujian disetiap meja.  <b><u>Hasil Kuantitatif :</u></b> Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa PLT UNY.	
10.	Senin/25-09-2017	07.00-10.00	Pengecapan buku perputakaan	<b><u>Hasil Kualitatif :</u></b> Pengecapan ini dilakukan untuk buku-buku koleksi baru perpustakaan. Kegiatan pengecapan ini merupakan bagian dari	

				kegiatan pengadministrasian perpustakaan.  <b><u>Hasil Kuantitatif :</u></b> Kegiatan ini dilakukan oleh 10 mahasiswa PLT yang berasal dari UNY dan UST.	
		10.00-14.00	Silabus, prota, prosem	<b><u>Hasil Kualitatif :</u></b> Melanjutkan pembuatan program semester dan program tahunan.  <b><u>Hasil Kuantitatif :</u></b> Pembuatan silabus, prota dan prosem dikerjakan oleh 2 mahasiswa PLT PPKn atau dikerjakan secara tim.	
11.	Selasa/26-09-2017	07.00-15.00	Piket KBM	<b><u>Kualitatif:</u></b> Piket KBM dilaksanakan mulai dari pukul 7.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kegiatan piket KBM terdiri dari: pencatatan siswa yang terlambat, pemberian surat bagi siswa yang masuk dan keluar kelas serta pengecekan kelas setiap akan pergantian jam pelajaran.  <b><u>Kuantitatif:</u></b> Piket KBM dilaksanakan oleh 6 mahasiswa dari UNY, UST dan Sanata Dharma serta 2 guru SMAN 11 Yogyakarta.	

12.	Rabu/27-09-2017	07.00-09.00	silabus, prota, prosem	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Merevisi prota prosem dan silabus yang telah dibuat.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Proses revisi oleh 2 mahasiswa PLT PPKn atau dikerjakan secara tim.</p>	
13.	Kamis/28-09-2017	07.00-10.00	silabus, prota, prosem	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Melanjutkan revisi silabus, prota dan prosem.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Revisi dikerjakan oleh 2 mahasiswa PLT geografi atau dikerjakan secara tim.</p>	
		10.00-12.00	Pembuatan media pembelajaran	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Membuat media pembelajaran materi potensi, persebaran dan pengelolaan sumberdaya kehutanan. Media yang dibuat adalah power point atau PPT.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Pembuatan media dilakukan selama 2 jam dan dikerjakan secara individu atau perorangan.</p>	

14.	Jum'at/29-09-2017	07.00-08.00	Afeksi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Kegiatan afeksi dilaksanakan setiap hari jumat. Kegiatan ini merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan serentak di sekolah. Tempat ibadah untuk agama islam diruang kelas masing-masing, agama katolik di perpustakaan, agama kristen di ruang garuda dan agama hindu budha di ruang BK. Kegiatan afeksi untuk agama islam dilakukan dengan membaca ayat suci al-quran secara bersama-sama yang dipandu oeh seorang murid dengan menggunakan speaker. Selain membaca al-quran kegiatan afeksi ini juga diisi dengan kegiatan infaq bersama.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Pelaksanaan afeksi didampingi oleh 1 orang guru atau mahasiwa dalam satu kelasnya.</p>	
15.	Sabtu, 30-09-2017	06.30-07.30	Piket 3s	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Piket 3s dilaksanakan setiap hari (senin-sabtu) mulai dari pukul 06.30-7.30 WIB. 3 merupakan singkatan dari senyum, sapa, salam. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk mempererat hubungan antara siswa dengan guru. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat terjalin hubungan yang baik antara siswa dan guru. Mahasiswa PPL beserta guru dan</p>	

				<p>karyawan bersalaman dengan muridmurid yang datang.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Kegiatan piket 3s dilaksanakan secara bergilir. Dalam satu hari petugas piket terdiri dari 3 orang dari masing-masing universitas yang melaksanakan PLT di SMA 11 Yogyakarta.</p>	
		07.30-12.00	Ngawas PTS	<p><b><u>Kuallittatif:</u></b> Kegiatan pengawasanya dilakukan dikelas XII IPA 1. Materi yang ujikan adalah mata pelajaran geografi dan biologi. Kegiatan mengawas PTS dilakukan bersama dengan seorang guru dari SMA N 11 Yogyakarta.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Pengawas UTS setiap ruangan terdiri dari 2 pengawas.</p>	
16.	Minggu/01-10-2017	07.30-09.30	Upacara hari kesaktian pancasila	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Upacara ini dilaksanakan pada hari minggu untuk memperingati hari kesaktian pancasila. Kegiatan upacara diisi dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan surat dari kementrian pendidikan dan kebudayaan serta penyerhan hadiah-hadiah lomba.</p>	

				<p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Upacara diikuti oleh seluruh siswa dari mulai kelas x, xi dan xii serta para guru dan karyawan sekolah termasuk mahasiswa PLT yang sedang melaksanakan magang di SMA 11 Yogyakarta.</p>	
17.	Senin, 02-10-2017	08.00-09.00	Penyusunan materi/lab sheet	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Materi yang disusun merupakan materi yang akan digunakan sebagai bahan ajar. Materi yang dikumpulkan dapat diperoleh dari buku, internet maupun dari sumber lain.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Materi yang disusun terdiri dari 12 lembar dan dikerjakan selama 1 jam.</p>	
		09.00-10.00	Pembagian kalender akademik	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Membantu mengecap kalender dan membagikannya kepada siswa.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Kegiatan ini dilakukan oleh 5 orang mahasiswa PLT.</p>	
		10.00-12.00	Membuat media	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Media pembelajaran yang dibuat adalah PPT atau <i>power point</i>.</p>	

			pembelajaran	<p>Tujuan pembuatan media pembelajaran ini adalah untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. PPT yang dipersiapkan adalah tentang materi potensi, sebaran dan pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Kegiatan ini dilakukan secara tim yakni berdua dengan teman PLT sesama jurusan.</p>	
		12.00-14.00	Membuat program semester dan program tahunan	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Program semester dan program tahunan dibuat sebagai acuan atau panduan dalam mengajar. Pembuatan program semester dan program tahunan ini dilakukan secara tim dengan bimbingan guru pamong.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Berdasarkan penghitungan jam efektif, diperoleh waktu mengajar sebanyak 68 jam pelajaran dengan materi belajar tentang sumber daya alam dan ketahanan pangan.</p>	
18.	Selasa/03-10-2017	07.00-15.00	Piket KBM	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Piket KBM dilaksanakan mulai dari pukul 7.15 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kegiatan piket KBM terdiri dari: pencatatan siswa yang terlambat, pemberian surat bagi siswa yang masuk</p>	

				<p>dan keluar kelas serta pengecekan kelas setiap akan pergantian jam pelajaran. Selain itu, mahasiswa yang piket juga bertanggungjawab menyerahkan tugas yang ditiptkan bapak/ibu guru ketika berhalangan masuk kelas.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b>  Jumlah mahasiswa PLT yang melakukan piket KBM ada 9 mahasiswa yang terdiri dari 3 mahasiswa UNY, 3 mahasiswa UST dan 3 mahasiswa Sanata Dharma.  Jumlah siswa yang terlambat :</p>	
19.	Rabu, 04-10-2017	14.00-15.00	Konsultasi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b>  Kegiatan konsultasi dilakukan untuk menyamakan persepsi antara guru dengan mahasiswa sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan ini juga diperlukan untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa PLT setelah mengajar pada pertemuan sebelumnya.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b>  Kegiatan konsultasi diikuti oleh 2 mahasiswa pend.  Kewarganegaraan bersama 1 orang guru pamong mata pelajaran PPKn</p>	
		07.00-09.00	Mengumpulkan materi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b>  Materi yang adalah materi dikumpulkan tentang sistem politik, struktur politik yang terdiri atas suprastruktur dan infrastruktur politik di indonesia. Materi yang dikumpulkan berasal dari buku</p>	

				<p>guru, buku paket, LKS dan internet</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Materi yang didapat sebanyak 20 lembar. Terdiri dari bacaan dan juga gambar.</p>	
		09.00-11.00	Membuat RPP	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Pembuatan RPP dilakukan selama 2 jam. Format RPP yang dipergunakan adalah RPP K13 revisi 2017. RPP yang dibuat adalah RPP adalah untuk indikator 3.3.2 tentang potensi dan persebaran sumberdaya hutan yang ada di Indonesia.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> RPP yang dibuat 1 indikator yaitu mengenai materi potensi, persebaran dan pengelolaan sumber daya hutan.</p>	
		11.00-13.00	Menyiapkan media	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Kegiatan menyiapkan media adalah kegiatan mempersiapkan media pembelajaran untuk materi Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia. Media yang dibuat adalah berbentuk power point. Dan juga menyiapkan gambar-gambar untuk menstimulus siswa agar aktif dalam pembelajaran.</p>	

				<p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Media yang disiapkan sejumlah 2 media. Yaitu power point tentang materi Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia serta menyiapkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi tersebut.</p>	
		13.00-14.00	Menyusun materi/Lab.Sheet	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Materi yang disusun merupakan materi yang dipersiapkan untuk pembelajaran. Materi yang disusun dijadikan sebagai acuan dan sumber dalam belajar. Sumber materi pelajaran dapat diperoleh melalui buku pelajaran, internet maupun sumber lain seperti jurnal dan lain-lain.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Kelas X IPS 1 terdiri dari 32 siswa Kelas X IPA 1 terdiri dari 30 siswa</p>	
20.	Kamis, 05-10-2017	07.15-08.45 12.30-14.00	Praktik mengajar	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Praktik mengajar pada hari kamis dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada jam 1,2 dan pada jam ke 7,8. Pada jam 1,2 pembelajaran dilakukan dikelas X IPS 1 dan pembelajaran jam ke 7,8 dilakukan dikelas XI IPA 1.</p>	

			<p>Materi yang disampaikan adalah mengenai Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia. Masing-masing pembelajaran dilakukan selama 2x45 menit. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode <i>scientific learning</i>. Kondisi kelas selama mengikuti pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan pembelajaran ini juga diawasi langsung oleh guru pamong PPKn.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah siswa kelas X IPS 1 adalah 32 siswa. Satu siswa tidak mengikuti pembelajaran dengan keterangan sakit. Sedangkan jumlah kelas X IPA 1 adalah 30 siswa. Satu siswa tidak mengikuti pembelajaran dengan keterangan izin.</p>	
--	--	--	--	--

21.	Jum'at, 06-10-2017	07.00-08.00	Afeksi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Kegiatan afeksi dilaksanakan setiap hari jumat. Kegiatan ini merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan serentak di sekolah. Tempat ibadah untuk agama islam diruang kelas masing-masing, agama katolik di perpustakaan, agama kristen di ruang garuda dan agama hindu budha di ruang BK. Kegiatan afeksi untuk agama islam dilakukan dengan membaca ayat suci al-quran secara bersama-sama yang dipandu oeh seorang murid dengan menggunakan <i>speaker</i>. Selain membaca al-quran kegiatan afeksi ini juga diisi dengan kegiatan infaq bersama. Kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan pada siswa siswi yang ada di SMAN 11 Yogyakarta.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Pelaksanaan afeksi didampingi oleh 1 orang guru atau mahasiwa dalam satu kelasnya.</p>	
		08.00-09.00	Konsultasi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Kegiatan konsultasi dilakukan untuk menyamakan persepsi dan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Konsultasi dilakukan mahasiswa PLT dengan guru pamong mata pelajaran. Kegiatan konsultasi juga digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Keigatan ini dilakukan sehari setiap akan melakukan pembelajaran dikelas.</p>	

				<p><b><u>Kuantitatif:</u></b>  Kegiatan konsultasi diikuti oleh 2 mahasiswa pend.  Kewarganegaraan bersama 1 orang guru pamong mata pelajaran PPKn.</p>	
22.	Sabtu, 07-10-2017	06.30-07.30	Piket 3s	<p><b><u>Kualitatif:</u></b>  3s adalah kepanjangan dari senyum, sapa dan salam. Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari, didepan sekolah sebelum siswa masuk ke lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini siswa bersalaman dengan guru secara tertib.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b>  Jumlah petugas yang melaksanakan piket kurang lebih 12 orag yang terdiri dari 6 mahasiswa dan 6 bapak/ibu guru dari SMAN 11 Yogyakarta.</p>	

23.	Senin, 09-10-2017	08.00-09.00	Membuat RPP	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Pembuatan RPP dilakukan selama 2 jam. Format RPP yang dipergunakan adalah RPP K13 revisi 2017. RPP yang dibuat adalah RPP untuk indikator potensi, persebaran dan pengelolaan sumberdaya tambang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> RPP yang dibuat 1 indikator yaitu mengenai materi potensi, persebaran dan pengelolaan sumberdaya tambang di Indonesia.</p>	
		09.00-11.00	Menyiapkan media	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Media yang dipersiapkan berupa: Power point terkait materi yang akan diajarkan dan peta Indonesia yang digunakan untuk menganalisis sebaran sumberdaya tambang yang ada di Indonesia.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Media pembelajaran yang digunakan untuk mengaja dipersiapkan dalam waktu kurang lebih 1hari. Pembuatan media dilakukan secara individu oleh mahasiswa yang bersangkutan.</p>	

24.	Selasa, 10-10-2017	07.00-15.00	Piket KBM	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Piket KBM dilaksanakan mulai dari pukul 7.15 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kegiatan piket KBM terdiri dari: pencatatan siswa yang terlambat, pemberian surat bagi siswa yang masuk dan keluar kelas serta pengecekan kelas setiap akan pergantian jam pelajaran. Selain itu, mahasiswa yang piket juga bertanggungjawab menyerahkan tugas yang dititipkan bapak/ibu guru ketika berhalangan masuk kelas.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah mahasiswa PLT yang melakukan piket KBM ada 9 mahasiswa yang terdiri dari 3 mahasiswa UNY, 3 mahasiswa UST dan 3 mahasiswa Sanata Dharma. Jumlah siswa yang terlambat sebanyak 7 siswa.</p>	
25.	Rabu, 11-10-2017	07.30-09.30	Mengumpulkan materi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Materi yang dikumpulkan adalah materi tentang Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945. Materi yang dikumpulkan berasal dari buku siswa, buku paket, LKS dan internet.</p> <p>.</p>	

			<p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Materi yang didapat sebanyak 15 lembar. Terdiri dari bacaan dan juga gambar.</p>	
	09.30-11.30	Membuat RPP	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Pembuatan RPP dilakukan selama 2 jam. Format RPP yang dipergunakan adalah RPP K13 revisi 2017. RPP yang dibuat adalah RPP dengan kompetensi Dasar Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi Pokok Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD 1945.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> RPP yang dibuat 1 indikator yaitu Mengidentifikasi Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945.</p>	
	11.30-13.30	Membuat media	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Pembuatan media diperlukan untuk memudahkan penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik. Media yang dipersiapkan berupa pembuatan <i>power point</i> tentang materi Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945 . Selain itu media yang digunakan dalam pembelajaran adalah video-video atau gambar-gambar yang berkaitan dengan</p>	

				<p>materi pembelajaran. Metode-metode tersebut diperoleh dari internet.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Media pembelajaran yang digunakan untuk mengajar dipersiapkan dalam waktu kurang lebih 1hari. Pembuatan media dilakukan secara individu oleh mahasiswa yang bersangkutan.</p>	
		13.00-14.00	Menyusun materi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Materi yang disusun merupakan materi yang dipersiapkan untuk pembelajaran. Materi yang disusun dijadikan sebagai acuan dan sumber dalam belajar. Sumber materi pelajaran dapat diperoleh melalui buku pelajaran, internet maupun sumber lain seperti jurnal dan lain-lain. Materi yang disusun merupakan materi tentang Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Kelas X IPS 1 terdiri dari 32 siswa. Kelas X IPA 1 terdiri dari 30 siswa</p>	
26.	Kamis 12-10-2017	07.15-08.45	Praktek mengajar	<p><b><u>Kualitatif:</u></b></p>	

		12.30-14.00		<p>Praktik mengajar pada hari kamis dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada jam 1,2 dan pada jam ke 7,8. Pada jam 1,2 pembelajaran dilakukan dikelas X IPS 1 dan pembelajaran jam ke 7,8 dilakukan dikelas X IPA 1.</p> <p>Materi yang disampaikan adalah mengenai Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945. Masing-masing pembelajaran dilakukan selama 2x45 menit. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode <i>scientific learning</i>. Kondisi kelas selama mengikuti pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan pembelajaran ini juga diawasi langsung oleh guru pamong PPKn</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Kelas X IPS 1 terdiri dari 32 siswa sedangkan kelas X IPA 1 terdiri dari 30 siswa</p>	
27.	Jum'at, 13-10-2017	07.15-08.15	Afeksi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Kegiatan afeksi dilaksanakan setiap hari jumat. Kegiatan ini merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan serentak di sekolah. Tempat ibadah untuk agama islam diruang kelas masing-masing, agama katolik di perpustakaan, agama kristen di ruang garuda dan agama hindu budha di ruang BK. Kegiatan afeksi untuk agama islam dilakukan dengan membaca ayat suci al-quran secara bersama-sama yang dipandu oleh seorang murid</p>	

				<p>dengan menggunakan <i>speaker</i>. Selain membaca al-quran kegiatan afeksi ini juga diisi dengan kegiatan infaq bersama. Kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan pada siswa siswi yang ada di SMAN 11 Yogyakarta.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Pelaksanaan afeksi didampingi oleh 1 orang guru atau mahasiswa dalam satu kelasnya.</p>	
		08.15-09.15	Konsultasi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Kegiatan konsultasi dilakukan untuk menyamakan persepsi antara guru dengan mahasiswa sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan ini juga diperlukan untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa PLT setelah mengajar pada pertemuan sebelumnya.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Kegiatan konsultasi diikuti oleh 2 mahasiswa pend. Kewarganegaraan bersama 1 orang guru pamong mata pelajaran PPKn.</p>	
		09.15-11.15	Mengumpulkan materi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Materi yang dikumpulkan adalah materi tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Politik. Materi yang dikumpulkan berasal dari buku paket, LKS dan internet.</p>	

				<p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Materi yang didapat sebanyak 15 lembar.Terdiri dari bacaan dan juga gambar.</p>	
		11.15-13.15	Membuat RPP	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Membuat RPP dengan materi Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipai Politik</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> RPP yang dibuat didisain untuk 1 kali pertemuan atau 2x45 menit.</p>	
28.	Sabtu, 14-10-2017	06.30-07.30	Piket 3s	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> 3s adalah kepanjangan dari senyum, sapa dan salam. Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari, didepan sekolah sebelum siswa masuk ke lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini siswa bersalaman dengan guru secara tertib.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah petugas yang melaksanakan piket kurang lebih 12 orag yang terdiri dari 6 mahasiswa dan 6 bapak/ibu guru dari SMAN 11 Yogyakarta.</p>	

29.	Senin, 16-10-2017	08.00-09.00	Merevisi RPP	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Merevisi atau memperbaiki RPP yang telah dikoreksi oleh guru pamong.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> RPP yang direvisi dirancang untuk lebih dari 1 kali pertemuan.</p>	
		09.00-11.00	Membuat media	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Media pembelajaran yang dibuat adalah PPT atau power point..</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Media pembelajaran yang dibuat terdiri dari 25 slide berisi materi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Politik</p>	
30.	Selasa, 17-10-2017	07.15-15.00	Piket KBM	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Piket KBM dilaksanakan mulai dari pukul 7.15 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kegiatan piket KBM terdiri dari: pencatatan siswa yang terlambat, pemberian surat bagi siswa yang masuk dan keluar kelas serta pengecekan kelas setiap akan pergantian jam pelajaran. Selain itu, mahasiswa yang piket juga bertanggungjawab menyerahkan tugas yang dititipkan bapak/ibu guru ketika berhalangan masuk kelas.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b></p>	

				Jumlah mahasiswa PLT yang melakukan piket KBM ada 9 mahasiswa yang terdiri dari 3 mahasiswa UNY, 3 mahasiswa UST dan 3 mahasiswa Sanata Dharma. Jumlah siswa yang terlambat sebanyak 9 siswa.	
31.	Rabu, 18-10-2017	08.00-09.00	Mengumpulkan materi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Mengumpulkan materi terkait dengan pembelajaran yang dilakukan. Materi yang dikumpulkan adalah materi seputar good governance dan partisipasi politik.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Materi dikumpulkan dalam bentuk word yang terdiri dari 17 lembar.</p>	
		09.00-11.00	Membuat RPP	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Memperbaiki RPP yang telah dibuat sebelumnya.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Revisi RPP dilakukan secara individu.</p>	
		11.00-12.00	Konsultasi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Kegiatan konsultasi dilakukan untuk menyamakan persepsi antara guru dengan mahasiswa sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan ini juga diperlukan untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa PLT setelah mengajar pada pertemuan sebelumnya.</p>	

				<p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Kegiatan konsultasi diikuti oleh 2 mahasiswa pend. Kewarganegaraan bersama 1 orang guru pamong mata pelajaran PPKn.</p>	
		12.00-14.00	Membuat media	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Media pembelajaran yang dibuat adalah PPT atau power point. Materi yang dibuat tentang Good Governance dan Partisipasi Politik</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Media pembelajaran yang dibuat terdiri dari 21 slide</p>	
		14.00-15.00	Menyusun materi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Menyusun materi-materi yang telah dikumpulkan agar menjadi runtun.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Materi yang terkumpul berjumlah 15 halaman.</p>	
32.	Kamis 19-10-2017	07.15-08.45 12.30-14.00	Praktek Mengajar	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Praktik mengajar pada hari kamis dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada jam 1,2 dan pada jam ke 7,8. Pada jam 1,2 pembelajaran dilakukan dikelas X IPS 1 dan pembelajaran jam ke 7,8 dilakukan dikelas XI IPA</p>	

				<p>Materi yang disampaikan dalam pembelajaran adalah materi tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia . Kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan siswa antusias dalam mengikuti pelajaran.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Pembelajaran dilakukan selama 2x45 menit. Jumlah siswa kelas X IPA 1 adalah 30 siswa. Satu siswa tidak hadir dalam pembelajaran dengan keterangan izin. Sedangkan kelas X IPS 1 berjumlah 32 siswa. Satu siswa tidak hadir dengan keterangan sakit.</p>	
33.	Jum'at/ 20-10-2017	07.15-08.15	Afeksi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Kegiatan afeksi dilaksanakan setiap hari jumat. Kegiatan ini merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan serentak di sekolah. Tempat ibadah untuk agama islam diruang kelas masing-masing, agama katolik di perpustakaan, agama kristen di ruang garuda dan agama hindu budha di ruang BK. Kegiatan afeksi untuk agama islam dilakukan dengan membaca ayat suci al-quran secara bersama-sama yang dipandu oeh seorang murid dengan menggunakan <i>speaker</i>. Selain membaca al-quran kegiatan afeksi ini juga diisi dengan kegiatan infaq bersama. Kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan</p>	

				<p>pada siswa siswi yang ada di SMAN 11 Yogyakarta.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Pelaksanaan afeksi didampingi oleh 1 orang guru atau mahasiswa dalam satu kelasnya.</p>	
		08.15-09.15	Konsultasi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Konsultasi dilakukan bersama dengan guru pamong masing-masing. Kegiatan konsultasi dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi tentang materi pembelajaran.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Kegiatan konsultasi dilakukan oleh 1 mahasiswa Kewarganegaraan berdama dengan guru pamong PPKn.</p>	
		11.15-13.00	Mengumpulkan materi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Mengumpulkan materi tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk pertemuan setelah ulangan harian</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Materi yang diperoleh sebanyak 15 lembar.</p>	
		09.15-11.15	Membuat RPP	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> RPP yang dibuat adalah tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b></p>	

				Pembuatan RPP diselesaikan dalam waktu 2jam.	
34.	Sabtu, 21-10-2017	06.30-07.30	Piket 3s	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> 3s adalah kepanjangan dari senyum, sapa dan salam. Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari, didepan sekolah sebelum siswa masuk ke lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini siswa bersalaman dengan guru secara tertib.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah petugas yang melaksanakan piket kurang lebih 12 orag yang terdiri dari 6 mahasiswa dan 6 bapak/ibu guru dari SMAN 11 Yogyakarta.</p>	
35.	Senin, 23-10-2017	10.30-14.00	Membuat kisi-kisi UH	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Materi yang akan dijadikan bahan ujian adalah materi bab 3 Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah soal ulangan harian terdiri dari 10 soal pilihan gandan dan 5 soal essay.</p>	
36.	Selasa, 24-10-2017	07.15-15.00	Piket KBM	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Piket KBM dilaksanakan mulai dari pukul 7.15 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kegiatan piket KBM terdiri dari: pencatatan siswa yang terlambat, pemberian surat bagi siswa yang masuk</p>	

				<p>dan keluar kelas serta pengecekan kelas setiap akan pergantian jam pelajaran. Selain itu, mahasiswa yang piket juga bertanggungjawab menyerahkan tugas yang dititipkan bapak/ibu guru ketika berhalangan masuk kelas.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b>          Jumlah mahasiswa PLT yang melakukan piket KBM ada 9 mahasiswa yang terdiri dari 3 mahasiswa UNY, 3 mahasiswa UST dan 3 mahasiswa Sanata Dharma. Jumlah siswa yang terlambat sebanyak 4 siswa.</p>	
37.	Rabu, 25-10-2017	07.15-15.00	Membuat kisi-kisi UH	<p><b><u>Kualitatif:</u></b>          Melanjutkan pembuatan kisi-kisi dan soal Ulangan Harian serta merevisi kisi-kisi dan soal ulangan harian sesuai dengan arahan guru pamong.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b>          Jumlah soal ulangan harian terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal essay.</p>	
38.	Kamis, 26-10-2017	07.15-08.45 12.30-14.00	Ulangan Harian	<p><b><u>Kualitatif:</u></b>          Ulangan harian dilakukan setiap selesai 1 bab. Materi yang diujikan adalah materi mengenai bab 3 tentang kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Ualngan harian</p>	

				<p>berjalan dengan lancar.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Soal ulangan harian terdiri dari soal pilihan ganda dan uraian. Soal pilihan ganda berjumlah 10 sedangkan soal uraian berjumlah 5 soal. Ulangan harian berlangsung selama 2x45 menit.</p>	
39.	Jum'at, 27-10-2017	07.15-08.15	Afeksi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Kegiatan afeksi dilaksanakan setiap hari jumat. Kegiatan ini merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan serentak di sekolah. Tempat ibadah untuk agama islam diruang kelas masing-masing, agama katolik di perpustakaan, agama kristen di ruang garuda dan agama hindu budha di ruang BK. Kegiatan afeksi untuk agama islam dilakukan dengan membaca ayat suci al-quran secara bersama-sama yang dipandu oeh seorang murid dengan menggunakan <i>speaker</i>. Selain membaca al-quran kegiatan afeksi ini juga diisi dengan kegiatan infaq bersama. Kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan pada siswa siswi yang ada di SMAN 11 Yogyakarta.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Pelaksanaan afeksi didampingi oleh 1 orang guru atau mahasiwa</p>	

				dalam satu kelasnya.	
		08.15-09.15	Konsultasi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Kegiatan konsultasi dilakukan untuk menyamakan persepsi antara guru dengan mahasiswa sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan ini juga diperlukan untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa PLT setelah mengajar pada pertemuan sebelumnya.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Kegiatan konsultasi diikuti oleh 2 mahasiswa pend. Kewarganegaraan bersama 1 orang guru pamong mata pelajaran PPKn.</p>	
		09.15-11.15	Membuat media	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Media yang dipersiapkan adalah <i>power point</i> . <i>Power point</i> yang dipersiapkan adalah materi tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah slide ppt yang dibuat sebanyak 15 slide.</p>	
40.	Sabtu, 28-10-2017	07.15-09.00	Upacara peringatan hari sumpah	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Upacara pada hari sabtu ini dilakukan untuk memperingati hari</p>	

			pemuda	<p>sumpah pemuda. Kegiatan upacara terdiri dari pengibaran bendera merah putih, pembacaan surat dari kementerian pendidikan RI serta diakhiri dengan acara pelantikan pengurus Osis dan MPK tahun 2017-2018 SMAN 11 Yogyakarta oleh kepala sekolah. Upacara dan pelantikan berjalan dengan lancar.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Upacara dan pelantikan berlangsung selama 2 jam mulai dari jam 07.00-09.00 WIB. Upacara diikuti oleh seluruh siswa serta guru dan karyawan SMAN 11 Yogyakarta.</p>	
		06.30-07.15	Piket 3s	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> 3s adalah kepanjangan dari senyum, sapa dan salam. Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari, didepan sekolah sebelum siswa masuk ke lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini siswa bersalaman dengan guru secara tertib.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah petugas yang melaksanakan piket kurang lebih 12 orang yang terdiri dari 6 mahasiswa dan 6 bapak/ibu guru dari SMAN 11 Yogyakarta.</p>	

41.	Senin, 30-10-2017	07.00-09.00	Mengoreksi hasil ulangan harian	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Mengoreksi hasil ulangan harian bagian soal essay. Serta mengoreksi tugas individu maupun kelompok siswa.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Proses pengoreksian dilakukan secara manual dan individu.</p>	
		10.30-12.30	Menyusun materi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Menyusun materi untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya yakni materi mengenai Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah materi yang dikumpulkan adalah 20 lembar materi.</p>	
42.	Selasa, 31-10-2017	07.015-15.00	Piket KBM	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Piket KBM dilaksanakan mulai dari pukul 7.15 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kegiatan piket KBM terdiri dari: pencatatan siswa yang terlambat, pemberian surat bagi siswa yang masuk dan keluar kelas serta pengecekan kelas setiap akan pergantian jam pelajaran. Selain itu, mahasiswa yang piket juga bertanggungjawab menyerahkan tugas yang dititipkan bapak/ibu guru ketika berhalangan masuk kelas.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah mahasiswa PLT yang melakukan piket KBM ada 9 mahasiswa yang terdiri dari 3 mahasiswa UNY, 3 mahasiswa</p>	

				UST dan 3 mahasiswa Sanata Dharma.	
43.	Rabu, 01-11-2017	08.00-09.00	Konsultasi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Kegiatan konsultasi ini membahas tentang kegiatan remedi yang akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Konsultasi dilakukan oleh 2 mahasiswa pendidikan Kewarganegaran dengan guru pamong yang bersangkutan.</p>	
		09.00-13.00	Membuat RPP	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Menyusun RPP yang telah di revisi pada bagian-bagian tertentu yang perlu diperbaiki.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Kegiatan ini dilakukan secara individu.</p>	
		13.00-14.00	Melakukan analisis butir soal	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Menginput jawaban siswa dan membuat analisis butir soal. dengan melakukan anbuso atau analisis butir soal ini diketahui terdapat 2 siswa yang remedial.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Terdapat 2 siswa yang remedia di kelas X IPS 1</p>	

46.	Kamis 2-11-2017	07.15-08.45 12.30-14.00	Praktik mengajar	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Melakukan program remedi terhadap 2 siswa yang remedial. Program remedi dilaksanakan dengan mengerjakan LKS halaman 59 pada bagian remedial</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Soal untuk remedial terdiri dari 5 soal essay yang harus dikerjakan oleh 2 siswa yang remedial.</p>	
45.	Jum'at, 03-11-2017	08.00-10.00	Melakukan analisis butir soal	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Melanjutkan kegiatan analisis butir soal terhadap hasil remedi.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Siswa yang remedial sebanyak 2 siswa.</p>	
		07.15-08.00	Afeksi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Kegiatan afeksi dilaksanakan setiap hari jumat. Kegiatan ini merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan serentak di sekolah. Tempat ibadah untuk agama islam diruang kelas masing-masing, agama katolik di perpustakaan, agama kristen di ruang garuda dan agama hindu budha di ruang BK. Kegiatan afeksi untuk agama islam dilakukan dengan membaca ayat suci al-quran secara bersama-sama yang dipandu oleh seorang murid dengan menggunakan <i>speaker</i>. Selain membaca al-quran kegiatan afeksi ini juga diisi dengan kegiatan infaq bersama. Kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan</p>	

				<p>pada siswa siswi yang ada di SMAN 11 Yogyakarta.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Pelaksanaan afeksi didampingi oleh 1 orang guru atau mahasiswa dalam satu kelasnya.</p>	
		10.00-11.00	Konsultasi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Melanjutkan kegiatan analisis butir soal terhadap hasil remedi.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Siswa yang remedial sebanyak 2 siswa.</p>	
		11.00-13.00	Menyaipkan materi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Menyusun semua materi pembelajaran agar menjadi satu kesatuan yang runtun.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah materi yang dikumpulkan adalah 200 lembar materi.</p>	
46.	Sabtu, 04-11-2017	06.30-07.30	Piket 3s	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> 3s adalah kepanjangan dari senyum, sapa dan salam. Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari, didepan sekolah sebelum siswa masuk ke lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini siswa bersalaman dengan guru secara tertib.</p>	

				<p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah petugas yang melaksanakan piket kurang lebih 12 orang yang terdiri dari 6 mahasiswa dan 6 bapak/ibu guru dari SMAN 11 Yogyakarta.</p>	
		09.00-11.00	Membuat RPP	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Melanjutkan revisi RPP dan menyusun menjadi satu kesatuan.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah rpp keseluruhan terdapat kurang lebih 200 lembar.</p>	
47.	Senin, 06-11-2017	10.00-12.00	Membuat media	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Membuat media pembelajaran berupa ppt dengan materi Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Media pembelajaran yang dibuat terdiri dari 20 slide.</p>	
		07.00-08.00	Menyusun materi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Melengkapi materi pembelajaran yang masih kurang lengkap.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah materi yang dikumpulkan adalah 195 lembar materi.</p>	
48.	Selasa,	07.00-15.00	Piket KBM	<p><b><u>Kualitatif:</u></b></p>	

	07-11-2017			<p>Piket KBM dilaksanakan mulai dari pukul 7.15 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kegiatan piket KBM terdiri dari: pencatatan siswa yang terlambat, pemberian surat bagi siswa yang masuk dan keluar kelas serta pengecekan kelas setiap akan pergantian jam pelajaran. Selain itu, mahasiswa yang piket juga bertanggungjawab menyerahkan tugas yang ditiptkan bapak/ibu guru ketika berhalangan masuk kelas.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah mahasiswa PLT yang melakukan piket KBM ada 9 mahasiswa yang terdiri dari 3 mahasiswa UNY, 3 mahasiswa UST dan 3 mahasiswa Sanata Dharma.</p>	
49.	Rabu, 08-11-2017	08.00-10.00	Menyiapkan program remidi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Menyiapkan form untuk remidi yang terdiri dari presensi siswa, soal ulangan, lembar pengayaan dan lain-lain.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah siswa yang remedial sebanyak 3 siswa.</p>	
		10.00-12.00	Mengoreksi tugas	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Mengoreksi tugas-tugas baik tugas individu maupun tugas kelompok.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Semua siswa mengumpulkan tugas dengan baik.</p>	

50.	Kamis, 09-11-2017	07.15-08.45 12.30-14.00	Praktik mengajar	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Praktik mengajar dikukan dikelas X IPS 1 dan X IPA 1 Pembelajaran di X IPS 1 dan XI IPA 1 dilakukan dengan materi Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Praktik mengajar dikelas X IPS 1 dan X IPA 1 dilakukan secara individu Jumlah siswa kelas X IPS 1 adalah sebanyak 32 siswa dan X IPA 30 siswa</p>	
51.	Jum'at, 10-11-2017	06.30-07.30	Afeksi	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Kegiatan afeksi dilaksanakan setiap hari jumat. Kegiatan ini merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan serentak di sekolah. Tempat ibadah untuk agama islam diruang kelas masing-masing, agama katolik di perpustakaan, agama kristen di ruang garuda dan agama hindu budha di ruang BK. Kegiatan afeksi untuk agama islam dilakukan dengan membaca ayat suci al-quran secara bersama-sama yang dipandu oeh seorang murid dengan menggunakan <i>speaker</i>. Selain membaca al-quran kegiatan afeksi ini juga diisi dengan kegiatan infaq bersama. Kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan pada siswa siswi yang ada di SMAN 11 Yogyakarta.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b></p>	

				Pelaksanaan afeksi didampingi oleh 1 orang guru atau mahasiswa dalam satu kelasnya.	
52.	Sabtu, 11-11-2017	07.30-09.15 Dan 12.30-14.00	Praktik mengajar	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Praktik mengajar dilakukan di kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2. Pembelajaran di XI IPS 1 dan XI IPS 2 dilakukan dengan materi potensi geografis Indonesia untuk ketahanan pangan. Materi Kemudian siswa mempresentasikan hasil mading yang dibuat.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Praktik mengajar di kelas XI IPS 1 dilakukan secara individu dan praktik mengajar di kelas XI IPS 2 dilakukan secara tim. Jumlah siswa kelas XI IPS 1 adalah sebanyak 31 siswa dan XI IPS 2 30 siswa.</p>	
		06.30-07.30	Piket 3s	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> 3s adalah kepanjangan dari senyum, sapa dan salam. Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari, di depan sekolah sebelum siswa masuk ke lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini siswa bersalaman dengan guru secara tertib.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah petugas yang melaksanakan piket kurang lebih 12 orang yang terdiri dari 6 mahasiswa dan 6 bapak/ibu guru dari SMAN</p>	

				11 Yogyakarta.	
53.	Senin, 13-11-2017	08.00-11.00	Membuat SOAL UAS	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Membuat soal pilihan ganda dengan materi yang ada di BAB 3 dan BAB 4</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah soal yang dibuat sebanyak 50 soal.</p>	
		11.00-14.00	Menyiapkan lampiran-lampiran laporan	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Menyiapkan lampiran untuk laporan yang terdiri dari lampiran prota, prosem, catatan harian, matrik, daftar nilai, anbuso dan lain lain.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b> Jumlah lampiran yang harus disiapkan sebanyak 12.</p>	
54.	Selasa, 14-11-2017	07.00-14.00	Piket KBM	<p><b><u>Kualitatif:</u></b> Piket KBM dilaksanakan mulai dari pukul 7.15 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kegiatan piket KBM terdiri dari: pencatatan siswa yang terlambat, pemberian surat bagi siswa yang masuk dan keluar kelas serta pengecekan kelas setiap akan pergantian jam pelajaran. Selain itu, mahasiswa yang piket juga bertanggungjawab menyerahkan tugas yang dititipkan bapak/ibu guru ketika berhalangan masuk kelas.</p>	

				<p><b><u>Kuantitatif:</u></b>  Jumlah mahasiswa PLT yang melakukan piket KBM ada 9 mahasiswa yang terdiri dari 3 mahasiswa UNY, 3 mahasiswa UST dan 3 mahasiswa Sanata Dharma.</p>	
55.	Rabu, 15-11-2017	07.00-13.00	Piket KBM	<p><b><u>Kualitatif:</u></b>  Piket KBM dilaksanakan mulai dari pukul 7.15 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kegiatan piket KBM terdiri dari: pencatatan siswa yang terlambat, pemberian surat bagi siswa yang masuk dan keluar kelas serta pengecekan kelas setiap akan pergantian jam pelajaran. Selain itu, mahasiswa yang piket juga bertanggungjawab menyerahkan tugas yang dititipkan bapak/ibu guru ketika berhalangan masuk kelas.</p> <p><b><u>Kuantitatif:</u></b>  Jumlah mahasiswa PLT yang melakukan piket KBM ada 9 mahasiswa yang terdiri dari 3 mahasiswa UNY, 3 mahasiswa UST dan 3 mahasiswa Sanata Dharma.</p>	
		12.30-14.00	Penarikan PLT	<p><b><u>Kualitatif:</u></b>  Penarikan PLT dilakukan pada hari rabu, tanggal 15 november 2017. Kegiatan penarikan terdiri dari kata sambutan oleh kepala</p>	

				<p>sekolah SMAN 11 Yogyakarta, sambutan oleh dosen pemang serta pesan kesan yang disampaikan oleh guru pemang dan perwakilan mahasiswa PLT serta kegiatan pemberian keranjang-kemungat. Kegiatan penarikan berjalan lancar.</p> <p><b>Kuantitatif:</b> jumlah guru pemang kurang lebih 10, jumlah mahasiswa 19, 1 DPL, 1 kepala sekolah dan 3 dari perwakilan kurikulum.</p>	
--	--	--	--	--	--

Yogyakarta, 17 November 2017  
Mengetahui



Sri Hartono, M.Hum  
NIP. 195801161985052001

**PROGRAM TAHUNAN  
SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA**

Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas	: X (Sepuluh)
Semester	: 1 (Gasal)
Tahun Ajaran	: 2017-2018

**A. KOMPETENSI INTI**

**1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) Untuk kompetensi inti sikap spiritual**

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

**2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) Untuk kompetensi inti sikap sosial**

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

**3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) Untuk kompetensi inti pengetahuan**

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

**4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) Untuk kompetensi inti keterampilan**

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

No	Kompetensi Dasar	Semt	Jml Jam	Ket.
	<p>Siswa mampu:</p> <p>1.1.Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>2.1Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>4.1.Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p>		10 JP	
	<p>Sisiwa mampu :</p> <p>1.2.menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil.</p> <p>2.2.mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-sundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>3.2.menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>4.2.menyaji hasil analisis tentang</p>	<b>Semester 1</b>	10 JP	

	<p>ketentuan Undangundang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.</p>			
	<p>Siswa mampu :</p> <p>1.3.menghargai nilai-nilai terkait fungsi lembaga lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945 secara adil.</p> <p>2.3.menghargai perilaku peduli terhadap nilai-nilai terkait fungsi lembaga lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.3.menganalisis kewenangan lembaga lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>4.3.menyajikan hasil kesimpulan tentang kewenangan lembaga lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>		10 JP	
	<p>Siswa mampu :</p> <p>1.4.Menghayati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil .</p> <p>2.4.Menghargai nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.4.Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan</p>		12 JP	

	<p>daerah menurut Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .</p> <p>4.4.Menyaji hasil kesimpulan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>			
	<p>Siswa mampu:</p> <p>1.5.Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>2.5.Menghargai nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>3.5.Menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>4.5.Menyaji faktor-faktor pembentuk integrasinasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>		8 JP	
	<p>Siswa mampu:</p> <p>1.6.Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>2.6.Mengamalkan nilai-nilai ketahanan terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>3.6.Memprediksi indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi,</p>		8 JP	

	<p>politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>4.6.Menyaji hasil prediksi tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p>			
	<p>Siswa mampu:</p> <p>1.7.Menghayati nilai-nilai pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia secara adil .</p> <p>2.7.Mengamalkan nilai-nilai wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>3.7.Menganalisis arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>4.7.Menyaji hasil keputusan bersama terkait arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>		8 JP	



<p>penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>4.1. Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara</p>	<p>penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>a. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia.</p> <p>b. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.</p> <p>c. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan.</p>	<p>2</p> <p>4</p> <p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
--	--	----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



<p>1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan .</p> <p>3.2.menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>4.2.menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undangundang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan</p>	<p>b. Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia.</p> <p>c. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia.</p> <p>d. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia.</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>								2																
--	---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





<p>2.4.Menghargai nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.4.Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .</p> <p>4.4.Menyaji hasil kesimpulan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>b. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan Daerah.</p> <p>c. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.</p>	<p>2</p>																									
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMA Negeri 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	: X / Gasal
Materi Pokok	: Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
Alokasi Waktu	: 2 X 45 Menit (1 Pertemuan)

---

---

### A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli(gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

## B. Kompetensi Dasar ( KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD)		Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	
1.3.	Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa.	1.3.1	Membangun nilai-nilai disiplin atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
		1.3.2	Membangun nilai-nilai tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
2.3.	Mengorganisasikan nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.	2.3.1	Membangun nilai-nilai disiplin tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
		2.3.2	Membangun nilai-nilai tanggung jawab tentang lembaga-lembaga negara menuurt Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
3.3.	Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menuurt Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.	3.3.1	<b>Mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia</b>
		3.3.2	Mengidentifikasi lembaga-lembaga negara RI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
		3.3.3	Menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik

		3.3.4	Menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI
4.3.	Menunjukkan ancaman-ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	4.3.1	Menyajikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
		4.3.2	Mengkomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

#### 1. Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial

Setelah mengikuti pelajaran peserta didik diharapkan mampu :

- a. Melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari materi tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Menampilkan sikap kerjasama terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Menampilkan sikap tanggung jawab terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2. Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik diharapkan dapat :

- a. Mengidentifikasi Suprastruktur Politik di Indonesia
- b. Mengidentifikasi Infrastruktur Politik di Indonesia
- c. Mengidentifikasi hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam pengambilan keputusan politik
- d. Mengkomunikasikan hasil identifikasi tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam pengambilan keputusan politik.

## D. MATERI PEMBELAJARAN : FAKTA, KONSEP, PRINSIP, PROSEDUR

### 1. Fakta

- a. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.
- b. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Lembaga-Lembaga Negara RI
- c. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang *impeachment* dalam ketatanegaraan RI.
- d. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang tata kelola pemerintahan yang baik.
- e. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang kurangnya partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.

### 2. Konsep

- a. Konsep/pengertian tentang Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.
- b. Konsep/pengertian tentang Lembaga-Lembaga Negara RI
- c. Konsep/pengertian tentang *impeachment* dalam ketatanegaraan RI.
- d. Konsep/pengertian tentang tata kelola pemerintahan yang baik.
- e. Konsep/pengertian tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.

### 3. Prinsip

- a. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.
- b. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lembaga-Lembaga Negara RI

- c. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *impeachment* dalam ketatanegaraan RI.
  - d. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik
  - f. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.
4. Prosedur
- a. Prosedur atau tata cara dalam proses demokrasi yang merupakan bagian dalam sistem politik Indonesia
  - b. Prosedur atau tata cara dalam proses pemilihan ketua lembaga-lembaga Negara RI.

#### **E. METODE PEMBELAJARAN**

Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam materi pembelajaran “Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika” adalah :

- 1. Metode : *Scientific Learning*
- 2. Strategi : Ceramah, Tanya-Jawab *Klasikal*, Tugas Kelompok, dan penugasan.

#### **F. Media dan bahan**

- 1. Media
  - a. *Power point* tentang indikator ancaman terhadap negara
  - b. Gambartentang ancaman-ancaman terhadap negara di berbagai bidang (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan
- 2. Alat/Bahan
  - a. LCD, *Proyektor*
  - b. Laptop
  - c. *White board*
  - d. Spidol
  - e. Kertas
  - f. bolpoin

#### **G. Sumber belajar**

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum

dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946.
- d. Tim Penyusun. *Modul Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester I*. Jawa Ttengah : Viva Pakarindo.
- e. Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika.

#### H. LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN:

Kegiatan Belajar	Waktu
<p><b>a. Kegiatan Pendahuluan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta didik mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan memperhatikan kebersihan dan kerapihan kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar seperti buku paket, alat serta media pembelajaran yang diperlukan, kemudian berdoa bersama, guru menanyakan kehadiran peserta didik dengan presensi.</li><li>2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik</li><li>3. Guru bersama peserta didik melakukan <i>apersepsi</i> melalui tanya jawab <i>klasikal</i> mengaitkan kembali materi “Ketentuan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara” dengan materi yang akan dibahas yaitu tentang “Sistem politik di Indonesia”.</li><li>4. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang materi pokok pembelajaran yang akan dipelajari, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yakni “Sistem Politik di Indonesia : Suprastruktur politik dan infrastruktur politik”.</li></ol>	10’

<p>5. Guru menyampaikan lingkup penilaian dan tehnik penilaian yang akan digunakan.</p>	
<p><b>b. Kegiatan inti</b></p> <p><b>1. Mengamati</b></p> <p>a. Guru menampilkan materi terkait fakta &amp; konsep sistem politik di Indonesia pada <i>Wall Screen</i> mengenai berbagai bentuk sistem politik baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik.</p> <p>b. Guru menjelaskan peranan yang dimiliki oleh suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia beserta permasalahan-permasalahan yang dihadapi melalui media gambar.</p> <p>c. Peserta didik dengan bimbingan guru mengamati gambar tentang peranan dan permasalahan sistem politik di Indonesia</p> <p>d. Guru mengamati keterampilan peserta didik dalam mengamati peranan dan permasalahan yang dihadapi oleh sistem politik di Indonesia.</p> <p><b>2. Menanya</b></p> <p>a. Guru bertanya kepada peserta didik, seperti : mengapa kita sebagai warga negara perlu membentuk suatu kelompok-kelompok kepentingan ?</p> <p>b. Peserta didik bersama dengan guru melakukan dialog mendalam secara <i>klasikal</i> untuk mengungkapkan bagaimana tanggapan peserta didik berdasarkan hasil pengamatan terhadap gambar yang ditampilkan.</p> <p>c. Guru bersama dengan peserta didik melakukan tanya jawab <i>klasikal</i> berkenaan dengan peranan dan permasalahan sistem politik di Indonesia.</p> <p><b>3. Mengumpulkan Informasi</b></p> <p>a. Peserta didik membentuk kelompok(5 kelompok)</p> <p>b. Peserta didik mengumpulkan informasi melalui internet atau sumber lain secara berkelompok.</p> <p><b>4. Mengasosiasi</b></p>	<p>70'</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta didik diberikan waktu oleh guru untuk berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada <i>lembar diskusi kelompok</i>.</li> <li>b. Guru mengamati peserta didik dalam melakukan tugas diskusi kelompok</li> <li>c. Peserta didik secara berkelompok menyusun laporan hasil diskusi secara tertulis pada <i>lembar diskusi kelompok</i>.</li> <li>d. Guru membimbing peserta didik dalam menyusun laporan hasil diskusi kelompok.</li> </ul> <p><b>5. Mengkomunikasikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Guru membimbing setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.</li> <li>b. Peserta didik secara bergiliran diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya</li> <li>c. Guru bersama peserta didik memberikan <i>apresiasi</i> dengan bertepuk tangan, guru memberikan klarifikasi dan umpan balik, serta penguatan hasil diskusi peserta didik.</li> </ul>	
<p><b>c. Penutup</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik secara aktif menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya-jawab <i>klasikal</i> dengan dibimbing oleh guru.</li> <li>2. Peserta didik membuat <i>refleksi</i> atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan dengan sistem politik di Indonesia.</li> <li>3. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami.</li> <li>4. Guru melakukan <i>evaluasi</i> dengan memberikan pertanyaan secara lisan terkait materi yang telah disampaikan yaitu tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik.</li> <li>5. Guru memberitahukan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya yaitu KD 3.2. tentang “Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945”.</li> <li>6. Mengajak peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing.</li> </ul>	10’

## I. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

### 1. Teknik penilaian

#### a. Penilaian Sikap Spiritual

No .	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran ( <i>assessment for and of learning</i> )

#### b. Penilaian Sikap Sosial

No .	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Penilaian diri	Lembar penilaian antar teman	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran usai	Penilaian sebagai pembelajaran ( <i>assessment as learning</i> )

c. Penilaian Pengetahuan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Tertulis	Pertanyaan (tertulis) dengan soal pilihan ganda	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran selesai	Penilaian untuk pembelajaran (assessment for learning)
2	Pengisian	Tugas berbentuk diskusi kelompok	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk pembelajaran (assessment for learning)

d. Penilaian Keterampilan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Praktik	Tugas (keterampilan)	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk, sebagai, dan/atau pencapaian pembelajaran (assessment for, as, and of learning)

Yogyakarta, 01 Oktober 2017

Mengetahui

Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Rahayu Setyaningsih

NIM.14401241003



# LAMPIRAN

Sekolah	: SMA N 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ( PPKn)
Kelas / Semester	: X / 1 (Satu)
Materi Pokok	: Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit

## I. MATERI PEMBELAJARAN

Sejarah bangsa Indonesia, diwarnai oleh pergerakan politik yang bertujuan untuk membangun sistem politik milik bangsa Indonesia sendiri. Kemudian sejarah mencatat, sistem politik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1998 belum menunjukkan sistem politik yang mapan. Jatuh bangun kabinet di orde lama, pembelokan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin dan monotelevisi terhadap Pancasila oleh orde baru memperlihatkan sistem politik Indonesia terus mencari bentuknya. Pembangunan sistem politik Indonesia menjadi sebuah sistem politik yang mapan menuntut peran aktif seluruh rakyat Indonesia. Upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk membangun sistem politik Indonesia akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh rakyat Indonesia.

### A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

#### 1. Suprastruktur

Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik, terbentuk dari dua pengertian yaitu sistem dan politik. Menurut *Pamudji*, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Selanjutnya, menurut *Rusadi Kantaprawira*, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional. Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah *suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik yang berupa input (masukan) ataupun output (hasil) yang terdapat dalam lingkungan dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional*.

Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai *siyasah* yang berarti strategi. Dari pengertian sistem dan politik beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
- b. Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antarmanusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.
- c. Jack C. Plano, mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut.
- d. Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.

Dari berbagai rumusan di atas, secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut.

Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Dengan kata lain, melalui sistem politik aspirasi masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan) yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Sistem politik berbeda dengan sistem sistem sosial yang lainnya. Ada empat ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain.

- a. Daya jangkauannya *universal*, meliputi semua anggota masyarakat.
- b. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik.
- c. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah.
- d. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar.

Dengan demikian, sistem politik yang berjalan tidak akan terlepas dari keseluruhan unsur-unsur suprastruktur dari suatu negara. Dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur

politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Struktur politik negara Indonesia pun terdiri dari dua kekuatan tersebut.

Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.

## 2. Infrastruktur

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara.

Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat empat kekuatan sebagai berikut.

- a. **Partai Politik**, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan.
- b. **Kelompok Kepentingan (*interest group*)**, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen (mandiri). Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat.

Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat buruh dan sebagainya.

- c. **Kelompok Penekan (*pressure group*)**, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok dan sebagainya.
  - d. **Media komunikasi politik**, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya, sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari aspirasi/pendapat sebagai berita politik.
  - e. **Tokoh Politik (*Political Figure*)**, tokoh politik adalah orang yang karena latar belakang sejarahnya, sepak terjangnya dalam perjuangan, dan idealismenya dikenal oleh masyarakat sehingga setiap pendapat/pikiran dan perbuatannya diikuti oleh banyak orang. Biasanya ia mempunyai kemampuan oratoris kharismatik yang mampu mempersatukan, juru penengah, dan memanipulasi simbol-simbol sehingga dapat mengendalikan massa.
- 3. Hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam pengambilan keputusan politik.**

Di negara dengan sistem politik demokrasi, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik mempunyai hubungan yang selaras dan seimbang, dalam menentukan kebijakan umum. Infrastruktur berfungsi sebagai sarana masukan (input) yang berwujud pernyataan, keinginan-keinginan dan tuntutan masyarakat, sedangkan suprastruktur politik yaitu pemerintah dalam arti luas berfungsi sebagai output dalam hal menentukan public policy yang berwujud keputusan-keputusan politik sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat.

## II. INSTRUMEN PENILAIAN

1. Penilaian sikap Spiritual dan Sosial

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam Observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia, perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang dinilai yaitu kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

**Pedoman Pengamatan Sikap Spiritual dan Sosial**

Kelas : .....

Hari, Tanggal : .....

Pertemuan Ke- : .....

Materi Pokok : .....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian					
		Bersyukur	Berdoa	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab	Peduli

**2. Penilaian Keterampilan**

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik pada saat menyajikan hasil wilayah Indonesia, penduduk dan warganegara, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan berdasarkan UUD 1945.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/ Argumentasi				Memberi Masukan/Saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Keterangan: diisi dengan tanda cek (V)

Kategori Penilaian :

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

**Rumus :**

**Skor Perolehan**

**Nilai = ----- X 100**

**12**

**\*Pedoman Penskoran (rubrik)**

No	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan Menjawab Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Kemampuan Memberi Masukan	Skor 4, apabila selalu memberi masukan/saran Skor 3, apabila sering memberi masukan/saran Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan/saran Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan/ saran

### 3. Penilaian Pengetahuan

Penilaian Pengetahuan : Pertanyaan lisan sesuai IPK dan pertanyaan yang berkembang dalam pembelajaran. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan menilai hasil penugasan yaitu

Tugas Kelompok 3.1

#### **Tugas Kelompok**

1. Buatlah kelompok dengan jumlah anggota 5-6 siswa

2. Bersama teman sekelompok, identifikasikan contoh peranan dan masalah yang dihadapi infrastruktur politik di Indonesia, kemudian masukkan ke dalam kolom berikut :

No	Infrastruktur Politik di Indonesia	Contoh Peranan

## KUNCI JAWABAN TUGAS KELOMPOK

No	Infrastruktur Politik di Indonesia	Contoh Peranan
1	Partai Politik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau <i>out out</i> pada umumnya.</li><li>• Berusaha melakukan pengawasan, bahkan bila perlu oposisi terhadap kelakuan, tindakan, kebijakan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada di tangan partai politik yang bersangkutan)</li><li>• Berperan untuk menyerap tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat dicerna dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas.</li></ul>
2.	Kelompok Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kelompok kepentingan memberikan input yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Input yang mereka berikan bertujuan agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuat keputusan dan agar mendapat output yang sesuai dengan tuntutan mereka.</li><li>• Peran dan saluran-saluran yang digunakan kelompok kepentingan ini berbeda di setiap negara, mereka melakukan peranannya sesuai dengan tujuan yang mereka ingin capai, demikian pula dengan saluran-saluran yang mereka</li></ul>

		<p>gunakan. Satu saluran yang dianggap efektif bagi satu kelompok kepentingan belum tentu efektif bagi yang lain.</p>
3.	Kelompok Penekan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok ini melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain. Dengan tujuan membuat perpolitikan maju.</li> <li>• Kelompok penekan juga dapat memengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara-cara persuasi, propaganda, atau cara lain yang lebih efektif. Mereka antara lain : industriawan dan asosiasi-asosiasi lainnya.</li> <li>• Salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah.</li> </ul>
4.	Alat Komunikasi Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu pembentukan memori publik melalui penyampaian informasi yang menambah pengetahuan masyarakat.</li> <li>• Membantu menyusun agenda kehidupan yang berhubungan dengan politik dan kepentingan umum.</li> <li>• Membantu berhubungan dengan kelompok diluar dirinya (media menjadi mediasi antara aktor politik dengan aktor politik lainnya). Media dalam hal ini menjadi fasilitator.</li> <li>• Membantu menyosialisasikan pribadi seseorang, termasuk nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tersebut.</li> <li>• Membujuk khalayak untuk menemukan kelebihan dari pesan-pesan politik yang diterima.</li> </ul>

5.	Tokoh Politik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tokoh politik khususnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mempunyai peranan bagi masyarakat. Peranan itu yaitu menyaurkan aspirasi atau suara rakyat. Anggota DPR harus mengetahui untuk apa mereka dipilih, yang tidak lain agar suara rakyat dapat tersalurkan dalam rangka penyelenggaraan negara.</li></ul>
----	---------------	--

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMA Negeri 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	: X / Gasal
Materi Pokok	: Lembaga - Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945
Alokasi Waktu	: 2 X 45 Menit (1 Pertemuan)

---

### A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

## B. Kompetensi Dasar ( KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD)		Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	
1.3.	Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa.	1.3.1	Membangun nilai-nilai disiplin atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
		1.3.2	Membangun nilai-nilai tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
2.3.	Mengorganisasikan nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.	2.3.1	Membangun nilai-nilai disiplin tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
		2.3.2	Membangun nilai-nilai tanggung jawab tentang lembaga-lembaga negara menuurt Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
3.3.	Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menuurt Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.	3.3.1	Mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia
		3.3.2	<b>Mengidentifikasi lembaga-lembaga negara RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.</b>
		3.3.3	Menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik
		3.3.4	Menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI

4.3.	Menunjukkan ancaman-ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	4.3.1	Menyajikan hasil identifikasi tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
		4.3.2	Mengkomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

#### 1. Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial

Setelah mengikuti pelajaran peserta didik diharapkan mampu :

- a. Melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari materi tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Menampilkan sikap kerjasama terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Menampilkan sikap tanggung jawab terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 2. Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik diharapkan dapat :

- a. Mengidentifikasi lembaga-lembaga negara RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945

- b. Mengidentifikasi Fungsi lembaga-lembaga negara republik Indonesia menurut UUD 1945
- c. Mengidentifikasi Wewenang lembaga-lembaga negara republik Indonesia menurut UUD 1945
- d. Mengkomunikasikan hasil identifikasi tentang wewenang lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen.

**D. MATERI PEMBELAJARAN : FAKTA, KONSEP, PRINSIP, PROSEDUR**

1. Fakta

- a. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.
- b. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Lembaga-Lembaga Negara RI**
- c. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang *impeachment* dalam ketatanegaraan RI.
- d. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang tata kelola pemerintahan yang baik.
- e. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang kurangnya partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.

2. Konsep

- a. Konsep/pengertian tentang Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.
- b. Konsep/pengertian tentang Lembaga-Lembaga Negara RI**
- c. Konsep/pengertian tentang tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara RI**
- d. Konsep/pengertian tentang tata kelola pemerintahan yang baik.
- e. Konsep/pengertian tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.

3. Prinsip

- a. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.
- b. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lembaga-Lembaga Negara RI**
- c. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *impeachment* dalam ketatanegaraan RI.

- d. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik
- f. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.

4. Prosedur

- a. Prosedur atau tata cara dalam proses demokrasi yang merupakan bagian dalam sistem politik Indonesia
- b. Prosedur atau tata cara dalam proses pemilihan ketua lembaga-lembaga Negara RI**

**E. METODE PEMBELAJARAN**

Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam materi pembelajaran “Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika” adalah :

- 1. Metode : *Scientific Learning*
- 2. Strategi : Ceramah, Tanya-Jawab *Klasikal*, *Matching Game* (permainan mencocokkan), dan Tugas Kelompok.

**F. Media dan bahan**

- 1. Media
  - a. *Power point* tentang skema susunan beserta tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara.
  - b. *Matching Game* tentang tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara
- 2. Alat/Bahan
  - a. LCD, *Proyektor*
  - b. Laptop
  - c. *White board*
  - d. Spidol
  - e. Kertas (Karton, HVS Berwarna)
  - f. Bolpoin

## G. Sumber belajar

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946.
- d. Tim Penyusun. *Modul Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1*. Jawa Ttengah : Viva Pakarindo.

## H. LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN:

Kegiatan Belajar	Waktu
<p><b>a. Kegiatan Pendahuluan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta didik mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan memperhatikan kebersihan dan kerapihan kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar seperti buku paket, alat serta media pembelajaran yang diperlukan, kemudian berdoa bersama, guru menanyakan kehadiran peserta didik dengan presensi.</li><li>2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik</li><li>3. Guru bersama peserta didik melakukan <i>apersepsi</i> melalui tanya jawab <i>klasikal</i> mengaitkan kembali materi “Sistem politik di Indonesia : Suprastruktur dan Infrastruktur politik” dengan materi yang akan dibahas yaitu tentang “Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945”.</li><li>4. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang materi pokok pembelajaran yang akan dipelajari, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan</li></ol>	10’

<p>tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yakni “Lembaga- Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945”.</p> <p>5. Guru menyampaikan lingkup penilaian dan tehnik penilaian yang akan digunakan.</p>	
<p><b>b. Kegiatan inti</b></p> <p><b>1. Mengamati</b></p> <p>a. Guru menampilkan materi terkait fakta &amp; konsep sistem politik di Indonesia pada <i>Wall Screen</i> mengenai Lembaga- Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945.</p> <p>b. Guru menjelaskan susunan dan kedudukan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945 beserta tugas dan wewenangnya.</p> <p>c. Peserta didik dengan bimbingan guru mengamati gambar tentang skema lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945, kemudian mengidentifikasi tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara RI.</p> <p>d. Guru mengamati keterampilan peserta didik dalam mengamati skema susunan dan kedudukan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945.</p> <p><b>2. Menanya</b></p> <p>a. Guru bertanya kepada peserta didik, seperti : mengapa kita sebagai warga negara perlu mengetahui tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia ?</p> <p>b. Guru bersama dengan peserta didik melakukan tanya jawab <i>klasikal</i> berkenaan dengan tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD 1945.</p> <p><b>3. Mengumpulkan Informasi</b></p> <p>a. Peserta didik mengumpulkan informasi melalui <i>Matching Game</i> dengan diarahkan oleh guru.</p> <p>b. Peserta didik membentuk kelompok (8 kelompok : berdasarkan <i>Matching Game</i> yang sudah dilakukan oleh siswa)</p>	70'

<p>c. Peserta didik secara berkelompok menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.</p> <p>d. Peserta didik mengumpulkan informasi melalui internet atau sumber lain secara berkelompok.</p> <p><b>4. Mengasosiasi</b></p> <p>a. Peserta didik diberikan waktu oleh guru untuk berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada <i>lembar diskusi kelompok</i>.</p> <p>b. Guru mengamati peserta didik dalam melakukan tugas diskusi kelompok</p> <p>c. Peserta didik secara berkelompok menyusun laporan hasil diskusi secara tertulis pada <i>lembar diskusi kelompok</i>.</p> <p>d. Guru membimbing peserta didik dalam menyusun laporan hasil diskusi kelompok.</p> <p><b>5. Mengkomunikasikan</b></p> <p>a. Guru membimbing setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.</p> <p>b. Peserta didik secara bergiliran diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya</p> <p>c. Guru bersama peserta didik memberikan <i>apresiasi</i> dengan bertepuk tangan, guru memberikan klarifikasi dan umpan balik, serta penguatan hasil diskusi peserta didik.</p>	
<p><b>c. Penutup</b></p> <p>1. Peserta didik secara aktif menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya-jawab <i>klasikal</i> dengan dibimbing oleh guru.</p> <p>2. Peserta didik membuat <i>refleksi</i> atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan dengan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara.</p> <p>3. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami.</p> <p>4. Guru melakukan <i>evaluasi</i> dengan memberikan pertanyaan secara lisan terkait materi yang telah disampaikan yaitu tentang fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara.</p>	10'

5. Guru memberitahukan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya yaitu KD 3.3. tentang “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”.	
6. Mengajak peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing.	

## I. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

### 1. Teknik penilaian

#### a. Penilaian Sikap Spiritual

No .	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran ( <i>assessment for and of learning</i> )

#### b. Penilaian Sikap Sosial

No .	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Penilaian diri	Lembar penilaian antar teman	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran usai	Penilaian sebagai pembelajaran ( <i>assessment as learning</i> )

#### c. Penilaian Pengetahuan

No .	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Tertulis	Pertanyaan (tertulis) dengan soal pilihan ganda	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran selesai	Penilaian untuk pembelajaran ( <i>assessment for learning</i> )
2	Penugasan	Tugas berbentk diskusi kelompok	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk pembelajaran ( <i>assessment for learning</i> )

d. Penilaian Keterampilan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Praktik	Tugas (keterampilan)	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk, sebagai, dan/atau pencapaian pembelajaran ( <i>assessment for, of, and of learning</i> )

Yogyakarta, 11 Oktober 2017

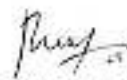
Mengotahui  
Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



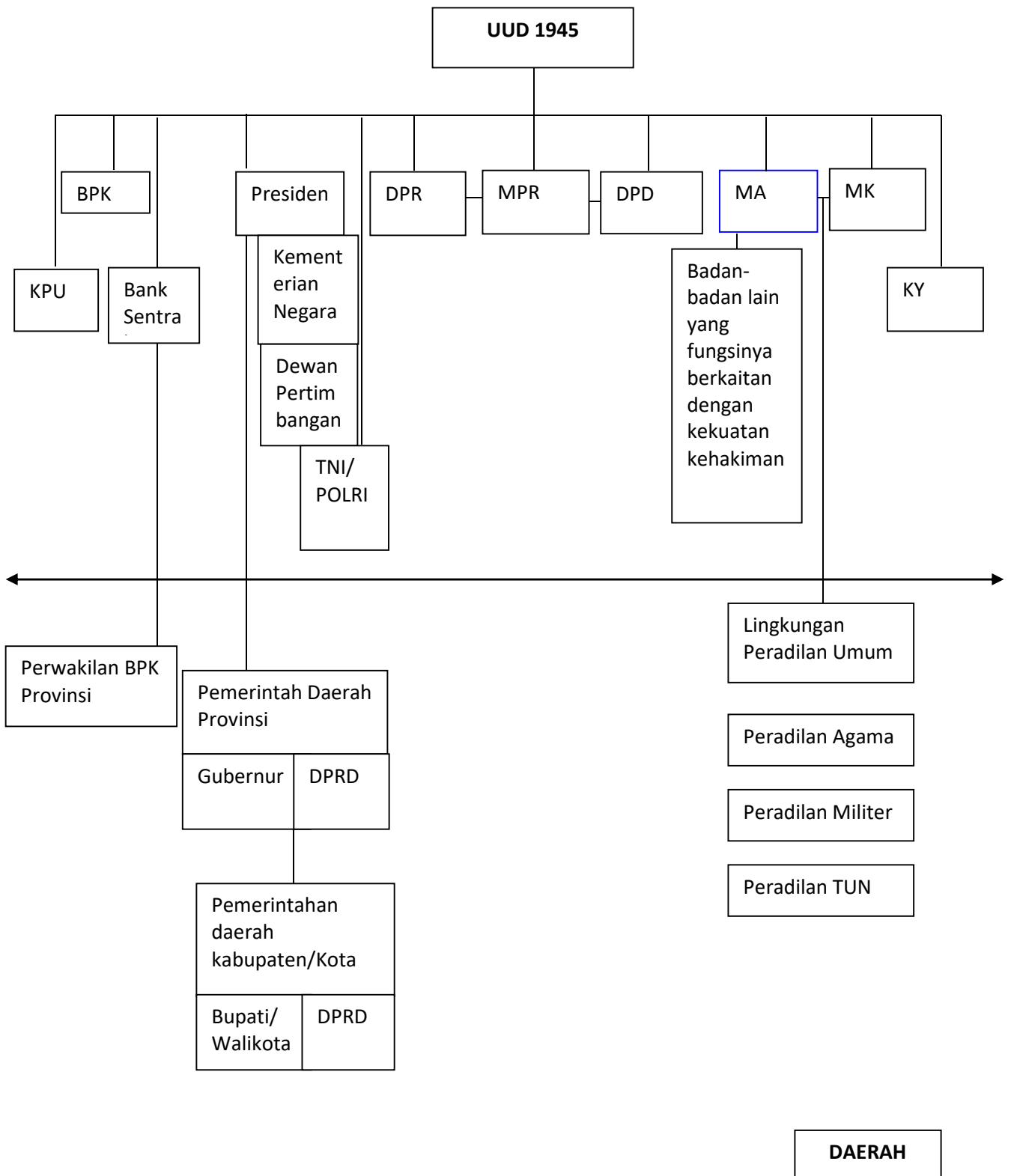
Rahayu Setyaningsih

NIM.14401241003

# LAMPIRAN

# I. MATERI PEMBELAJARAN

## Lembaga-Lembaga Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Secara garis besar berdasarkan UUD 1945 tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut.

### **1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

- a. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945).
- b. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4x jumlah provinsi anggota DPD (UU Nomor 22 tahun 2003).
- c. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara.
- d. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- e. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

### **2. Presiden**

- a. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- c. Kekuasaan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945.
  - 1) Membuat Undang-Undang bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20)
  - 2) Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2))
  - 3) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (Pasal 10)
  - 4) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR (Pasal 11)
  - 5) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
  - 6) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13)
  - 7) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat (1))
  - 8) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2))
  - 9) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)

- 10) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden (Pasal 16)
- 11) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17)
- 12) Mengajukan RUU APBN (Pasal 23)

### **3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

- a. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20 A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- d. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas (Pasal 20 A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

### **4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

- a. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

### **5. Mahkamah Agung (MA)**

- a. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- b. MA membawahi peradilan di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

### **6. Mahkamah Konstitusi**

- a. Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan :
  - 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI Tahun 1945

- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
  - 3) Memutus pembubaran partai politik.
  - 4) Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)
  - 5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan orang, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR dan tiga anggota diajukan Presiden.

#### **7. Komisi Yudisial (KY)**

- a. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR (Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).
- b. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

#### **8. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

- a. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi.
- b. DPD merupakan wakil-wakil provinsi.
- c. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (UU Nomor 22 tahun 2003).
- d. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.

## II. INSTRUMEN PENILAIAN

### 1. Penilaian sikap Spiritual dan Sosial

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam Observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia, perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang dinilai yaitu kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

#### Pedoman Pengamatan Sikap Spiritual dan Sosial

Kelas : .....

Hari, Tanggal : .....

Pertemuan Ke- : .....

Materi Pokok : .....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian					
		Bersyukur	Berdoa	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab	Peduli

### 2. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik pada saat menyajikan hasil wilayah Indonesia, penduduk dan warganegara, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan berdasarkan UUD 1945.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/ Argumentasi				Memberi Masukan/Saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Keterangan: diisi dengan tanda cek (V)

Kategori Penilaian :

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

**Rumus :**

**Skor Perolehan**

**Nilai = ----- X 100**

**12**

**\*Pedoman Penskoran (rubrik)**

No	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan Menjawab Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Kemampuan Memberi Masukan	Skor 4, apabila selalu memberi masukan/saran Skor 3, apabila sering memberi masukan/saran Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan/saran Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan/ saran

### 3. Penilaian Pengetahuan

Penilaian Pengetahuan : Pertanyaan lisan sesuai IPK dan pertanyaan yang berkembang dalam pembelajaran. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan menilai hasil penugasan yaitu Tugas Kelompok 3.2.

#### *Matching Game*

**(Permainan Mencocokkan)**

Lembaga – Lembaga Negara

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	PRESIDEN
--	-------------------------------------	-------------------------------------	----------

Mahkamah Agung (MA)	Mahkamah Konstitusi (MK)	Komisi Yudisial (KY)	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
------------------------	--------------------------------	-------------------------	---

Tugas Dan Wewenang :

1. MPR
  - a. Mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar
  - b. Melantik presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilu dalam sidang paripurna MPR
  - c. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
2. DPR
  - a. Membentuk undang-undnag yang dibahas bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
  - b. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota KY.
  - c. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan anggota DPD.
  - d. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta dari negara lain, serta memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi.
  - e. Memberikan persetujuan kepada presiden dalam hal menyatakan perang, serta membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
3. DPD
 

Mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah , hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
4. Presiden
  - a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
  - b. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, serta membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
  - c. Menyatakan keadaan bahay.
5. MA
  - a. Kekuasaan dan permohonan kasasi (tingkat banding akhir)

- b. Memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk pemberian atau penolakan grasi dan rehabilitasi.
  - c. Mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan pengadilan.
6. MK
- a. Mengadili pada tingkat pertama yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945
  - b. Memutuskan pembubaran partai politik
  - c. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
7. KY
- a. Membantu pengembangan sistem pendidikan untuk peningkatan kapasitas kualitas hakim.
  - b. Merekomendasikan promosi dan mutasi hakim
  - c. Menjaga kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.
8. BPK
- a. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
  - b. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

**TUGAS KELOMPOK**

No	Sistem Pemerintahan Republik Indonesia	
1	Landasan Hukum Lembaga Negara Di Indonesia	..... ..... .....
2	Penjabaran Trias Politika dalam sistem pemerintahan RI	1. Legislatif ..... ..... ..... 2. Eksekutif ..... ..... ..... 3. Yudikatif ..... ..... .....
3	Lembaga Negara (MPR, DPR, DPD, Presiden, MK, MA, KY,BPK)	Tugas dan Wewenang menurut UUD 1945 (Disertai Pasal dalam UUD 1945) ..... ..... ..... ..... Apakah lembaga tersebut mempunyai Hak Istimewa ? (jika ada jelaskan) ..... ..... .....

**KUNCI JAWABAN TUGAS KELOMPOK**

No	Nama Lembaga Negara	Dasar Hukum	Tugas dan Wewenang
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	Pasal 2 UUD 1945 & Pasal 3 UUD 1945	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengubah serta menetapkan UUD.</li> <li>b. Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR.</li> <li>c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.</li> <li>d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.</li> <li>e. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.</li> <li>f. Memilih Presiden serta Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden serta wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden serta wakil presidennya meraih suaraterbanyak pertama serta kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari.</li> <li>g. Menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR.</li> </ul>

2	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, Pasal 22D ayat (3) UUD 1945, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, Pasal 24B ayat (3) UUD 1945, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, Pasal 11 ayat (2) UUD 1945	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama</li> <li>b. Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang.</li> <li>c. Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD</li> <li>d. Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan RUU yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I</li> <li>e. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat</li> </ul>
3	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	Pasal 22D ayat (1), (2), (3) UUD 1945, Pasal 23F ayat (1) UUD 1945	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.</li> <li>b. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama</li> </ul>

			<p>c. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.</p> <p>e. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN</p>
4	Presiden	<p>Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUD 1945), Pasal 11 ayat (1) UUD 1945, Pasal 12 UUD 1945, Pasal 13 ayat (1) UUD 1945, Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 15 UUD 1945, Pasal 16 UUD 1945, Pasal 17 ayat 2 UUD 1945,</p>	<p>a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD</p> <p>b. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU)</p> <p>c. Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.</p> <p>d. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa)</p> <p>e. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri</p> <p>f. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR</p> <p>g. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR</p> <p>h. Menyatakan keadaan bahaya</p>

		<p>Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mengangkat duta dan konsultan. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR</li> <li>j. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.</li> <li>k. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung</li> <li>l. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR</li> <li>m. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU</li> <li>n. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)</li> <li>o. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) dan disetujui DPR</li> <li>p. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung</li> <li>q. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.</li> </ul>
5	Mahkamah Agung (MA)	<p>Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadili pada tingkat kasasi</li> <li>b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang</li> <li>c. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi.</li> <li>d. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi</li> </ul>
6	Mahkamah Konstitusi (MK)	<p>Pasal 24C ayat (1) dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap</li> </ul>

		(2) UUD 1945	<p>Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.</p> <p>b. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.</p> <p>c. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.</p> <p>d. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.</p> <p>e. Memutus pembubaran partai politik</p> <p>f. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.</p>
7	Komisi Yudisial (KY)	Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945	<p>a. Mengawasi perilaku hakim</p> <p>b. Mengusulkan nama calon hakim agung.</p>
8	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Pasal 23E, 23F, 23G Undang-undang dasar 1945.	<p>a. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.</p> <p>b. Mengintegrasikan peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.</p>

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMA Negeri 11 Yogyakarta  
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Kelas/Semester : X / Gasal  
Materi Pokok : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik  
Alokasi Waktu : 2 X 45 Menit (1 Pertemuan)

---

### A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli(gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

### B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD)		Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	
1.3.	Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa.	1.3.1	Membangun nilai-nilai disiplin atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
		1.3.2	Membangun nilai-nilai tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.3.	Mengorganisasikan nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	2.3.1	Membangun nilai-nilai disiplin tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
		2.3.2	Membangun nilai-nilai tanggung jawab tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.3.	Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	3.3.1	Mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia
		3.3.2	Mengidentifikasi lembaga-lembaga negara RI menurut Undang-Undang Dasar Negara

		3.3.3	Republik Indonesia Tahun1945.
		3.3.4	<b>Menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik</b>  <b>Menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI</b>
4.3.	Menunjukkan ancaman-ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	4.3.1	Menyajikan hasil identifikasi tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
		4.3.2	Mengkomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

#### 1. Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial

Setelah mengikuti pelajaran peserta didik diharapkan mampu :

- a. Melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik.
- b. Menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari materi tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik.
- c. Menampilkan sikap kerjasama terkait Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik
- d. Menampilkan sikap tanggung jawab terkait tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik

## 2. Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik diharapkan dapat :

- a. Mengidentifikasi pengertian *good governance*
- b. Mengidentifikasi unsur-unsur pokok yang bersifat sinergis dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
- c. Mengidentifikasi karakteristik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
- e. Mengidentifikasi persyaratan dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
- f. Mengidentifikasi hubungan antara Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan struktur pemerintahan.
- g. Mengidentifikasi pengertian dan piramida partisipasi politik.
- h. Mengkomunikasikan hasil identifikasi tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik.

## D. MATERI PEMBELAJARAN : FAKTA, KONSEP, PRINSIP, PROSEDUR

### 1. Fakta

- a. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.
- b. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Lembaga-Lembaga Negara RI
- c. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang *impeachment* dalam ketatanegaraan RI.
- d. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang tata kelola pemerintahan yang baik.
- e. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang kurangnya partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.

### 2. Konsep

- a. Konsep/pengertian tentang Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.
- b. Konsep/pengertian tentang Lembaga-Lembaga Negara RI
- c. Konsep/pengertian tentang tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara RI
- d. Konsep/pengertian tentang tata kelola pemerintahan yang baik.
- e. Konsep/pengertian tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.

### 3. Prinsip

- a. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.
  - b. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lembaga-Lembaga Negara RI
  - c. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *impeachment* dalam ketatanegaraan RI.
  - d. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik
  - f. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.
4. Prosedur
- a. Prosedur atau tata cara dalam proses demokrasi yang merupakan bagian dalam sistem politik Indonesia
  - b. Prosedur atau tata cara dalam proses pemilihan ketua lembaga-lembaga Negara RI.

#### **E. METODE PEMBELAJARAN**

Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam materi pembelajaran “Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika” adalah :

- 1. Metode : *Scientific Learning*
- 2. Strategi : Ceramah, Tanya-Jawab *Klasikal*, Video, dan Tugas Individu.

#### **F. Media dan bahan**

- 1. Media
  - a. *Power point* tentang konsep dari tata kelola pemerintahan yang baik (yang meliputi pengertian, ciri-ciri, karakteristik dan syarat-syarat) dan partisipasi politik (yang meliputi pengertian, bentuk, dan piramida partisipasi politik).
  - b. Video tentang *Good Governance* dan Partisipasi Politik
- 2. Alat/Bahan
  - a. LCD, *Proyektor*
  - b. Laptop
  - c. *White board*
  - d. Spidol
  - e. Kertas HVS
  - f. Bolpoin

## **G. Sumber belajar**

- a. Cholisin. 2013. *Ilmu Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Ombak.
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946.
- e. Taniredja, Tukiran. 2012. *Tiga Undang-Undang Dasar di Indonesia*. Bandung : Alfabeta.
- f. Tim Penyusun. *Modul Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester I*. Jawa Ttengah : Viva Pakarindo.

## H. LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN:

Kegiatan Belajar	Waktu
<p><b>a. Kegiatan Pendahuluan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta didik mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan memperhatikan kebersihan dan kerapihan kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar seperti buku paket, alat serta media pembelajaran yang diperlukan, kemudian berdoa bersama, guru menanyakan kehadiran peserta didik dengan presensi.</li><li>2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik</li><li>3. Guru bersama peserta didik melakukan <i>apersepsi</i> melalui tanya jawab <i>klasikal</i> mengaitkan kembali materi “Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945” dengan materi yang akan dibahas yaitu tentang “Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dan Partisipasi Politik”.</li><li>4. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang materi pokok pembelajaran yang akan dipelajari, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yakni “Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dan Partisipasi Politik”.</li><li>5. Guru menyampaikan lingkup penilaian dan tehnik penilaian yang akan digunakan.</li></ol>	10’
<p><b>b. Kegiatan inti</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Mengamati</b><ol style="list-style-type: none"><li>a. Guru menampilkan materi terkait fakta &amp; konsep mengenai Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dan Partisipasi Politik pada <i>Wall Screen</i>.</li><li>b. Guru menjelaskan konsep, ciri-ciri/karakteristik dan syarat-syarat tata kelola pemerintahan yang baik. Serta menjelaskan konsep dan piramida partisipasi politik.</li><li>c. Peserta didik dengan bimbingan guru mengamati video terkait Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dan Partisipasi Politik, kemudian mengidentifikasi bagaimana Tata Kelola</li></ol></li></ol>	70’

Pemerintahan Yang baik serta peran warga negara dalam sistem politik.

- d. Guru mengamati keterampilan peserta didik dalam mengamati video yang ditampilkan oleh guru terkait Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dan Partisipasi Politik.

## **2. Menanya**

- a. Guru bertanya kepada peserta didik, seperti : mengapa dalam suatu negara diperlukan partisipasi politik ?
- b. Guru bersama dengan peserta didik melakukan tanya jawab *klasikal* berkenaan dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dan Partisipasi Politik.

## **3. Mengumpulkan Informasi**

- a. Peserta didik mengumpulkan informasi melalui pengamatan video dengan diarahkan oleh guru.
- b. Peserta didik secara individu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.
- c. Peserta didik mengumpulkan informasi melalui internet atau sumber lain secara individu.

## **4. Mengasosiasi**

- a. Peserta didik diberikan waktu oleh guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada *lembar tugas siswa*.
- b. Guru mengamati peserta didik dalam mengerjakan tugas.
- c. Peserta didik menyusun laporan hasil analisis secara tertulis pada *lembar diskusi siswa*.
- d. Guru membimbing peserta didik dalam menyusun laporan hasil diskusi.

## **5. Mengkomunikasikan**

- a. Guru membimbing siswa secara perwakilan kelas (3 siswa) untuk mempresentasikan hasil analisisnya.
- b. Peserta didik secara bergiliran diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya
- c. Guru bersama peserta didik memberikan *apresiasi* dengan bertepuk tangan, guru memberikan klarifikasi dan umpan balik, serta penguatan hasil diskusi peserta didik.

<p><b>c. Penutup</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik secara aktif menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya-jawab <i>klasikal</i> dengan dibimbing oleh guru.</li> <li>2. Peserta didik membuat <i>refleksi</i> atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi politik.</li> <li>3. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami.</li> <li>4. Guru melakukan <i>evaluasi</i> dengan memberikan pertanyaan secara lisan terkait materi yang telah disampaikan yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi politik.</li> <li>5. Guru memberitahukan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya yaitu KD 3.4. tentang “Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.</li> <li>6. Mengajak peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing.</li> </ol>	10’
--	-----

## I. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

1. Teknik Penilaian :
  - a. Penilaian Sikap : Observasi/Pengamatan
  - b. Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis dan Lisan
  - c. Penilaian Keterampilan : Unjuk Kerja ; Presentasi ; Laporan Penugasan
2. Bentuk Penilaian :
  - a. Observasi : Jurnal Guru
  - b. Tes Tertulis : Uraian
  - c. Unjuk Kerja : Laporan ; Paparan

3. Instrumen Penilaian Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan (Terlampir)

Yogyakarta, 18 Oktober 2017

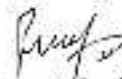
Mengetahui  
Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200504 2 005

Mahasiswa PLT



Rahayu Setyaningsih

NIM.14401241003

# LAMPIRAN

Sekolah	: SMA N 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ( PPKn)
Kelas / Semester	: X / 1 (Satu)
Materi Pokok	: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit

## I. MATERI PEMBELAJARAN

### A. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Menurut World Bank, *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat sinergis.

1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu.
2. Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik.
3. Unsur warga masyarakat (*stakeholders*).

Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

Menurut Laode Ida (2002), tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut.

- a. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi.

- b. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan *output* yang berkualitas.
- c. Proses penguatan diri sendiri (*self enforcing process*), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
- d. Keseimbangan kekuatan (*balance of force*), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama.
- e. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut.

- 1) Hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar.
- 2) Hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat.
- 3) Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- 4) Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat birokrat). Misalnya, mengadakan pertemuan atau rembung antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat atau politisi.
- 5) Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan.
- 6) Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang (RUU).
- 7) Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerja sama di segala bidang untuk kemajuan bangsa.

Untuk mengimplementasikan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut.

- a) Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan

administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.

- b) Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c) Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundangundangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.
- d) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM.
- e) Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (*rights to information*) keputusan pemerintah terjamin.

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat.

## **B. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia**

Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh **Verba**, yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang

harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik.

Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah.
2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat.
3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan.
4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat.
5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja.
6. Dapat menerima perbedaan pendapat.
7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa.
8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya.
9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan.
10. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara.
11. Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum.
12. Membangun budaya politik yang demokratis.
13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan.
14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik.
15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air.

Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara, dalam bentuk institusi formal (DPR) ataupun informal (partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan).

Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

**a. Di Lingkungan Sekolah**

Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- 1) Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.
- 2) Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti.
- 3) Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.

Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung siswa dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya.

Supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuanketentuan atau norma-norma sebagai berikut.

- 1) Pancasila.
- 2) Undang-Undang Dasar RI 1945.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 4) Tata tertib siswa, dan sebagainya.

**b. Di Lingkungan Masyarakat**

Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut.

- 1) Forum warga.
- 2) Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya.
- 3) Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya.

Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma sebagai berikut.

- 1) Pancasila dan UUD RI 1945.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang HAM, undang-undang parpai politik dan sebagainya.
- 3) Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT-RW, Peraturan Desa dan sebagainya.
- 4) Norma-norma sosial yang berlaku.

### **c. Di Lingkungan Negara**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.
- 2) Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).
- 3) Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun.

Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut.

- 1) Pancasila.
- 2) UUD NRI 1945.
- 3) Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan sebagainya.
- 4) Peraturan Pemerintah.
- 5) Keputusan Presiden.
- 6) Peraturan daerah.

Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

### **Piramida Partai Politik**



## II. INSTRUMEN PENILAIAN

### 1. Penilaian sikap Spiritual dan Sosial

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam Observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik. Aspek yang dinilai yaitu kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi serta menjawab pertanyaan.

#### Pedoman Pengamatan Sikap Spiritual dan Sosial

Kelas : .....

Hari, Tanggal : .....

Pertemuan Ke- : .....

Materi Pokok : .....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian					
		Bersyukur	Berdoa	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab	Peduli

### 2. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik pada saat menyajikan hasil analisis terhadap video yang ditayangkan oleh guru yakni mengenai Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/ Argumentasi				Memberi Masukan/Saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Keterangan: diisi dengan tanda cek (V)

Kategori Penilaian :

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

**Rumus :**

**Skor Perolehan**

**Nilai = ----- X 100**

**12**

**\*Pedoman Penskoran (rubrik)**

No	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan Menjawab Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Kemampuan Memberi Masukan	Skor 4, apabila selalu memberi masukan/saran Skor 3, apabila sering memberi masukan/saran Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan/saran Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan/ saran

### 3. Penilaian Pengetahuan

Penilaian Pengetahuan : Pertanyaan lisan sesuai IPK dan pertanyaan yang berkembang dalam pembelajaran 3.3

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan menilai hasil penugasan yaitu Tugas Individu yang diberikan kepada peserta didik.

- Penyekoran tugas individu 3.3
- Soal nomor -5 masing-masing skornya 2 sehingga skor maksimal/ skor tertinggi adalah 10.

Skor Perolehan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{10} \times 100$$

**Soal Pengetahuan**

**Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat!**

1. Jelaskan yang dimaksud dengan *good governance*, menurut anda !

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Analisislah hubungan antara pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik !

.....  
.....  
.....  
.....

3. Analisislah bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesetaraan/kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik !

.....  
.....  
.....  
.....

4. Berikan alasan bahwa Partisipasi Warga Negara sangat penting keberadaannya dalam Sistem Politik di Indonesia !

.....  
.....  
.....  
.....

5. Jelaskan pengertian kesadaran politik dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *good governance* !

.....  
.....  
.....  
.....



## Kunci Jawaban

No	Jawaban	Skor
1.	<p>Yang dimaksud dengan <i>good governance</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan <i>legal and political framework</i> bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.</li></ul>	2
2	<p>Hubungan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sebagai negara yang menganut bentuk kekuasaan demokrasi. Maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar seperti disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik. Dengan <i>good governance</i> akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Dengan memiliki praktik <i>good governance</i> yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga (Dwiyanto, 2005).</li></ul>	2
3.	<p>Semua lapisan masyarakat memiliki kesetaraan/kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan public :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam</li></ul>	2

	<p>elayanan publik serta mempertegas pemenuhan pelayanan publik bagi warga negara.</p>	
3.	<p>Semua lapisan masyarakat memiliki kesetaraan/kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan public :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesetaraan/kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, <i>leaflet</i>, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi</li> </ul>	2
4.	<p>Partisipasi Warga Negara sangat penting keberadaannya dalam Sistem Politik di Indonesia :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud</li> </ul>	2

	<p>untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.</p>	
5.	<p>Pengertian kesadaran politik dalam pelayanan publik untuk mewujudkan <i>good governance</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Politik adalah sebuah kesadaran yang harus dimiliki oleh warga negara tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara bagaimana bisa mensikapi masalah politik yang ada dilingkup kebijakan Negara dan Pemerintah.</li> </ul>	2

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMA Negeri 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	: X / Gasal
Materi Pokok	: Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Alokasi Waktu	: 2 X 45 Menit (1 Pertemuan)

---

---

### A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

## B. Kompetensi Dasar ( KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD)		Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	
1.4.	Menghormati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1.4.1	Membangun nilai-nilai proaktif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		1.4.2	Membangun nilai-nilai responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.4.	Menunjukkan nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2.4.1	Membangun nilai-nilai proaktif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		2.4.2	Membangun nilai-nilai responsif yang terkandung dalam hubungan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.4.	Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.4.1	<b>Menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</b>
		3.4.2	Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat

		3.4.3	Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah
		3.4.4	Menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
4.4.	Menyaji hasil analisis tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.4.1	Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
		4.4.2	<b>Mengkomunikasikan hasil telaah mengenai otonomi daerah dan otonomi khusus yang diberikan oleh suatu daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</b>

### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

#### 1. Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi

**Sikap Sosial** Setelah mengikuti pelajarpeserta didik diharapkan mampu :

- a. Melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran tentang Desentralisasi  
atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari materi tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Menampilkan sikap kerjasama terkait Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Menampilkan sikap tanggung jawab terkait Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan**

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik diharapkan dapat :

- a. Mengidentifikasi Pengertian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- b. Mengidentifikasi Pengertian Otonomi Daerah dalam konteks Negara Kesatuan
- c. Mengidentifikasi Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia
- d. Mengkomunikasikan Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia
- e. Mengidentifikasikan Tujuan Pemberian Otonomi kepada Daerah



## **D. MATERI PEMBELAJARAN : FAKTA, KONSEP, PRINSIP, PROSEDUR**

### 1. Fakta

- a. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
- c. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah

### 2. Konsep

- a. Konsep/pengertian tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Konsep/pengertian tentang Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
- c. Konsep/pengertian tentang Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah

### 3. Prinsip

- a. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

- c. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Prosedur
- a. Prosedur atau tata cara dalam proses Desentralisasi atau Otonomi Daerah
  - b. Prosedur atau tata cara dalam kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah
  - c. Prosedur atau tata cara dalam pemilihan kepala daerah

## **E. METODE PEMBELAJARAN**

Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam materi pembelajaran “Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI” adalah :

Metode : *Scientific Learning*

Strategi : Diskusi kelompok dengan model pembelajaran *Jigsaw*

## **F. Media dan bahan**

1. Media
  - a. *Power point* tentang desentralisasi dan otonomi daerah
  - b. Gambar tentang gambaran umum desentralisasi dan otonomi daerah
  - c. *Mind Mapping* Otonomi Khusus
2. Alat/Bahan
  - a. LCD, *Proyektor*
  - b. Laptop
  - c. *White board*
  - d. Spidol
  - e. Kertas berwarna
  - f. Bolpoin

### G. Sumber belajar

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Tim Penyusun. *Modul Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1*. Jawa Tengah : Viva Pakarindo.

### H. LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN:

Kegiatan Belajar	Waktu
------------------	-------

<p><b>a. Kegiatan Pendahuluan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan memperhatikan kebersihan dan kerapihan kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar seperti buku paket, alat serta media pembelajaran yang diperlukan, kemudian berdoa bersama, guru menanyakan kehadiran peserta didik dengan presensi.</li> <li>2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik</li> <li>3. Guru bersama peserta didik melakukan <i>apersepsi</i> melalui tanya jawab <i>klasikal</i> mengaitkan kembali materi “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan materi yang akan dibahas yaitu tentang “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”.</li> <li>4. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang materi pokok pembelajaran yang akan dipelajari, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yakni “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”.</li> <li>5. Guru menyampaikan lingkup penilaian dan tehnik penilaian yang akan digunakan.</li> </ol>	10"
<p><b>b. Kegiatan inti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Mengamati</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Guru menampilkan materi terkait fakta &amp; konsep desentralisasi/otonomi daerah di Indonesia pada <i>Wall Screen</i> mengenai Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara.</li> <li>b. Guru menjelaskan Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> </ol> </li> </ol>	70"

- c. Guru mengamati keterampilan peserta didik dalam mengamati Makna Otonomi Daerah di Indonesia.

## 2. Menanya

- a. Guru bertanya kepada peserta didik, seperti : Apa saja tujuan dikeluarnya kebijakan Otonomi Daerah ?
- b. Peserta didik bersama dengan guru melakukan dialog mendalam secara *klasikal* untuk mengungkapkan bagaimana tanggapan peserta didik berdasarkan hasil pengamatan terhadap video yang ditampilkan.
- c. Guru bersama dengan peserta didik melakukan tanya jawab *klasikal* berkenaan dengan otonomi daerah dan otonomi khusus

## 3. Mengumpulkan Informasi

- a. Peserta didik dibagi ke dalam kelompok (1 kelompok terdiri dari 6 peserta didik) yang disebut sebagai *kelompok asal* (kelompok otonomo daerah, otonomi khusus DKI, DIY, Papua, Nanggroe Aceh Darussalam)

**Kelompok Asal I** : Otonomi Daerah

**Kelompok Asal II** : Otonomi Khusus DKI

**Kelompok Asal III** : Otonomi Khusus DIY

**Kelompok Asal IV** : Otonomi Khusus Papua

**Kelompok Asal V** : Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam

- b. Peserta didik diberikan tugas dan materi yang berbeda untuk tiap anggota dalam 1 (satu) *kelompok asal* :

**Kelompok Ahli I** : What

**Kelompok Ahli II** : Why

**Kelompok Ahli III** : When

**Kelompok Ahli IV** : Where

**Kelompok Ahli V** : Who

**Kelompok Ahli VI** : How

## 4. Mengasosiasi

- a. Peserta didik dari kelompok yang berbeda (*kelompok asal*)

<p>berkelompok dengan kelompok baru (<i>kelompok ahli</i>).</p> <p>b. Peserta didik secara berkelompok (<i>kelompok ahli</i>) mengumpulkan informasi yang relevan atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru dengan membaca uraian materi pada Buku PPKn Kelas X Bab IV mengenai „Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI“. Serta bisa mencari dari referensi lain seperti internet.</p> <p>c. Guru mengamati peserta didik dalam melakukan diskusi <i>kelompok ahli</i>.</p> <p>d. Peserta didik secara mandiri dalam <i>kelompok ahli</i> menyusun laporan hasil diskusi secara tertulis.</p> <p>e. Guru membimbing peserta didik dalam menyusun laporan hasil diskusi <i>kelompok ahli</i>.</p> <p>f. Peserta didik dari <i>kelompok ahli</i> kembali berkelompok dengan <i>kelompok asal</i>, peserta didik secara bergantian melaporkan hasil diskusinya kepada teman 1(satu) <i>kelompok asal</i>.</p> <p>g. Peserta didik secara berkelompok dalam <i>kelompok asal</i> menyusun laporan hasil diskusi secara tertulis menggunakan media <i>Mind Mapping</i> (kertas disediakan oleh guru) berdasarkan informasi <i>ahli I, II, III, IV, V, VI</i>.</p> <p><b>5. Mengkomunikasikan</b></p> <p>a. Guru membimbing setiap <i>kelompok asal</i> untuk mempresentasikan hasil diskusi.</p> <p>b. Guru bersama peserta didik memberikan <i>apresiasi</i> dengan bertepuk tangan, guru memberikan klarifikasi dan umpan balik, serta penguatan hasil diskusi peserta didik..</p>	
<p><b>c. Penutup</b></p> <p>1. Peserta didik secara aktif menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya-jawab <i>klasikal</i> dengan dibimbing oleh guru.</p> <p>2. Peserta didik membuat <i>refleksi</i> atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan dengan Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	10**

<p>3. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami.</p> <p>4. Guru melakukan <i>evaluasi</i> dengan memberikan pertanyaan secara lisan terkait materi yang telah disampaikan yaitu tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>5. Guru memberitahukan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya yaitu KD 4.2. tentang “Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah”.</p> <p>6. Mengajak peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing.</p>	
--	--

## I. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

### 1. Teknik penilaian

#### a. Penilaian Sikap Spiritual

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran ( <i>assessment for and of learning</i> )

#### b. Penilaian Sikap Sosial

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Penilaian diri	Lembar penilaian antar teman	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran usai	Penilaian sebagai pembelajaran ( <i>assessment as learning</i> )

#### c. Penilaian Pengetahuan

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Tertulis	Pertanyaan (tertulis) dengan soal pilihan ganda	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran selesai	Penilaian untuk pembelajaran ( <i>assessment for learning</i> )
2	Penugasan	Tugas berbentk diskusi kelompok	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaraan berlangsung	Penilaian untuk pembelajaran ( <i>assessment for learning</i> )

d. Penilaian Keterampilan

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Praktik	Tugas (keterampilan)	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk, sebagai, dan/atau pencapaian pembelajaran ( <i>assessment for, as, and of learning</i> )

Yogyakarta, 30 Oktober 2017

Mengetahui  
Guru Pembimbing

Mahasiswa PLT

**Sulastri, S.Pd**  
NIP.19720926 200604 2 006

**Rahayu Setiyaningsih**  
NIM.14401241003

2	Penugasan	Tugas berbentuk diskusi kelompok	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk pembelajaran ( <i>assessment for learning</i> )
---	-----------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------	---

d. Penilaian Keterampilan

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Ceroh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Praktik	Tugas (keterampilan)	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk, sebagai, dan/atau pencapaian pembelajaran ( <i>assessment for, as, and of learning</i> )

Yogyakarta, 30 Oktober 2017.

Mengetahui

Guru Pembimbing

Sulastri, S.Pd  
NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT

Ratna Setyaningsih  
NIM.14401241003

# LAMPIRAN

Sekolah : SMA N 11 Yogyakarta  
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ( PPKn)

Kelas / Semester	: X / 1 (Satu)
Materi Pokok	: Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit

## I. MATERI PEMBELAJARAN

### A. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Desentralisasi

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *de* yang berarti lepas, dan *centerum* yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.

Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok *Anglo Saxon* dan *Kontinental*. Kelompok **Anglo Saxon** mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan *dekonsentrasi* maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut *devolusi*. *Devolusi* berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif.

Adapun Kelompok **Kontinental** membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.

Menurut ahli ilmu tata negara, dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.

Menurut Amran Muslimin (2009:120, desentralisasi dibedakan atas 3 (tiga) bagian.

- a. Desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
- b. Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani.
- c. Desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah.

Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat.
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien.
- c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.
- d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat.

- b. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
- c. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
- d. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
- e. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- f. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan.
- g. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
- h. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
- i. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi.
- j. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung.

Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
- b. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.
- c. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
- d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
- e. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

## **2. Otonomi Daerah**

Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli. Menurut H.M.

Agus Santoso, pengertian otonomi daerah di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. J. Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusanurusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya.
- b. J. Wajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.
- c. Ateng Syarifuddin, otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
- d. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi.

### **3. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan**

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya.

### **4. Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND).
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- j. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **5. Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia**

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :

- a. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (*Eenheidstaat*), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.
- b. Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial, yang bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Berkaitan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Dengan demikian, titik berat

pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten/kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut.

- 1) *Dimensi Politik*, kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim.
- 2) *Dimensi Administratif*, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.
- 3) Kabupaten/kota adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten/kota-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab dan dinamis.

- a. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah.
- b. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air.
- c. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.

Selain itu terdapat lima prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

### **1) Prinsip Kesatuan**

Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.

### **2) Prinsip Riil dan Tanggung Jawab**

Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah.

### **3) Prinsip Penyebaran**

Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya.

#### 4) Prinsip Keserasian

Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian.

#### 5) Prinsip Pemberdayaan

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunann dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

## II. INSTRUMEN PENILAIAN

### 1. Penilaian sikap Spiritual dan Sosial

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam Observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang dinilai

yaitu kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

#### Pedoman Pengamatan Sikap Spiritual dan Sosial

Kelas : .....

Hari,Tanggal : .....

Pertemuan Ke- : .....

Materi Pook : .....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian
----	--------------------	-----------------

		Bersyukur	Berdoa	Jujur	Disiplin	Tanggungjawab	Peduli

## 2. Penilaian Ketrampilan

Penilaian ketrampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik pada saat menyajikan hasil diskusi terkait otonomi daerah dan otonomi khusus negara kesatuan republik Indonesia.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/ Argumentasi				Memberi Masukan/Saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Keterangan: diisi dengan

tanda cek (V) Kategori

Penilaian :

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup,

1 = kurang **Rumus :**

$$\text{Skor Perolehan Nilai} = \frac{\text{—————}}{\text{—————}} \times 100 \quad 12$$

### \*Pedoman Penskoran (rubrik)

No	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadangbertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.

2	Kemampuan Menjawab Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Kemampuan Memberi Masukan	Skor 4, apabila selalu memberi masukan/saran Skor 3, apabila sering memberi masukan/saran Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan/saran Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan/ saran

### 3. Penilaian Pengetahuan

Penilaian Pengetahuan : Pertanyaan lisan sesuai IPK dan pertanyaan yang berkembang dalam pembelajaran. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan menilai hasil penugasan yaitu

Tugas Kelompok 4.1

#### LEMBAR DISKUSI KELOMPOK

Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan *kelompok ahli* kemudian laporkanlah hasil diskusi *kelompok ahli* kepada *kelompok asal*. Susunlah laporan hasil diskusi dari masing-masing ahli pada *kelompok asal* kemudian sajikanlah ke dalam *Mind Mapping* !

#### □ Kelompok Asal

**Kelompok Asal I** : Otonomi Daerah

**Kelompok Asal II** : Otonomi Khusus DKI **Kelompok Asal III** : Otonomi Khusus DIY

**Kelompok Asal IV** : Otonomi Khusus Papua

**Kelompok Asal V** : Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam

#### □ Kelompok Ahli

Terdiri dari kelompok asal ,untuk mendiskusikan (5W+1H) otonomi daerah/otonomi khusus.

**Kelompok Ahli I :**

What ?

**Kelompok Ahli II :**

Why ?

**Kelompok Ahli III :**

When ?

**Kelompok Ahli IV :**

Where ?

**Kelompok Ahli V :**

Who ?

**Kelompok Ahli VI :**

How ?

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMA Negeri 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	: X / Gasal
Materi Pokok	: Kedudukan Serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
Alokasi Waktu	: 2 X 45 Menit (1 Pertemuan)

---

### A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingi Tahuinya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

**B. Kompetensi Dasar ( KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)**

<b>Kompetensi Dasar (KD)</b>		<b>Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)</b>	
1.4.	Menghormati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1.4.1	Membangun nilai-nilai proaktif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
		1.4.2	Membangun nilai-nilai responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.4.	Menunjukkan nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2.4.1	Membangun nilai-nilai proaktif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		2.4.2	Membangun nilai-nilai responsif yang terkandung dalam hubungan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang

			Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.4.	Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4	<p>Menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p><b>Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat.</b></p> <p><b>Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah</b></p> <p>Menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah</p>
4.4.	Menyaji hasil analisis tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.4.1 4.4.2	<p>Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>Mengkomunikasikan hasil telaah mengenai otonomi daerah dan otonomi khusus yang diberikan oleh suatu daerah menurut Undang-</p>

			Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
--	--	--	---

### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

#### 1. Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial

Setelah mengikuti pelajaran peserta didik diharapkan mampu :

- a. Melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran tentang kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari materi tentang kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Menampilkan sikap kerjasama terkait kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Menampilkan sikap tanggung jawab terkait kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 2. Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik diharapkan dapat :

- a. Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat
- b. Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah
- c. Mengkomunikasikan kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah

### D. MATERI PEMBELAJARAN : FAKTA, KONSEP, PRINSIP, PROSEDUR

#### 1. Fakta

- a. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

- c. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah
2. Konsep
    - a. Konsep/pengertian tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - b. Konsep/pengertian tentang Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
    - c. Konsep/pengertian tentang Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Prinsip
    - a. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - b. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
    - c. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Prosedur
    - a. Prosedur atau tata cara dalam proses Desentralisasi atau Otonomi Daerah
    - b. Prosedur atau tata cara dalam kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah
    - c. Prosedur pemilihan kepala daerah

#### **E. METODE PEMBELAJARAN**

Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam materi pembelajaran “Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah” adalah :

1. Metode : *Scientific Learning*
2. Strategi : Ceramah, Tanya-Jawab *Klasikal*, permainan “*lempar dadu educative*”

## **F. Media dan bahan**

1. Media
  - a. *Power point* tentang kedudukan serta peran pemerintahan pusat dan daerah
  - b. Permainan "*lempar dadu educative*"
2. Alat/Bahan
  - a. LCD, *Proyektor*
  - b. Laptop
  - c. *White board*
  - d. Spidol
  - e. Kertas karton
  - f. Bolpoin

## **G. Sumber belajar**

- a. Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- b. Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946.
- f. Taniredja, Tukiran. 2012. *Tiga Undang-Undang Dasar di Indonesia*. Bandung : Alfabeta.
- g. Tim Penyusun. *Modul Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1*. Jawa Ttengah : Viva Pakarindo.

## H. LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN:

Kegiatan Belajar	Waktu
<p><b>a. Kegiatan Pendahuluan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta didik mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan memperhatikan kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar seperti buku paket, alat serta media pembelajaran yang diperlukan, kemudian berdoa bersama, guru menanyakan kehadiran peserta didik dengan presensi.</li><li>2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik</li><li>3. Guru bersama peserta didik melakukan <i>apersepsi</i> melalui tanya jawab <i>klasikal</i> mengaitkan kembali materi “desentralisasi/otonomi daerah” dengan materi yang akan dibahas yaitu tentang “Kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah”.</li><li>4. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang materi pokok pembelajaran yang akan dipelajari, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yakni “Kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah”.</li><li>5. Guru menyampaikan lingkup penilaian dan teknik penilaian yang akan digunakan dalam bab “Kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah”.</li></ol>	10’
<p><b>b. Kegiatan inti</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Mengamati</b><ol style="list-style-type: none"><li>a. Guru menampilkan materi terkait fakta &amp; konsep mengenai Kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah pada <i>Wall Screen</i>.</li></ol></li></ol>	70’

- b. Guru menjelaskan kedudukan dan peran yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah beserta tugas dan wewenangnya.
- c. Guru mengamati keterampilan peserta didik dalam mengamati skema kedudukan serta peran yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah.

## **2. Menanya**

- a. Guru bertanya kepada peserta didik, seperti :  
mengapa kita sebagai warga negara perlu mengetahui Kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah ?
- b. Guru bersama dengan peserta didik melakukan tanya jawab *klasikal* berkenaan dengan Kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah.

## **3. Mengumpulkan Informasi**

- a. Peserta didik diberi waktu oleh guru untuk memahami buku teks siswa.
- b. Peserta didik mengumpulkan informasi melalui internet atau sumber lain secara berkelompok.

## **4. Mengasosiasi**

- c. Guru mengamati peserta didik dalam kegiatan belajar mandiri untuk memahami buku siswa
- d. Guru memberikan permainan kepada siswa "*lempar dadu educative*" dan memberikan arahan aturan main terkait permainan tersebut.
- e. Guru membimbing peserta didik dalam permainan, peserta didik yang mendapatkan dadu wajib menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru/teman sebaya

## **5. Mengkomunikasikan**

- a. Guru membimbing setiap perwakilan siswa yang mendapatkan tantangan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru maupun teman sebaya.

<p>b. Guru bersama peserta didik memberikan <i>apresiasi</i> dengan bertepuk tangan, guru memberikan klarifikasi dan umpan balik, serta penguatan hasil tanya jawab siswa melalui media bermain.</p>	
<p><b>c. Penutup</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik secara aktif menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya-jawab <i>klasikal</i> dengan dibimbing oleh guru.</li> <li>2. Peserta didik membuat <i>refleksi</i> atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan dengan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara.</li> <li>3. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami.</li> <li>4. Guru melakukan <i>evaluasi</i> dengan memberikan pertanyaan secara lisan terkait materi yang telah disampaikan yaitu tentang fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara.</li> <li>5. Guru memberitahukan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya yaitu KD 4.3. tentang “Hubungan Pemerintah pusat dan daerah”.</li> <li>6. Guru mengajak peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing.</li> </ol>	<p>10’</p>

## I. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

### 1. Teknik penilaian

#### a. Penilaian Sikap Spiritual

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran ( <i>assessment for and of learning</i> )

#### b. Penilaian Sikap Sosial

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Penilaian diri	Lembar penilaian antar teman	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran usai	Penilaian sebagai pembelajaran ( <i>assessment as learning</i> )

#### c. Penilaian Pengetahuan

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Tertulis	Pertanyaan (tertulis) dengan soal pilihan ganda	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran selesai	Penilaian untuk pembelajaran ( <i>assessment for learning</i> )
2	Penugasan	Tugas berbentk diskusi kelompok	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk pembelajaran ( <i>assessment for learning</i> )

d. Penilaian Keterampilan

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Bentuk Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Praktik	Tugas (keterampilan)	Lihat Lampiran ...	Sesi pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk, sebagai, dan/atau pencapaian pembelajaran (Assessment for, as, and of learning)

Yogyakarta, 31 Oktober 2017

Mengetahui  
Guru Pembimbing

Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT

Rahayu Setianingsih

NIM.14401243003

# LAMPIRAN

Sekolah	: SMA N 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ( PPKn)
Kelas / Semester	: X / 1 (Satu)
Materi Pokok	: Kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit

## I. MATERI PEMBELAJARAN

### **Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat**

Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi.

#### **a. Fungsi Layanan (*Servicing Function*)**

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya.

#### **b. Fungsi Pengaturan (*Regulating Function*)**

Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

Sementara itu ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah.

##### 1) Menyediakan infrastruktur ekonomi

Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya.

##### 2) Menyediakan barang dan jasa kolektif

Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa *public goods* yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya.

3) Menjembatani konflik dalam masyarakat

Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat.

4) Menjaga kompetisi

Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut.

5) Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa

Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.

6) Menjaga stabilitas ekonomi

Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi.

c. **Fungsi Pemberdayaan**

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma.

Selain kewenangan tersebut di atas, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain sebagai berikut.

- a. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
- b. Dana perimbangan keuangan.
- c. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.
- d. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

- e. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.
- f. Konservasi dan standarisasi nasional.

Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Memperhatikan pemerataan dan keadilan.
3. Menciptakan demokratisasi.
4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional.
5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut.

1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.
2. Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara.
3. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional.
4. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal dan berisiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, penerbangan antariksa, dan sebagainya.
5. Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal.
6. Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya.
7. Memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

## II. INSTRUMEN PENILAIAN

### 1. Penilaian sikap Spiritual dan Sosial

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam Observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang dinilai yaitu kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

#### Pedoman Pengamatan Sikap Spiritual dan Sosial

Kelas : .....

Hari, Tanggal : .....

Pertemuan Ke- : .....

Materi Pokok : .....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian					
		Bersyukur	Berdoa	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab	Peduli

### 2. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik pada saat menyajikan hasil belajar mengenai kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/ Argumentasi				Memberi Masukan/Saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Keterangan: diisi dengan tanda cek (V)

Kategori Penilaian :

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

**Rumus :**

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{12} \times 100$$

**\*Pedoman Penskoran (rubrik)**

No	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan Menjawab Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Kemampuan Memberi Masukan	Skor 4, apabila selalu memberi masukan/saran Skor 3, apabila sering memberi masukan/saran Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan/saran Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan/ saran

### 3. Penilaian Pengetahuan

Penilaian Pengetahuan : Pertanyaan lisan sesuai IPK dan pertanyaan yang berkembang dalam pembelajaran.

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMA Negeri 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	: X / Gasal
Materi Pokok	: Hubungan Struktural dan Fungsional
Pemerintah Pusat dan Daerah	
Alokasi Waktu	: 2 X 45 Menit (1 Pertemuan)

---

### A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

**B. Kompetensi Dasar ( KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)**

<b>Kompetensi Dasar (KD)</b>		<b>Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)</b>	
1.4.	Menghormati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1.4.1	Membangun nilai-nilai proaktif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		1.4.2	Membangun nilai-nilai responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.4.	Menunjukkan nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2.4.1	Membangun nilai-nilai proaktif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		2.4.2	Membangun nilai-nilai responsif yang terkandung dalam hubungan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.4.	Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.4.1 3.4.2 3.4.3 <b>3.4.4</b>	Menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah <b>Menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah</b>
4.4.	Menyaji hasil analisis tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.4.1 4.4.2	<b>Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</b>  Mengkomunikasikan hasil telaah mengenai otonomi daerah dan otonomi khusus yang diberikan oleh suatu daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

#### 1. Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial

Setelah mengikuti pelajaran peserta didik diharapkan mampu :

- a. Melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran tentang Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.

- b. Menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari materi tentang Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Menampilkan sikap kerjasama terkait materi Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.
- d. Menampilkan sikap tanggung jawab terkait Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.

## **2. Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan**

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik diharapkan dapat :

- a. Mengidentifikasi hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah
- b. Mengidentifikasi hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah
- c. Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **D. MATERI PEMBELAJARAN : FAKTA, KONSEP, PRINSIP, PROSEDUR**

### **1. Fakta**

- a. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
- c. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah

### **2. Konsep**

- a. Konsep/pengertian tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Konsep/pengertian tentang Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
- c. Konsep/pengertian tentang Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah

### **3. Prinsip**

- a. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - b. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
  - c. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Prosedur
- a. Prosedur atau tata cara dalam proses Desentralisasi atau Otonomi Daerah
  - b. Prosedur atau tata cara dalam kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah
  - c. Prosedur atau tata cara dalam pemilihan kepala daerah

#### **E. METODE PEMBELAJARAN**

Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam materi pembelajaran “Hubungan Struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah” adalah :

1. Pendekatan : *Scientific Learning*
2. Strategi : Pencarian informasi tentang hubungan Struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dengan cara menjodohkan lembar informasi yang diberikan oleh guru.
3. Metode : Ceramah, tanya jawab, game tentang kedudukan dan peran dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

#### **F. Media dan bahan**

1. Media/alat : Power point
2. Bahan : LCD, *Proyektor*, *whiteboard*, Kertas, Bolpoin, spidol

#### **G. Sumber belajar**

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Tim Penyusun. *Modul Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester I*. Jawa Ttengah : Viva Pakarindo.

#### H. LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN:

Kegiatan Belajar	Waktu
<p><b>a. Kegiatan Pendahuluan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan memperhatikan kebersihan dan kerapihan kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar seperti buku paket, alat serta media pembelajaran yang diperlukan, kemudian berdoa bersama, guru menanyakan kehadiran peserta didik dengan presensi.</li> <li>2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik</li> <li>3. Guru bersama peserta didik melakukan <i>apersepsi</i> melalui tanya jawab <i>klasikal</i> mengaitkan kembali materi “Kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah” dengan materi yang akan dibahas yaitu tentang “Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah”.</li> <li>4. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang materi pokok pembelajaran yang akan dipelajari, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yakni “Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah”.</li> <li>5. Guru menyampaikan lingkup penilaian dan tehnik penilaian yang akan digunakan.</li> </ol>	10’
<p><b>b. Kegiatan inti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Mengamati</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Guru menampilkan materi terkait fakta &amp; konsep terkait Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah pada <i>Wall Screen</i>.</li> </ol> </li> </ol>	70’

- b. Guru menjelaskan mengenai Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
- c. Guru mengamati keterampilan peserta didik dalam mengamati hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

## **2. Menanya**

- a. Guru bertanya kepada peserta didik, seperti : bagaimana jika pemerintah pusat tidak menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah ?
- b. Peserta didik bersama dengan guru melakukan dialog mendalam secara *klasikal* untuk mengungkapkan bagaimana tanggapan peserta didik berdasarkan masalah yang disajikan oleh guru.
- c. Guru bersama dengan peserta didik melakukan tanya jawab *klasikal* berkenaan dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah.

## **3. Mengumpulkan Informasi**

- a. Guru memberikan lembar informasi/kertas untuk dibagikan kepada seluruh peserta didik yang berisi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah baik secara struktural maupun fungsional.
- b. Peserta didik mencari jodoh (mencocokkan) terkait hubungan pemerintah pusat/daerah dengan teman sebaya, jika peserta didik yang tidak mendapatkan jodohnya atau dalam mencocokkan tidak tepat disuruh maju kedepan untuk mendapatkan *punishment*.

## **4. Mengasosiasi**

- a. Menugaskan kepada masing-masing peserta didik tentang materi dalam lembar informasi (kertas) yang telah dibagikan dan telah menemukan jodohnya untuk di analisis.
- b. Guru memberikan pendampingan kepada peserta didik dalam mengerjakan tugas dan memfasilitasi jika ada peserta didik yang mengalami kesulitan.

## **5. Mengkomunikasikan**

- a. Menugaskan kepada peserta didik secara bergiliran untuk mempresentasikan hasil analisisnya.

<p><b>c. Penutup</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik secara aktif menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya-jawab <i>klasikal</i> dengan dibimbing oleh guru.</li> <li>2. Peserta didik membuat <i>refleksi</i> atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan dengan Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah.</li> <li>3. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami.</li> <li>4. Guru melakukan <i>evaluasi</i> dengan memberikan pertanyaan secara lisan terkait materi yang telah disampaikan yaitu tentang Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah.</li> <li>5. Mengajak peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing.</li> </ol>	10'
---	-----

## I. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

### 1. Teknik penilaian

#### a. Penilaian Sikap Spiritual

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran ( <i>assessment for and of learning</i> )

b. Penilaian Sikap Sosial

1	Penilaian diri	Lesah penilaian antar teman	Lihat lampiran ...	Setelah pembelajaran usai	Penilaian sebagai pembelajaran (assessment as learning)
---	----------------	-----------------------------	--------------------	---------------------------	---

c. Penilaian Pengetahuan

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Tertulis	Pertanyaan (tertulis) dengan soal pilihan ganda	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran selesai	Penilaian untuk pembelajaran (assessment for learning)
2	Penugasan	Tugas berbentuk diskusi kelompok	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk pembelajaran (assessment for learning)

d. Penilaian Keterampilan

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Praktik	Tugas (keterampilan)	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk, sebagai, dan/atau pencapaian pembelajaran (assessment for, as, and of learning)

Yogyakarta, 30 Oktober 2017

Mengetahui  
Guru Pembimbing

Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT

Rahayu Setiawaningsih

NIM.14401241003

Sekolah	: SMA N 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ( PPKn)
Kelas / Semester	: X / 1 (Satu)
Materi Pokok	: Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit

## I. MATERI PEMBELAJARAN

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *Cara pertama*, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. *Cara kedua*, dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.

- a) Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.
- b) Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.
- c) Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.

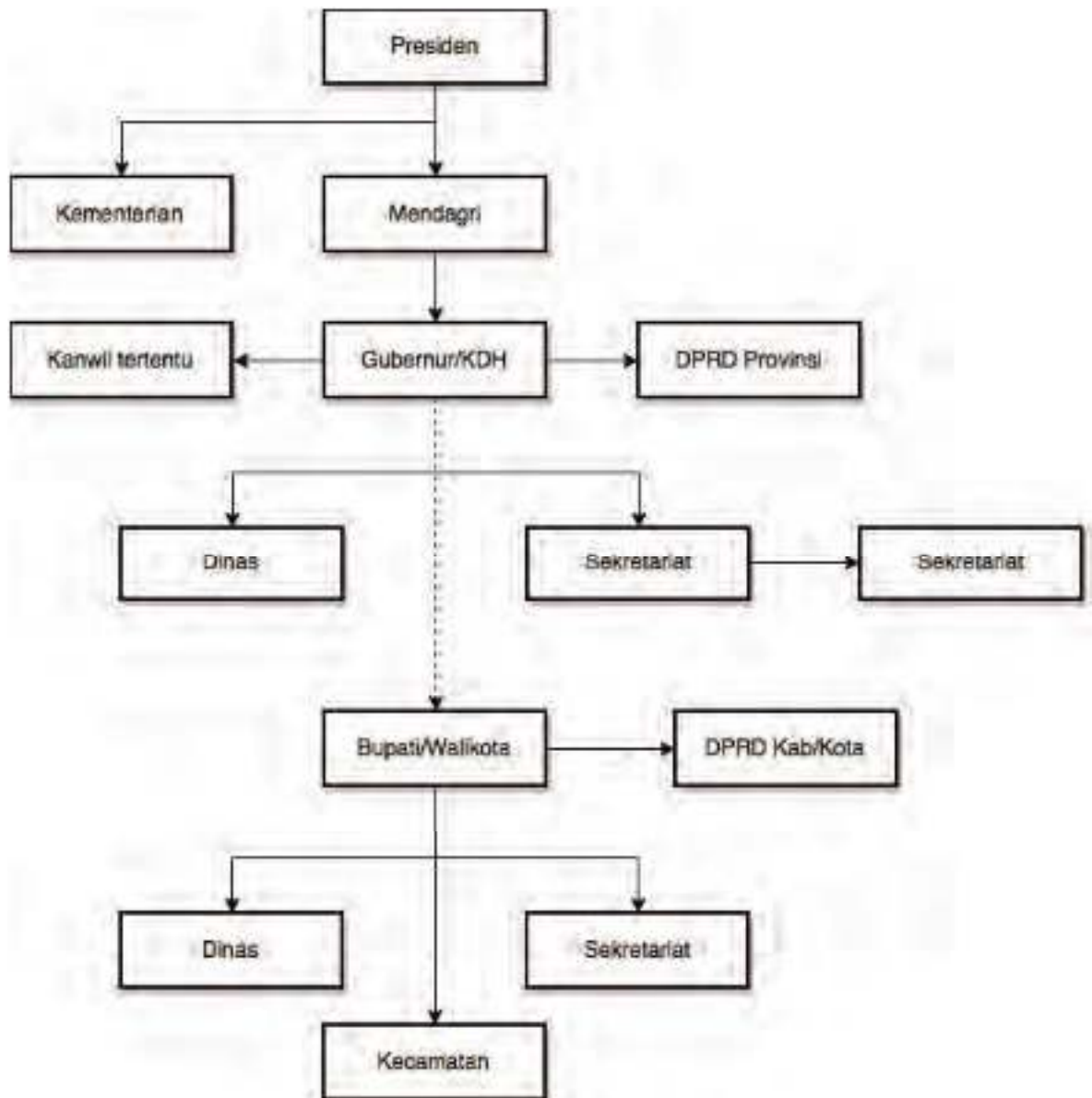
Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

### **Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah**

Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah

melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya.

Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah tergambar pada bagan berikut.



## II. INSTRUMEN PENILAIAN

### 1. Penilaian sikap Spiritual dan Sosial

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam Observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang dinilai yaitu kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

#### Pedoman Pengamatan Sikap Spiritual dan Sosial

Kelas : .....

Hari, Tanggal : .....

Pertemuan Ke- : .....

Materi Pokok : .....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian					
		Bersyukur	Berdoa	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab	Peduli

### 2. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik pada saat menyajikan hasil diskusi terkait otonomi daerah dan otonomi khusus negara kesatuan republik Indonesia.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/ Argumentasi				Memberi Masukan/Saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Keterangan: diisi dengan tanda cek (V)

Kategori Penilaian :

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

**Rumus :**

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{12} \times 100$$

**\*Pedoman Penskoran (rubrik)**

No	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan Menjawab Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Kemampuan Memberi Masukan	Skor 4, apabila selalu memberi masukan/saran Skor 3, apabila sering memberi masukan/saran Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan/saran Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan/ saran

### 3. Penilaian Pengetahuan

Penilaian Pengetahuan : Pertanyaan lisan sesuai IPK dan pertanyaan yang berkembang dalam pembelajaran. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan menilai hasil penugasan yaitu Tugas Kelompok 4.3.

## SILABUS

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas : X (Sepuluh)

Semester : I (Satu)

### **Kompetensi Inti**

**1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) Untuk kompetensi inti sikap spiritual**

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

**2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) Untuk kompetensi inti sikap sosial**

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

**3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) Untuk kompetensi inti pengetahuan**

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

**4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) Untuk kompetensi inti keterampilan**

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar	Materi pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>1.1.Mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>2.1Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahnNegara</p> <p>3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>4.1.Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraanpemerintahan negara</p>	<p>Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>a. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia.</p> <p>b. Kedudukan serta Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai-nilai Pancasila dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamati gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, media cetak maupun elektronik)nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara</li> <li>• Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan mendalam/dialektis dengan menggunakan <i>high-orderthinking skills</i> (HOTS) tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</li> </ul>	<p><b>Sikap :</b> Spiritual, Sosial</p> <p><b>Pengetahuan :</b> Tes Tertulis. Penilaian Harian 1</p> <p><b>Penugasan :</b> Aktivitas kelompok, Uji kompetensi</p>	<p><b>8 JP</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku teks Siswa Kelas X</li> <li>• Buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara</li> <li>• Buku Penujan g lainnya</li> </ul>

	Penyelenggaraan pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber (Buku yang relevan, media masa, memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi) dengan penuh kejujuran dan toleransi tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</li> <li>• Menganalisis dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</li> </ul>			
1.2.menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang	Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamati gambar /tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau melakukan</li> </ul>	<b>Sikap :</b> Spiritual, Sosial	<b>8 JP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku teks Siswa Kelas X</li> <li>• Buku Penunjang</li> </ul>

<p>mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil.</p> <p>2.2.mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-sundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan .</p> <p>3.2.menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p>	<p>kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>b. Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia.</p> <p>c. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia.</p> <p>d. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia.</p>	<p>kajian konstitusionalitas (membaca ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</li> </ul>	<p><b>Pengetahuan :</b> Tes Tertulis, Penilaian Harian 2</p> <p><b>Penugasan :</b> Aktivitas Kelompok Uji Kompetensi</p> <p><b>Keterampilan :</b> Unjuk Kerja : Diskusi Proyek</p>		<p>Lainnya yang relevan</p>
---	---	--	--	--	-----------------------------

4.2.menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undangundang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

- Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan
- Menganalisis dan menyimpulkan serta mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.

<p>1.3.menghargai nilai-nilai terkait fungsi lembaga lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil.</p> <p>2.3.menghargai perilaku peduli terhadap nilai-nilai terkait fungsi lembaga lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.3.menganalisis kewenangan lembaga lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.3.menyajikan hasil kesimpulan tentang kewenangan lembaga lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>Kewenangan lembaga lembaga Negara Menurut UUD 1945.</p> <p>a. Suprastruktur dan Infrastruktur politik Indonesia.</p> <p>b. Lembaga lembaga Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>c. Tata kelola pemerintahan yang baik.</p> <p>d. Partisipasi warga negara dalam sistem politik RI .</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamati gambar /tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, artikel, media cetak maupun elektronik) tentang kewenangan lembaga lembaga Negara.</li> <li>• Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang kewenangan lembaga lembaga Negara</li> <li>• Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan penuh disiplin dan tanggung jawab tentang kewenangan lembaga lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> </ul>	<p><b>Sikap :</b> Spiritual, Sosial</p> <p><b>Pengetahuan :</b> Tes Tertulis, Penilaian Harian 3</p> <p><b>Penugasan :</b> Aktivitas Kelompok Uji Kompetensi</p> <p><b>Keterampilan :</b> Unjuk Kerja : Diskusi Proyek</p>	<p><b>6 JP</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku Teks Siswa Kelas X</li> <li>• Buku Penujangan Lainnya yang relevan</li> </ul>
---	--	---	--	--------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyimpulkan dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> </ul>			
<p>1.4. Menghayati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil.</p> <p>2.4. Menghargai nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.4. Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat</p>	<p>Hubungan pemerintahan pusat dan daerah.</p> <p>a. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>b. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan Daerah.</p> <p>c. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengamati gambar /tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, artikel, media cetak maupun elektronik) tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah</li> <li>Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan secara pro-aktif dan responsif dengan menggunakan <i>higher-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang hubungan struktural dan</li> </ul>	<p><b>Sikap :</b> Spiritual, Sosial</p> <p><b>Pengetahuan :</b> Tes Tertulis, Penilaian Harian 4</p> <p><b>Penugasan :</b> Aktivitas Kelompok Uji Kompetensi</p>	<b>8 JP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku teks Siswa Kelas X</li> <li>Buku Penunjang Lainnya yang Rerevan.</li> </ul>

<p>dan daerah menurut Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .</p> <p>4.4.Menyaji hasil kesimpulan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>		<p>fungsional pemerintahan pusat dan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk media cetak dan elektronik secara pro aktif dan responsif tentanghubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah</li> <li>• Menganalisis, menyimpulkan dan mempresentasikan hasil analisis data dan hasil proyek Kewarganegaraan secara pro aktif dan responsif tentanghubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah</li> </ul>	<p><b>Keterampilan :</b></p> <p>Unjuk Kerja :</p> <p>Diskusi Proyek</p>		
---	--	--	---	--	--



Yogyakarta, 20 September 2017

Mengetahui

Guru Pembimbing



Substri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Baharu Setjoningih

NIM.14401241005

### KISI – KISI ULANGAN HARIAN

Nama Sekolah : SMA N 11 Yogyakarta  
 Mata Pelajaran : PPKn  
 Semester : 1 (Satu)

Jumlah Soal : 15 Soal  
 Kurikulum : K13  
 Alokasi Waktu : 2JP (90 Menit)

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator Soal	Bentuk Tes	Tingkat Kognitif	No Soal
3.3. Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menuurt Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.	1. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia. 2. Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945. 3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( <i>Good Governance</i> ).	3.3.1. Peserta didik mampu menganalisis suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia.	Pilihan ganda, uraian	C3	1,1 Essay
		3.3.2. Peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia.	Uraian	C1	2 Essay

	4. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia.	3.3.3. Peserta didik mampu mengklasifikasikan Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD 1945.	Pilihan ganda, uraian	C3	2, Essay 3
		3.3.4. Peserta didik mampu menjelaskan tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD 1945	Pilihan ganda, uraian	C1	3, 4, 5, Essay 4
		3.3.5. Peserta didik mampu menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik.	Pilihan ganda	C3	7
		3.3.6. Peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur pokok beserta karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik.	Pilihan ganda	C1	8
		3.3.7. Siswa mampu menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.	Pilihan ganda, uraian	C1	9, 5 Essay

		3.3.8. Siswa mampu menjelaskan piramida partisipasi politik menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson	Pilihan ganda	C1	10
--	--	---	---------------	----	----

Yogyakarta, 23 Oktober 2017

Mengetahui

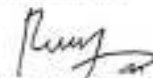
Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Rahayu Setyaningsih

NIM.14401241003

## ULANGAN HARIAN PPKn

### MATERI KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945

#### A. Pilihan Ganda

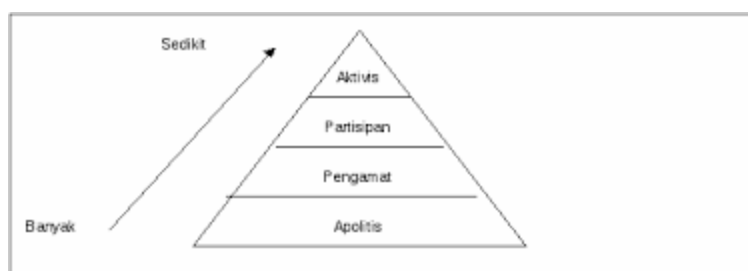
**Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar !**

1. Struktur politik suatu negara terdiri dari kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Berikut yang termasuk kedalam suprastruktur politik adalah :
  - a. legislatif, eksekutif, yudikatif
  - b. legislatif, eksekutif, federatif
  - c. eksekutif, yudikatif, federatif
  - d. Partai politik, Kelompok Kepentingan, Kelompok Penekan
  - e. Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Alat komunikasi politik
  
2. Dalam sistem poliitk Indonesia pelaksana fungsi kebijakan legislatif adalah ....
  - a. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
  - b. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
  - c. MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD
  - d. Presiden bersama DPR
  - e. Presiden dengan dibantu oleh wakilnya dan para menteri
  
3. Hak yang dimiliki oleh DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintahan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disebut hak ....
  - a. Interpelasi
  - b. Imunitas
  - c. Bugjed
  - d. Angket
  - e. Inisiatif
  
4. Para menteri-menteri Negara di pilih, diangkat, dan diberhentikan oleh ....
  - a. MPR
  - b. DPR
  - c. presiden
  - d. DPA
  - e. MA

5. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, menurut UUD 1945 setelah perubahan yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah ....
  - a. Mahkamah Agung
  - b. Badan Pengawas Keuangan
  - c. Dewan Perwakilan Rakyat
  - d. Dewan Perwakilan Daerah
  - e. Dewan pertimbangan agung
  
6. Berikut yang merupakan unsur pokok yang bersifat sinergis dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah ....
  - a. Kelompok kepentingan, pemerintah pada suatu periode tertentu, rakyat
  - b. Pemerintah pada suatu periode tertentu, swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik, warga masyarakat
  - c. Warga masyarakat, pengusaha asing, kelompok kepentingan
  - d. Kelompok kepentingan, warga masyarakat, kelompok penekan
  - e. Pemerintah pada suatu periode tertentu, warga masyarakat, kelompok kepentingan.
  
7. Yang bukan merupakan ciri-ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik menurut Laode Ida adalah ....
  - a. Tidak adanya saling ketergantungan yang dinamis antara ketiga unsur
  - b. Saling ketergantungan yang dinamis antara ketiga unsur
  - c. Adanya komunikasi antara ketiga unsur untuk melakukan sinergi dalam menghasilkan *output* yang berkualitas
  - d. Adanya keseimbangan antara ketiga unsur dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berlanjut
  - e. adanya independensi antara ketiga unsur
  
8. Pentingnya sikap transparansi pada pemerintahan adalah ....
  - a. Memberikan informasi alur keuangan pada rakyat
  - b. Mengakui krisis moneter yang berkepanjangan
  - c. Mengurangi tingkat kriminalitas dalam masyarakat
  - d. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, adil, dan jujur
  - e. Agar pejabat pemerintahan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya

9. Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya memengaruhi kebijakan pemerintah disebut ....
- Partisipasi politik
  - Sosialisasi politik
  - Budaya politik
  - Sistem politik
  - Struktur politik

10. Perhatikan gambar berikut !



Berdasarkan gambar diatas, yang termasuk kedalam kelompok pengamat adalah ....

- Pejabat partai, pemimpin partai, kelompok kepentingan
- Pemimpin partai, petugas kampanye, menghadiri rapat umum
- Anggota aktif dari partai, petugas kampanye, memberikan suara dalam pemilu
- Memberikan suara dalam pemilu, anggota partai, orang yang golput
- Menghadiri rapat partai, memberikan suara dalam partai, membicarakan masalah politik

## B. Uraian

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !**

- Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Jelaskan apa yang dimaksud partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, tokoh politik, dan media komunikasi politik !
- Jelaskan secara singkat hubungan antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam sistem politik di Indonesia !
- Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 terbagi dalam lembaga tinggi negara, lembaga negara dan lembaga daerah, sebutkan lembaga negara yang termasuk lembaga tinggi negara !
- Jelaskan apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman menurut pasal 24 (1)\*\*\* !

5. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikan contoh partisipasi dan perilaku politik di lingkungan sekolah yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku !

## **KETERLAKSANAAN PERBAIKAN DAN PENGAYAAN ULANGAN HARIAN KD 3**

Mata Pelajaran : PPKn  
Kelas : X IPA 1 & X IPS 1  
Semester : Gasal  
Tahun Ajaran : 2017/2018

### **A. KOMPETENSI INTI**

**1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) Untuk kompetensi inti sikap spiritual**

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

**2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) Untuk kompetensi inti sikap sosial**

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

**3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) Untuk kompetensi inti pengetahuan**

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

**4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) Untuk kompetensi inti keterampilan**

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

No	Kompetensi Dasar	Materi	Nama	Bentuk	Waktu	Nilai		Keterangan
						Sebelum	Sesudah	
1	3.3.Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menuurt Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia</li> <li>2. Lembaga-lembaga negara RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.</li> <li>3. Tata kelola pemerintahan yang baik.</li> <li>4. Partisipasi warga negara dalam sistem politik RI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afnan Daffa</li> <li>2. Andika Satria Pratama</li> </ol>	Penugasan Ulangan Harian (Mengerjakan Modul Pembelajaran siswa hal.59 poin Remedial)	Rabu,8 Oktober 2017	65 67,5	70 70	KKM 70

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengetahui

Guru Pembimbing

Mahasiswa PLT

**Sulastri, S.Pd**

NIP.19720926 200604 2 006

**Rahayu Setivaningsih**

NIM.14401241003





**DAFTAR NILAI KELAS X IPA 1**  
**MATA PELAJARAN PPKn**  
**MATERI BAB III & BAB IV**

NO	NAMA	Tugas Kelompok Ke-				Tugas Individu dan UH	
		1	2	3	4	1	UH
1	AFNAN DAFFA	80	80	80	80	80	70
2	AHMAD ABDUL AZIZ	85	85	90	80	80	75
3	ALLANIZ MOURENNA SELSA	85	75	90	80	85	97,5
4	ALVARO ADITYA SUMARTONO	85	85	90	80	85	85
5	ANDIKA MUHAMMAD AKBAR	80	75	85	80	90	95
6	ANDIKA Satria PRATAMA	85	80	90	80	85	70
7	ANDIKA TAUFIK NUGROHO	80	75	80	80	85	97,5
8	ANINDYA AYU KUSUMA	80	85	90	80	80	97,5
9	AQIILA AYYA DANASTRI	85	80	85	80	80	90
10	AZAM AZRI AHMAD	80	80	85	80	70	95
11	DAFFA NAUFAL ARRAFI	80	80	80	80	80	95
12	DEWI SETYOWATI	80	85	90	80	80	97,5
13	EGIES MAHARANI FEBYARUMI	85	75	80	80	90	95
14	ELFINA AGUNG AISYAHRA	80	80	75	80	85	95
15	FADHILA PUSPITASARI	85	75	90	80	80	95
16	FARREL DAVIN JASVIERO	75	85	80	80	80	87,5
17	FLOREETHA ADELIA AVILA LAZARUS	85	80	80	80	85	90
18	HANIF ABDILAH	80	85	85	80	70	95
19	INTAN FIRDHA OLIEN NOOR AL-ICHSAN	80	75	80	80	80	87,5
20	JADE AQILAH AZARIA	80	85	90	80	90	95
21	LINTANG AYU SUMEKAR	80	85	85	80	90	100
22	MAYA MAUDINA NURPRADINI	85	85	75	80	90	97,5
23	MUHAMMAD RIZKI FIRMANSYAH	75	80	85	80	85	97,5
24	NABILA DARTIYA ZULFANI	80	85	80	80	85	100
25	NADIN RAHMA NUR AISYAH	80	75	90	80	90	100
26	NASHIRA OKSANI ARDINE SANTOSA	85	80	85	80	80	95
27	NAUFAL SYAFIQL HADI FIRMANSYAH	85	85	90	80	80	80

28	NUR AINI DWI RAHMAWATI	80	85	85	80	85	95
29	SAFFA AMALIA SOLIKHAH	80	85	80	80	85	80
30	SYAFA FITRANANDA	80	80	85	80	85	92,5

Yogyakarta, 15 Oktober 2017

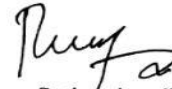
Guru Mata Pelajaran PPKN



Sulastri, S.Pd

NIP. 19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT UNY



Rahayu Setyaningsih

14401241003

**DAFTAR NILAI KELAS X IPS 1  
MATA PELAJARAN PPKn  
MATERI BAB III & BAB IV**

NO	NAMA	Tugas Kelompok Ke-				Tugas Individu Ke-			UH	Remidi
		1	2	3	4	1	2	3		
1	ALOUSIA CENDY LINTANG SUDIRA	80	85	85	85	80			80	
2	ANGGARA PRADANA DYAKSA KUSUMO	85	85	85	85	80			85	
3	AQILA AMBARI DEVI	85	85	85	85	80			85	
4	AURORA CHOIRUNNISA	85	85	85	85	80			90	
5	AZIZ NUR RIZKI	85	90	85	85	80			85	
6	BASKARA HASTA MANGGALA	80	85	85	85	80			75	
7	BIRGITTA CARISSA NINDYAKIRANA	85	90	85	85	85			70	
8	CHRISTOPHORUS ALFA RISDI PUTRA	80	85	85	85	85			95	
9	DHITO ROFIADHI ILHAMSYAH HARIYANTO	90	85	85	85	80			90	
10	ERLINDA EKA WIJAYANTI	80	85	85	85	80			75	
11	FARA SENAYA	85	90	85	85	85			75	
12	FERDIANSYAH ARDI ACHDIYAT	80	90	85	85	80			80	
13	HANAN CHINTYA HANIFAH	80	90	85	85	80			75	
14	MAHENDRA WARDHANA	90	90	85	85	80			90	
15	MARIA ANUGRAHANING KESUMA PUTRI	90	85	85	85	80			70	
16	MUHAMMAD BAYU CATUR NUGROHO	80	85	85	85	80			85	
17	MUHAMMAD MIRZA SHAFI YANUAR	85	85	85	85	80			85	
18	NINDYA AISYAH DWINURAZIZAH	80	85	85	85	80			70	
19	PUTRI RIAS PRATIWI	80	<b>90</b>	85	85	90			100	
20	Q'AN NADIN PUSPA ALFAARIZH	90	<b>85</b>	85	85	80			85	
21	RIDWAN DANI DEWANTARA	75	90	85	85	80			70	
22	ROBERTUS RINOWO SATRIO WICAKSONO	90	85	85	85	80			85	
23	ROSA DISMITA ETANIA	80	85	85	85	80			80	
24	SALMA HANA LIYA	85	90	85	85	85			80	
25	SALMA RANA AZ ZAHRA	85	90	85	85	80			75	
26	SEVINKA SHAFALENA	90	85	85	85	80			75	
27	SRI RETNO ANJARWATI	85	85	85	85	80			75	
28	SUSTIYANTI DEWI ANGGRAINI	90	85	85	85	80			75	
29	TANAYA ALY'AMARA GHAZY	85	85	85	85	80			75	
30	TAZKIA INDAH CAHYANI	90	90	85	85	80			80	
31	TOTTI MAULANA GHOZALI'	80	85	85	85	80			85	
32	VITTO FERRYANT'	75	90	85	85	75			85	

Yogyakarta, 15 Oktober 2017

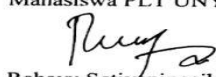
Guru Mata Pelajaran PPKn



Sulastri, S.Pd

NIP. 19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT UNY



Rahayu Setyaningsih

14401241003

ANALISIS HASIL BELAJAR

Mata Pelajaran : PPKn  
 Materi : Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945  
 Kelas : X IPA 2  
 Semester : 1 (Satu)

Tahun Ajaran : 2017/2018  
 Hari/Tang : 26 Oktober 2017  
 Jumlah Soal : 15  
 Bentuk Soal : Pilihan Ganda dan Essai

4 10

No	Nama Siswa	No Soal	Skor yang diperoleh															Jumlah Sko	Nilai	Ket	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5				
1	AFNAN DAFFA		1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	4	3	2	3	6	26	65	PENGAYAAN	
2	AHMAD ABDUL AZIZ		1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	4	5	4	3	6	30	75	PENGAYAAN
3	ALLANIZ MOURENA SELSA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	6	6	6	6	39	97,5	PENGAYAAN	
4	ALVARO ADITYA SUMARTONO		1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	4	5	6	6	5	34	85	PENGAYAAN	
5	ANDIKA MUHAMMAD AKBAR		1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	5	6	6	6	6	38	95	PENGAYAAN	
6	ANDIKA SATRIA PRATAMA		1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	3	2	5	2	6	27	67,5	REMIDI	
7	ANDIKA TAUFIK NUGROHO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	6	6	6	6	6	39	97,5	PENGAYAAN	
8	ANINDYA AYU KUSUMA		1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	39	97,5	PENGAYAAN	
9	AQILAH AYYA DANASTRI		1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	5	6	6	5	6	36	90	PENGAYAAN	
10	AZAM AZRI AHMAD		1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	6	6	6	6	6	38	95	PENGAYAAN	
11	DAFFA NAUFAL ARAFI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	6	6	6	6	5	38	95	PENGAYAAN	
12	DEWI SETYOWATI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	6	6	6	6	39	97,5	PENGAYAAN	
13	EGIES MAHARANI FEBYARUMI		1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	6	6	6	5	6	38	95	PENGAYAAN	
14	ELFINA AGUNG AISYAHRA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	6	6	6	5	38	95	PENGAYAAN	
15	FADHILA PUSPITASARI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	6	6	6	6	38	95	PENGAYAAN	
16	FARREL DAVIN JASVIERO		1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	6	6	6	3	6	35	87,5	PENGAYAAN	
17	FLOREETHA ADELIA AVILA LAZARUS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	3	6	6	6	6	36	90	PENGAYAAN	
18	HANIF ABDILAH		1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	6	6	5	6	6	38	95	PENGAYAAN	
19	INTAN FIRDDHA OLIEN NOOR AL-ICHSAN		1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	4	4	6	6	6	35	87,5	PENGAYAAN	
20	JADE AQILAH AZARIA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	5	6	6	6	6	38	95	PENGAYAAN	
21	LINTANG AYU SUMEKAR		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	40	100	PENGAYAAN	
22	MAYA MAUDINA NURPRADINI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	6	6	6	39	97,5	PENGAYAAN	
23	MUHAMMAD RIZKI FIRMANSYAH		1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	6	6	6	6	6	39	97,5	PENGAYAAN	
24	NABILA DARTIYA ZULFANI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	40	100	PENGAYAAN	
25	NADIN RAHMA NUR AISYAH		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	40	100	PENGAYAAN	
26	NASHIRA OKSANI ARDINE SANTOSA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	6	6	6	6	38	95	PENGAYAAN	
27	NAUFAL SAFIQL HADI FIRMANSYAH		1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	6	6	6	6	32	80	PENGAYAAN	
28	NUR AINI DWI RAHMAWATI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	6	6	5	6	38	95	PENGAYAAN	
29	SAFFA AMALIA SOLIKHAH		1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	4	5	6	2	6	32	80	PENGAYAAN	
30	SYAFA FITRANANDA		1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	6	6	6	6	6	37	92,5	PENGAYAAN	

Ketuntasan Belajar

Jumlah Siswa yang mengikuti Tes

Jumlah siswa yang tuntas

Jumlah siswa yang tidak tuntas

Daya Serap



ANALISIS HASIL BELAJAR

Mata Pelajaran : PPKn  
 Materi : Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945  
 Kelas : X IPS 1  
 Semester : 1 (Satu)

Tahun Ajaran : 2017/2018  
 Hari/Tang : 26 Oktober 2017  
 Jumlah Soal : 15  
 Bentuk Soal : Pilihan Ganda dan Essay

No	Nama Siswa	No Soal	Skor yang diperoleh															Jumlah Skor	Nilai	Ket		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	ALOUSIA CENDY LINTANG SUDIRA		1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	5	6	5	3	5	32	80	PENGAYAAN
2	ANGGARA PRADANA DYAKSA KUSUMO		1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6	3	6	5	5	34	85	PENGAYAAN	
3	AQILA AMBARI DEVI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	6	5	3	6	34	85	PENGAYAAN	
4	AURORA CHOIRUNNISA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	5	3	6	36	90	PENGAYAAN	
5	AZIZ NUR RIZKI		1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	4	5	5	6	6	34	85	PENGAYAAN	
6	BASKARA HASTA MANGGALA		1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	4	5	5	3	4	30	75	PENGAYAAN	
7	BIRGITTA CARISSA NINDYAKIRANA		1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	5	3	5	3	5	28	70	PENGAYAAN	
8	CHRISTOPHORUS ALFA RISDI PUTRA		1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	6	6	6	38	95	PENGAYAAN	
9	DHITO ROFIADHI ILHAMNSYAH HARIYANTO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	4	6	4	6	36	90	PENGAYAAN	
10	ERLINDA EKA WIJAYANTI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	5	3	3	30	75	PENGAYAAN	
11	FARA SENAYA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4	5	3	5	30	75	PENGAYAAN	
12	FERDIANSYAH ARDI ACHIDIYAT		1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	5	3	4	6	5	32	80	PENGAYAAN	
13	HANAN CHINTYA HANIFAH		1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	4	6	3	3	6	30	75	PENGAYAAN	
14	MAHENDRA WARDHANA		1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	5	6	6	6	6	36	90	PENGAYAAN	
15	MARIA ANUGRAHANING KESUMA PUTRI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	3	2	6	28	70	PENGAYAAN	
16	MUHAMMAD BAYU CATUR NUGROHO		1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	6	2	6	6	5	34	85	PENGAYAAN	
17	MUHAMMAD MIRZA SHAFYA YANUAR		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	6	6	5	34	85	PENGAYAAN	
18	NINDYA AISYAH DWINURAZIZAH		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	5	3	3	28	70	PENGAYAAN	
19	PUTRI RIAS PRATIWI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	40	100	PENGAYAAN	
20	QRAN NADIN PUSPA ALFAARIZH		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	5	5	5	34	85	PENGAYAAN	
21	RIDWAN DANI DEWANTARA		1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	4	3	3	3	6	28	70	PENGAYAAN	
22	ROBERTUS RINOWO Satrio Wicaksono		1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	5	6	6	34	85	PENGAYAAN	
23	ROSA DISMITA ETANIA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	4	6	3	4	6	32	80	PENGAYAAN	
24	SALMA HANA LIYA		1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	6	5	2	6	32	80	PENGAYAAN	
25	SALMA RANA AZ ZAHRA		1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	5	5	3	2	6	30	75	PENGAYAAN	
26	SEVINKA SHAFALENA		1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	6	3	4	3	5	30	75	PENGAYAAN	
27	SRI RETNO ANJARWATI		1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	4	5	5	3	6	30	75	PENGAYAAN	
28	SUSTIYANTI DEWI ANGGRAINI		1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	4	4	4	3	6	30	75	PENGAYAAN	
29	TANAYA ALYAMARA GHAZY		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	2	2	5	30	75	PENGAYAAN	
30	TAZKIA INDAH CAHYANI		1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	6	4	5	3	6	32	80	PENGAYAAN	
31	TOTTI MAULANA GHOZALI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	5	6	5	34	85	PENGAYAAN	
32	VITTO FERRYANT		0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	3	6	6	6	6	34	85	PENGAYAAN	

Ketuntasan Belajar

Jumlah Siswa yang mengikuti Tes  
 Jumlah siswa yang tuntas  
 Jumlah siswa yang tidak tuntas  
 Daya Serap

## FOTO KEGIATAN

### Stempel Kalender Pendidikan



**Inventarisasi Buku**



**Upacara Hari Sumpah Pemuda**



**Debat Calon Ketua OSIS SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA**



**PERHITUNGAN LEMBAR JAWAB PTS**



**PERHITUNGAN SOAL PTS**



**MENYIAPKAN ADMINISTRASI PTS**



**PIKET KBM**



**SUASANA KELAS X IPA 1**



## **DISKUSI KELOMPOK**



## **KEGIATAN BIOPORI**



## UPACARA HARI PAHLAWAN



## PIKET 3S



**PEMBELAJARAN X IPA 1**



## ULANGAN HARIAN



## KEGIATAN PEMBELAJARAN

